



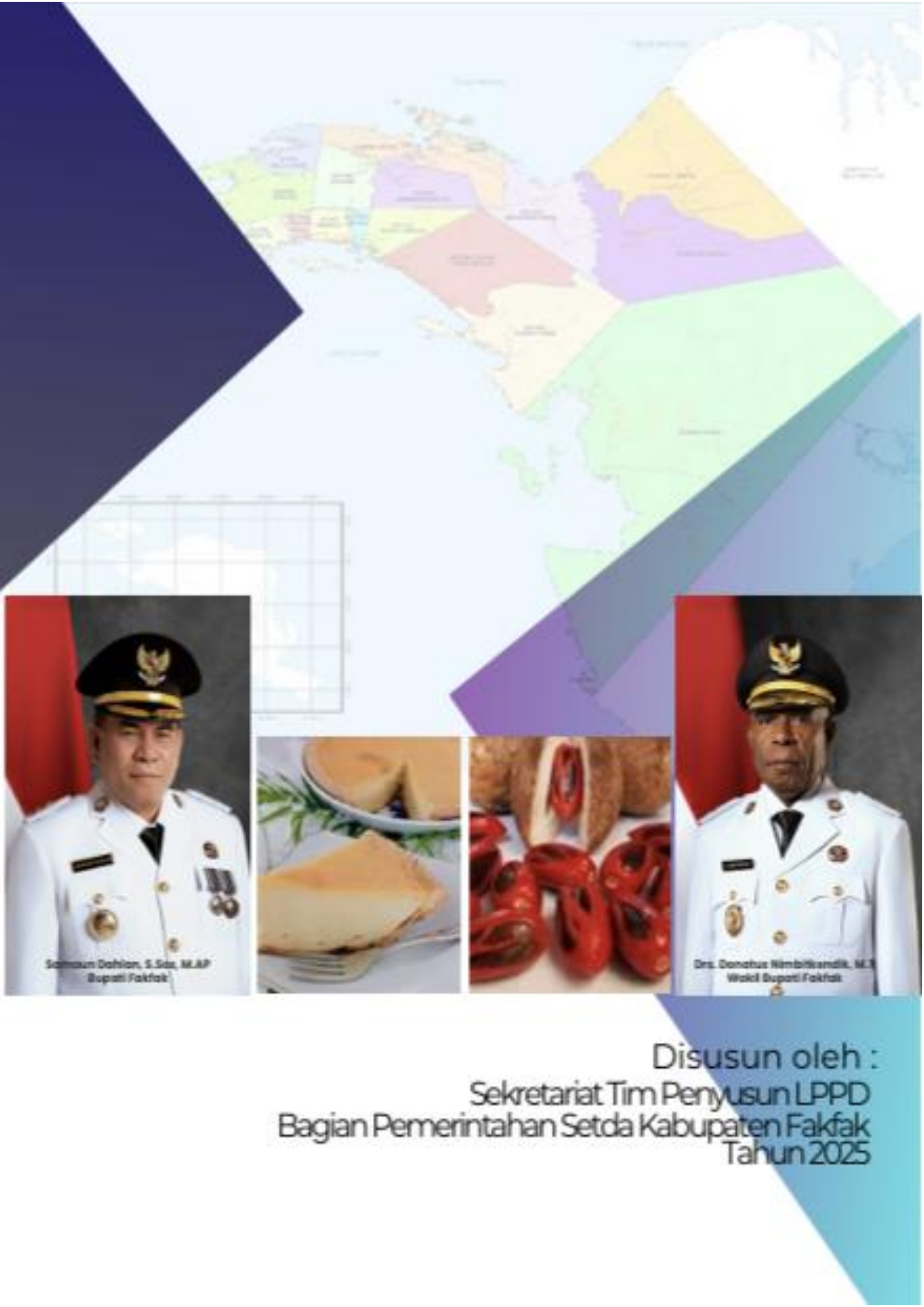
LPPD 2024

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT





Samsun Dahlan, S.Sos, M.A.P.
Bupati Fakfak



Drs. Donatus Nimbirkandik, M.P.
Wakil Bupati Fakfak

Disusun oleh :
Sekretariat Tim Penyusun LPPD
Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Fakfak
Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karunia dan perkenaan-Nya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2024 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah melalui kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (good local governance). Dalam konteks kebijakan desentralisasi tersebut, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD, maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahunnya. Gubernur menyampaikan LPPD Provinsi Kepada Presiden melalui Menteri dan Bupati/Walikota menyampaikan LPPD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. LPPD yang disampaikan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut, mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024, yang isinya berkaitan dengan sistematika pelaporan, substansi pelaporan dan khususnya pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada setiap urusan pemerintahan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah salah satu sumber utama informasi pemerintah sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan mendapatkan feedback bagaimana asas asas pemerintahan yang baik (good governance) dapat dilaksanakan dan diimplementasikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kabupaten Fakfak ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak, umumnya bagi Pemerintah Pusat yang memiliki tanggungjawab besar untuk melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat diharapkan dapat menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam LPPD sebagai informasi utama dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Pelaksanaan evaluasi terhadap LPPD adalah sebuah langkah strategis bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta melihat progres pencapaian tujuan desentralisasi dari aspek pengambilan kebijakan dan pelaksana kebijakan, yang pada akhirnya dijadikan masukan bagi

perencanaan pembangunan di masing-masing pemerintah daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing Pemerintah Daerah.

Adanya Indikator Kinerja Kunci yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LPPD sesungguhnya telah menyuguhkan potret riil terhadap kualitas kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan Good Governance. Oleh karena itu, presentase pemanfaatan dana yang masuk dalam suatu daerah otonom akan menggambarkan integritas moral pengambil kebijakan di daerah terkait sejauh mana tingkat kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui LPPD ini pula akan terlihat secara jelas besaran dan presentase pemanfaatan dana yang digunakan untuk belanja aparatur dan yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang sifatnya prioritas.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan data serta informasi, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Fakfak, 25 Maret 2025

The official stamp of the Bupati Fakfak is a circular emblem. It features a central Garuda (mythological bird) with spread wings, perched on a shield. The shield contains a smaller Garuda. The word "BUPATI" is written in a semi-circle above the Garuda, and "FAKFAK" is written in a semi-circle below it. Two small stars are positioned on either side of the central Garuda. A blue ink signature is written over the right side of the stamp.

BUPATI FAKFAK,

SAMAUN DAHLAN, S.Sos., M.AP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Geografis Daerah	1
c. Informasi Umum Data Kependudukan	3
d. Jumlah Distrik dan Kampung/Kelurahan	4
e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	6
f. Rincian Aparatus Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Yang Berada Disetiap Perangkat Daerah	9
g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	10
h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Yang memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja	12
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	16
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	16
b. Visi dan Misi	20
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	21
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan RKPD Tahun 2024	25
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	65
a. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	65
b. Dasar Penerapan standar Pelayanan Minimal	65
c. Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Dituangkan Dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	65
d. Gambaran Orientasi dan Komitmen Yang Ditetapkan Pemerintah Daerah Selama Satu Tahun Dalam Rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Dituangkan Dalam Kebijakan Umum Anggaran	72
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	75
2.1 Capaian Kinerja Makro	75
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	76
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	76
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	81
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	82
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	82
b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	83
c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya	83
d. Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	84
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	85
f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Tingkat Kinerja	86

BAB III PENCAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	88
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	88
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	88
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	88
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan	89
3.1.1 Target Kinerja	89
3.1.2 Realisasi	89
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Fakfak	91
3.2.1 Target Kinerja	91
3.2.2 Realisasi	91
3.3 Permasalahan dan Kendala	93
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	93
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN	
MINIMAL	94
4.1 Urusan Pendidikan	95
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	95
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	95
4.1.3 Realisasi	96
4.1.4 Alokasi Anggaran	96
4.1.5 Dukungan Personil	96
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	97
4.2 Urusan Kesehatan	97
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	97
4.2.2 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal	97
4.2.3 Realisasi	98
4.2.4 Alokasi Anggaran	99
4.2.5 Dukungan Personil	99
4.2.6 Permasalahan dan Solusi	99
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	100
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	100
4.3.2 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal	100
4.3.3 Realisasi	100
4.3.4 Alokasi Anggaran	101
4.3.5 Dukungan Personil	101
4.3.6 Permasalahan dan Solusi	101
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	101
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	101
4.4.2 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal	101
4.4.3 Realisasi	102
4.4.4 Alokasi Anggaran	103
4.4.5 Dukungan Personil	103
4.4.6 Permasalahan dan Solusi	103
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	103
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar	103
4.5.2 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal	104
4.5.3 Realisasi	104
4.5.4 Alokasi Anggaran	105
4.5.5 Dukungan Personil	105
4.5.6 Permasalahan dan Solusi	105
4.6 Urusan Sosial	106
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar	106
4.6.2 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal	106
4.6.3 Realisasi	106
4.6.4 Alokasi Anggaran	107
4.6.5 Dukungan Personil	107
4.6.6 Permasalahan dan Solusi Permasalahan	107
4.7 Pogram Dan Kegiatan	108
BAB V PENUTUP	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah kabupaten Fakfak Per Distrik	2
Tabel 1.2	Komposisi Penduduk Kabupaten Fakfak Per Distrik Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	3
Tabel 1.3	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Fakfak Per Distrik Tahun 2021-2024	4
Tabel 1.4	Nama Distrik, Kelurahan dan Kampung di Kabupaten Fakfak	4
Tabel 1.5	Data Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2024	6
Tabel 1.6	Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Yang Berada Disetiap Perangkat Daerah	9
Tabel 1.7	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Fakfak Tahun 2024	11
Tabel 1.8	Realisasi Belanja Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2024	12
Tabel 1.9	Program-Program Pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak Berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026	22
Tabel 1.10	Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2024	26
Tabel 1.11	Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Dituangkan Dalam RPJMD Kabupaten Fakfak 2021-2026	66
Tabel 1.12	Kebijakan Umum Anggaran Terkait Dengan Penerapan SPM Pada KUA PPAS Kabupaten Fakfak Tahun 2024	73
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro Tahun 2024	75
Tabel 2.2	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kunci Hasil (Outcome) Tahun 2024	76
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Daerah Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kunci Hasil (Outcome) Tahun 2024	81
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kabupaten Fakfak Tahun 2024	82
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ...	83
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Tahun 2023	83
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026	84
Tabel 2.8	Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja Kabupaten Fakfak Tahun 2024	86
Tabel 3.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Fakfak Tahun 2024	90
Tabel 3.2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan	92
Tabel 4.1	Target Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Fakfak	95
Tabel 4.2	Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024	96
Tabel 4.3	Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2024	96
Tabel 4.4	Dukungan Personil Urusan Pendidikan Tahun 2024	96
Tabel 4.5	Target Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024	97
Tabel 4.6	Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024	98
Tabel 4.7	Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2024	99
Tabel 4.8	Dukungan Personil Urusan Kesehatan Tahun 2024	99
Tabel 4.9	Target SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024	100
Tabel 4.10	Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024	100
Tabel 4.11	Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023	101
Tabel 4.12	Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024	101

Tabel 4.13	Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024	102
Tabel 4.14	Realiasi Capain SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024	102
Tabel 4.15	Target dan Capaian Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024	102
Tabel 4.16	Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024	103
Tabel 4.17	Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024	103
Tabel 4.18	Target Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024	104
Tabel 4.19	Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024	104
Tabel 4.20	Alokasi Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024	105
Tabel 4.21	Dukungan Personil Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024	105
Tabel 4.22	Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024	106
Tabel 4.23	Realiasasi Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024	107
Tabel 4.24	Alokasi Anggaran Urusan Sosial Tahun 2024	107
Tabel 4.25	Dukungan Personil Urusan Sosial Tahun 2024	107
Tabel 4.26	Program dan Kegiatan SPM Tahun 2024	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Fakfak	2
--	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik	4.1	Persentase Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Fakfak Tahun 2024	94
Grafik	4.2	Persentase Realisasi Anggaran Untuk setiap Bidang pada Kabupaten Fakfak Tahun 2024	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097) merupakan dasar bermula pembentukan Pemerintahan Daerah di Tanah Papua atau pada saat itu dikenal dengan Irian Barat. Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa Kabupaten Fakfak meliputi wilayah pemerintahan setempat Fakfak, Kaimana dan Mimika yang berkedudukan di Fakfak.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di wilayah Provinsi Irian Jaya, maka wilayah Kabupaten Dati II Fakfak dikurangi dengan wilayah Kabupaten Mimika, sehingga Kabupaten Fakfak mempunyai luas wilayah $\pm 32.820 \text{ Km}^2$. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor : 26 tahun 2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kabupaten Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama, maka wilayah Kabupaten Fakfak dikurangi dengan wilayah Kabupaten Kaimana sehingga Kabupaten Fakfak mempunyai luas wilayah $\pm 14.320 \text{ Km}^2$.

Selanjutnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi rujukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mensinergikan penyelenggaraan Pemerintahan mulai pada tingkat Pusat sampai ke Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu bentuk *Progress Report* pelaksanaan teknis pemerintah yang menjadi kewajiban Kepala Daerah serta perangkatnya dan dilaporkan secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat sesuai amanat perundang-undangan berdasarkan transparansi dan akuntabel.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

1. Pembentukan Kabupaten Fakfak berdasarkan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097), termasuk didalamnya Kabupaten Fakfak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di wilayah Provinsi Irian Jaya
3. Undang-Undang Nomor : 26 tahun 2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kabupaten Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Fakfak yang merupakan salah satu Kabupaten Tertua di Tanah Papua dan memiliki ragam aneka sosial dan budaya yang telah terintegrasi sejalan dengan perkembangan zaman menjadi suatu potensi serta daya tarik khusus dalam identitas Kabupaten Fakfak, adapun Peta Kabupaten Fakfak sebagai berikut :

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Fakfak



Sumber Data BP4D Kab. FAKFAK

1. Letak Geografis

Kabupaten Fakfak secara geografis dibatasi oleh garis bujur dan garis lintang, yaitu terletak pada 1310°30'-1380°40' BT dan 2°25'-4°000' LS dengan ketinggian antara 0-100 meter dari permukaan laut. Dengan kondisi bukit dan berlembah sehingga termasuk kategori medan sedang.

2. Batas Administrasi

Adapun batas-batas fisik daratan dan lautan wilayah Kabupaten Fakfak adalah, sebagai berikut :

1. Sebelah Barat : Laut Seram dan Teluk Berau
2. Sebelah Timur : Kabupaten Kaimana
3. Sebelah Utara : Kabupaten Teluk Bintuni
4. Sebelah Selatan : Laut Arafuru dan Kabupaten Kaimana

3. Luas Wilayah

Kabupaten Fakfak memiliki luas wilayah administrasi seluas 14.320 Km², berdasarkan Undang-Undang Nomor : 26 tahun 2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kabupaten Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Selanjutnya terkait dengan luas masing-masing wilayah di 17 (Tujuh Belas) distrik di Kabupaten Fakfak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Fakfak Per Distrik

NO	DISTRIK	IBUKOTA DISTRIK	LUAS WILAYAH (KM ²)
1	2	3	4
1.	Fakfak	Fakfak	233
2.	Fakfak Timur	Weri	1.020
3.	Fakfak Barat	Werba	679
4.	Kokas	Kokas	788
5.	Fakfak Tengah	Raduria	705
6.	Karas	Malakuli	2.491
7.	Kramongmongga	Kramongmongga	746
8.	Teluk Patipi	Patipi Pasir	786
9.	Bomberay	Onim Sari	1.023
10.	Pariwari	Dulanpokpok	587
11.	Wartutin	Wartutin	1.006
12.	Fakfak Timur Tengah	Krabelang	701
13.	Arguni	Fior	334
14.	Mbamdandara	Goras	664
15.	Kayauni	Kayuni	938
16.	Furwagi	Rumbati	732
17.	Tomage	Tomage	887
	JUMLAH		14.320

Sumber Data Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Fakfak Tahun 2024

Dari tabel di atas Distrik Karas memiliki wilayah terluas sedangkan Distrik Fakfak sebagai ibu kota Kabupaten Fakfak memiliki wilayah terkecil hal ini disebabkan oleh pembagian wilayah (pemekaran distrik) menjadi 2 (dua) bagian dengan Distrik Pariwari.

4. Topografis

Topografis atau kondisi permukaan tanah di Kabupaten Fakfak sangat bervariasi, terdapat dataran rendah, dataran tinggi sampai dengan daerah perbukitan, yang memiliki tingkat kesulitan medan sedang dengan rincian sebagai berikut :

a) Dilihat dari aspek ketinggian, maka luas wilayah Kabupaten Fakfak dapat dirinci sebagai berikut :

a. 0-100 m	seluas	:	1.192.132 Ha
b. >100-500 m	seluas	:	328.109 Ha
c. >500-100 m	seluas	:	284.301 Ha
d. ≥ 1000 m	seluas	:	250.058 Ha
Jumlah	seluas	:	2.054.600 Ha

b) Dilihat dari aspek lereng/kemiringan, dapat dirinci sebagai berikut :

a. 0-15°	seluas	:	1.434.636 Ha
b. >15-40°	seluas	:	57.500 Ha
c. >40°	seluas	:	2.297.964 Ha
Jumlah	seluas	:	3.790.100

c. Informasi Umum Data Kependudukan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak pada **Tahun 2024** penduduk yang berada di Kabupaten Fakfak bertambah dari tahun sebelumnya, yang jumlah total sebanyak **91.868** jiwa meningkat menjadi **92.850** jiwa yang terinci dari penduduk berjenis kelamin laki- laki sebanyak **47.497** jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak **45.353** jiwa. Adapun komposisi penduduk pada 17 (tujuh belas) Distrik di Kabupaten Fakfak Tahun 2024 menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Komposisi Penduduk Kabupaten Fakfak Per Distrik
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

NO	NAMA DISTRIK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Fakfak	9.018	8.711	17.729
2	Fakfak Barat	1.893	1.818	3.711
3	Fakfak Timur	741	701	1.442
4	Kokas	2.348	2.212	4.560
5	Fakfak Tengah	7.291	6.999	14.290
6	Karas	1.668	1.578	3.246
7	Bomberay	1.264	1.071	2.335
8	Kramongmongga	1.154	1.124	2.278
9	Teluk Patipi	2.293	2.192	4.485
10	Pariwari	12.610	12.009	24.619
11	Wartutin	1.214	1.191	2.405
12	Fakfak Timur Tengah	1.526	1.469	2.995
13	Arguni	669	583	1.252
14	Mbahamdandara	568	594	1.162
15	Kayauni	1.012	992	2.004
16	Furwagi	904	863	1.767
17	Tomage	1.324	1.246	2.570
	Total	47.497	45.353	92.850

Sumber Data Disdukcapil Kab. Fakfak Tahun 2024

Sedangkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Fakfak Tahun 2021- 2024 per Distrik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Fakfak per Distrik Tahun 2021-2024

NO	DISTRIK	PERTUMBUHAN PENDUDUK (TAHUN)			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	2023	5
1	Fakfak	16.917	17.221	17.480	17.729
2	Fakfak Barat	3.539	3.621	3.699	3.711
3	Fakfak Timur	1.375	1.404	1.432	1.442
4	Kokas	4.356	4.438	4.523	4.560
5	Fakfak Tengah	13.574	13.866	14.090	14.290
6	Karas	3.064	3.129	3.177	3.246
7	Bomberay	2.266	2.319	2.359	2.335
8	Kramongmongga	2.203	2.242	2.276	2.278
9	Teluk Patipi	4.278	4.354	4.442	4.485
10	Pariwari	23.426	23.879	24.311	24.619
11	Wartutin	2.304	2.361	2.414	2.405
12	Fakfak Timur Tengah	2.856	2.911	2.983	2.995
13	Arguni	1.181	1.202	1.222	1.252
14	Mbahamdandara	1.109	1.133	1.153	1.162
15	Kayauni	1.887	1.924	1.973	2.004
16	Furwagi	1.697	1.737	1.767	1.767
17	Tomage	2.441	2.507	2.567	2.570
	Total	88.473	90.248	91.868	92.850

Sumber Data Dukcapil Kabupaten Fakfak 2024

d. Jumlah Distrik dan Kampung/Kelurahan

Kabupaten Fakfak memiliki luas wilayah administrasi seluas 14.320 Km², terdiri dari 17 Distrik, 142 kampung dan 7 Kelurahan, dimana dari 17 Distrik tersebut terdapat 8 distrik pemekaran baru berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2012, dan dari 142 kampung terdapat 25 kampung baru yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012, distrik- distrik dan kampung pemekaran tersebut telah disahkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Berikut ini nama-nama 17 distrik, 7 kelurahan dan 142 kampung di Kabupaten Fakfak. dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4

Nama Distrik, Kelurahan dan Kampung di Kabupaten Fakfak

NO	DISTRIK	KELURAHAN	KAMPUNG
1	2	3	4
1	Fakfak	Fakfak Selatan Fakfak Utara	1. Gewerpe 2. Lusiperi 3. Wrikapal
2	Fakfak Barat		1. Werba 2. Kiat 3. Purwasak 4. Wurunkendik 5. Kwuhkendak 6. Purwahab Tonggo 7. Pahger Nkindik 8. Werba Utara 9. Porum
3	Fakfak Timur		1. Tunas Gain 2. Urat 3. Sanggram 4. Weri 5. Kiriabisa 6. Saharei
4	Kokas	Kokas Kota	1. Mandoni 2. Sekar 3. Ugar 4. Sisir 5. Kampung Baru 6. Patimburuk 7. Batufiafas 8. Kinam 9. Mambunibuni 10. Kriawaswas 11. Sosar 12. Pang Wadar 13. Masina 14. Kimina Kra
5	Fakfak Tengah	Danaweria	1. Kayu Merah 2. Ketemba 8. Kanantare 9. Pasir Putih



NO	DISTRIK	KELURAHAN	KAMPUNG	
1	2	3	4	
			3. Nemewikarya	10. Pirma
			4. Raduria	11. Sakartemin
			5. Brongkendik	12. Hambriangkendik
			6. Air Besar	13. Unipokpok
			7. Mandopma	
6.	Karas		1. Malakuli	5. Tarak
			2. Faur	6. Tuberwasak
			3. Kiaba	7. Mas
			4. Antalisa	
7.	Bomberay		1. Onim Sari	5. Tesha
			2. Mekar Sari	6. Onim Jaya
			3. Pinang Agung	7. Wonorejo
			4. Bumi Muroh Indah	
8.	Kramongmongga		1. Kramongmongga	6. Kwamkwamur
			2. Wargeb	7. Bahbadan
			3. Mamur	8. Gewab
			4. Nembukteb	9. Tentreda
			5. Pikpik	10. Mbaham Ma Youn
9.	Teluk Patipi		1. Puar	8. Patipi Pulau
			2. Degen	9. Mawar
			3. Tetar	10. Tibatibananam
			4. Sum	11. Offie
			5. Adora	12. Muhri
			6. Us	13. Bisa
			7. Patipi Pasir	
10.	Pariwari	Wagom Wagom Utara Dulanpokpok	1. Tanama	4. Torea
			2. Kapaurtutin	5. Sekru
			3. Sekban	6. Sukuru Tuare
11.	Wartutin		1. Werpigan	4. Siboru
			2. Werabuan	5. Sipatnanam
			3. Wartutin	6. Kamandu Tetar
12.	Fakfak Timur Tengah		1. Waserat	6. Wayati Timur
			2. Wambar	7. Wayati
			3. Kotam	8. Wayati Barat
			4. Kwama	9. Krabelang
			5. Kalamanuk	10. Wambar Timur
13.	Arguni		1. Andamata	4. Fior
			2. Taver	5. Furir
			3. Arguni	
14.	Mbahamdandara		1. Darembang	5. Wos
			2. Goras	6. Mbahamdandara
			3. Mitimber	7. Goras Selatan
			4. Waremu	
15.	Kayauni		1. Kaburbur	6. Kuagas
			2. Ubadari	7. Rangkendak
			3. Homorkokma	8. Mananmur
			4. Pattukar	9. Warpa
			5. Kayauni	
16.	Furwagi		1. Salakiti	5. Wefra
			2. Tawar	6. Tanehamur
			3. Gar	7. Sengkiti
			4. Rumbati	8. Twootkindik
17.	Tomage		1. Mbima jaya	6. Wamosan
			2. Warisa Mulya	7. Salawir
			3. Wonodadi Mulya	8. Wasa Mulya
			4. Tomage	9. Wammar
			5. Otoweri	10. UPT I Tomage

Sumber Data Bagian Pemerintahan Setda Kab. Fakfak Tahun 2024

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Fakfak menyatakan perangkat daerah di Kabupaten Fakfak berjumlah 46 organisasi perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 20 (dua puluh) Dinas, 6 (enam) Badan, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja, dan 17 (tujuh belas) Distrik. Sedangkan Unit Kerja Perangkat Daerah sebanyak 116 (Seratus enam belas) UPTD. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.5
**Data Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak
Tahun 2024**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	TIPE	DASAR HUKUM PEMBENTUKANNYA
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH	A	PERDA KABUPATEN FAKFAK NOMOR 5 TAHUN 2020
2	SEKRETARIAT DPRD	C	
3	INSPEKTORAT	A	
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	C	
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	B	
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	C	PERDA KABUPATEN FAKFAK NOMOR 5 TAHUN 2020
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	C	
8	DINAS PERKEBUNAN	B	
9	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	B	
10	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIRRTAN	A	
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	B	
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	B	
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	C	
14	DINAS PERHUBUNGAN	B	
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	B	
16	DINAS SOSIAL	A	
17	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	A	PERBUP FAKFAK NOMOR 62 TAHUN 2016
	a UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD)		
	1) SD Negeri 01 Fakfak		
	2) SD Inpres 1 Fakfak		
	3) SD Inpres 2 Fakfak		
	4) SD Inpres 6/75 Tambaruni		
	5) SD Inpres Kayu Merah		
	6) SD Inpres Nemewikarya		
	7) MI Negeri Fakfak		
	8) SD Inpres 1 Wagon		
	9) SD Inpres 2 Wagon		
	10) SD Inpres 3 Wagon		
	11) SD Inpres Dulanpokpok		
	12) SD Negeri Sekru		
	13) SD Inpres Tanama		
	14) SD Negeri Kiat		
	15) SD Negeri Wurkendik		
	16) SD Inpres Perwasak		
	17) SD Inpres Werpigan		
	18) SD Negeri Wartutin		
	19) SD Negeri Kalamanuk		
	20) SD Inpres Wambar		



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	TIPE	DASAR HUKUM PEMBENTUKANNYA
1	2	3	4
	21) SD Negeri Kotam		PERBUP FAKFAK NOMOR 62 TAHUN 2016
	22) SD Inpres Kwama		
	23) SD Negeri Warhiryang		
	24) SD Inpres Sanggram		
	25) SD Inpres Tunasgain		
	26) SD Inpres Weri		
	27) SD Negeri Saharey		
	28) SD Inpres Urat		
	29) SD Inpres Kiaba		
	30) SD Inpres Faulkia		
	31) SD Negeri Karas		
	32) SD Negeri Antalisa		
	33) SD Inpres Maas		
	34) SD Negeri Tarak		
	35) SD Inpres Kokas		
	36) SD Inpres Kampung Baru		
	37) SD Negeri Mansina		
	38) SD Negeri Celebes		
	39) SD Inpres Ugar		
	40) SD Inpres Mandoni		
	41) SD Inpres Batifafas		
	42) SD Inpres Patimburak		
	43) SD Inpres Kinam		
	44) SD Negeri Kriawaswas		
	45) SD Negeri Arguni		
	46) SD Negeri Fior		
	47) SD Negeri Forir		
	48) SD Inpres Andamata		
	49) SD Inpres Nembukteb		
	50) SD Inpres Krawargeb		
	51) SD Inpres Kaburbur		
	52) SD Negeri Kawatukar		
	53) SD Negeri Ubadari		
	54) SD Negeri Mananmur		
	55) SD Negeri Patipi		
	56) SD Inpres Patipi Pasir		
	57) SD Inpres Puar		
	58) SD Inpres Degen		
	59) SD Negeri tetar		
	60) SD Inpres Offie		
	61) SD Negeri Tibatibananam		
	62) SD Inpres Salakiti		
	63) SD Negeri Tawar		
	64) SD Negeri Rumbati		
	65) SD Negeri Tanisapata		
	66) SD Inpres Goras		
	67) SD Inpres Darembang		
	68) SD Negeri Mitimber		
	69) SD Negeri Waremu		
	70) SD Inpres 3 Bomberay		
	71) SD Inpres 4 Bomberay		
	72) SD Inpres 5 Bomberay		
	73) SD Inpres 6 Bomberay		
	74) SD Negeri Tesa		
	75) SD Inpres 1 Bomberay		
	76) SD Inpres 2 Bomberay		
	77) SD Inpres 7 Bomberay		
	78) SD Inpres Otoweri		
	79) SD Negeri UPT SP.1. Tomage		
	b Satuan pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP)		
	1) SMP Negeri 1 Fakfak Kelurahan Fakfak Utara		
	2) SMP Negeri 2 Fakfak Kelurahan Danaweria		



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	TIPE	DASAR HUKUM PEMBENTUKANNYA
1	2	3	4
	3) SMP Negeri 3 Fakfak Kampung Perwasak 4) SMP Negeri 4 Kampung Pasir Putih 5) SMP Negeri 1 Kokas Kelurahan Kokas 6) SMP Negeri 2 Kokas Kampung Degen 7) SMP Negeri 3 Kokas Mbima Jaya 8) SMP Negeri 4 Kokas Kramongmongga 9) SMP Negeri Bumberay 10) SMP Negeri Fakfak Timur 11) SMP Negeri Satap Kiat 12) SMP Negeri 5 Satap Wagom c. Badan Pengawas Sekolah 1) Pengawas Sekolah Dasar (SD) 2) Pengawas Sekolah Menengah Pertama		PERBUP FAKFAK NOMOR 62 TAHUN 2016
18	DINAS KESEHATAN	A	PERDA KAB. FAKFAK NO. 5 TAHUN 2020
	a RSUD Fakfak b Puskesmas Fakfak c Puskesmas Fakfak Tengah d Puskesmas Sekban e Puskesmas Werba f Puskesmas Weri g Puskesmas Karas h Puskesmas Kramongmongga i Puskesmas Degen j Puskesmas Bomberay k Puskesmas Tomage	C	PERBUP FAKFAK NOMOR 62 TAHUN 2016
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	B	PERDA KAB. FAKFAK NO. 5 TAHUN 2020
	a UPT Metrologi Legal b UPT Pengelolaan Pasar Thumburuni c UPT Pengelolaan Pasar Dulanpokpok d UPT Pengelolaan Pasar Danaweria e UPT Pengelolaan Pasar Kokas	B A A B B	PERBUP FAKFAK NOMOR 62 TAHUN 2016
20	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	B	PERDA KAB. FAKFAK NO. 5 TAHUN 2020
	a UPT Budidaya Air Tawar b UPT Pelabuhan Pendaratan Ikan c Kawasan Konservasi Perairan (KPP)	B B B	PERBP FAKFAK NOMOR 62 TAHUN 2016
21	DINAS PERTANIAN DAN KETANAN PANGAN	A	PERDA KAB. FAKFAK NO. 5 TAHUN 2020
	a UPT Pusat Kesehatan Hewan b Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	B	PERBUP FAKFAK NO. 62 TAHUN 2016
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	A	PERDA KAB. FAKFAK NO. 5 TAHUN 2020
	a UPT Laboratorium Lingkungan	A	PERBUP FAKFAK NO. 62 TAHUN 2016
23	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	B	PERDA KAB. FAKFAK NO. 5 TAHUN 2020
	a UPT Balai Latihan Kerja (BLK)	B	PERBUP FAKFAK NO. 62 TAHUN 2016
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	A	PERDA KABUPATEN FAKFAK NOMOR 5 TAHUN 2020
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	B	
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	A	
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	B	
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	A	
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		PERDA KAB. FAKFAK NO. 4 TAHUN 2016
30	DISTRIK ARGUNI	A	PERDA KABUPATEN FAKFAK NOMOR 5 TAHUN 2020
31	DISTRIK BOMBERAY	A	
32	DISTRIK FAKFAK	A	



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	TIPE	DASAR HUKUM PEMBENTUKANNYA
1	2	3	4
33	DISTRIK FAKFAK BARAT	A	
34	DISTRIK FAKFAK TENGAH	A	
35	DISTRIK FAKFAK TIMUR	A	
36	DISTRIK FAKFAK TIMUR TENGAH	A	
37	DISTRIK FURWAGI	A	
38	DISTRIK KAYAUNI	A	
39	DISTRIK KARAS	A	
40	DISTRIK KOKAS	A	
41	DISTRIK KRAMONGMONGGA	A	
42	DISTRIK MBAHAMDANDARA	A	
43	DISTRIK PARIWARI	A	
44	DISTRIK TELUK PATIPI	A	
45	DISTRIK TOMAGE	A	
46	DISTRIK WARTUTIN	A	

Sumber Data Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Fakfak Tahun 2024

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada disetiap Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari roda Pemerintahan, ASN memiliki peran penting dalam memastikan jalannya pelayanan yang efektif, transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Peran ASN dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai tulang punggung dalam menciptakan pemerintahan yang professional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai aspek. Oleh karena itu dengan adanya ASN yang berkompeten dan professional, pemerintahan dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Berdasarkan data BKPSDM Kabupaten Fakfak tahun 2024, ASN dilingkungan pemerintah kabupaten Fakfak berjumlah 4.682 orang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 3.978 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 704 orang yang ditempatkan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu, Pada tahun 2024 Kabupaten Fakfak juga memiliki tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak sebanyak 3.245 orang. Dari jumlah tersebut yang telah mengikuti CPNS dan PPPK sebanyak 1.889 dan yang lulus CPNS sebanyak 50 orang sementara yang lulus PPPK sebanyak 320 orang Sedangkan jumlah tenaga honorer yang tidak lulus sebanyak 1.519

Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.6
**Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan,
Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan
Yang Berada Disetiap Perangkat Daerah**

NO	PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN / FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	TOTAL
1	2		3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	21	1675	221	1917
2	Dinas Kesehatan		143	778	28	949
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		79		27	106
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		18		14	32
5	Satuan Polisi Pamong Praja		27		12	39
6	Dinas Sosial		19		21	40
7	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		8		9	17
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		30		15	45
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		24		20	44
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		16		14	30
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung		27		15	42
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		20		12	32



NO	PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN / FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	TOTAL
1	2		3	4	5	6
13	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian		13		15	28
14	Dinas Perhubungan		47		15	62
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		15		18	33
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		18		12	30
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		7	0	12	19
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		6		6	12
19	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		4		16	20
20	Dinas Perkebunan	Urusan Pilihan	21		15	36
21	Dinas Perikanan dan Kelautan		26		16	42
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		15		21	36
23	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		7		7	14
24	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		15	42	61	118
25	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		10	0	13	23
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan	24		24	48
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		37		20	57
28	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		2			2
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		33	3	20	56
30	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Fakfak		26		15	41
31	Sekretariat Daerah	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	118	2	45	165
32	Sekretariat DPRD		28		10	38
33	Inspektorat	Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan	18	18	6	42
34	Distrik Arguni	Unsur Kewilayahan	8		4	12
35	Distrik Bomberay		8		12	20
36	Distrik Fakfak Barat		8		28	36
37	Distrik Fakfak		8		32	40
38	Distrik Fakfak Tengah		8		42	50
39	Distrik Fakfak Timur		8		12	20
40	Distrik Fakfak Timur Tengah		7		13	20
41	Distrik Furwagi		6		10	16
42	Distrik Karas		8		21	29
43	Distrik Kayauni		8		10	18
44	Distrik Kokas		8		20	28
45	Distrik Kramongmongga		7		17	24
46	Distrik Mbahamdandara		7		6	13
47	Distrik Pariwari		8		39	47
48	Distrik Teluk Patipi		8		23	31
49	Distrik Tomage		7		9	16
50	Distrik Wartutin		8		9	17
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Pemerintahan Umum	15		15	30
TOTAL			1.067	2.518	1.097	4.682

Sumber Data BKPSDM Kabupaten Fakfak Tahun 2024

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2024 setelah perubahan, target Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.558.381.740.870,- (satu triliun lima ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.482.832.965.218,53- (satu triliun empat ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan belas koma lima puluh tiga rupiah) atau terealisasi sebesar 95 % selisih kurang sebesar 75.548.775.651,47,- (tujuh puluh lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh satu koma empat puluh tujuh rupiah). Sedangkan target Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.1.597.995.247.846,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.444.381.036.556,08,- (satu triliun empat ratus empat puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam koma nol delapan rupiah) atau terealisasi sebesar 90 % selisih kurang sebesar Rp.153.614.211.289,92 (seratus lima puluh tiga milyar enam ratus empat belas juta dua ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh Sembilan koma Sembilan puluh dua rupiah).



Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2024 setelah perubahan dapat dilihat pada Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Fakfak pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.7
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
Kabupaten Fakfak Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH / KURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.558.381.740.870,00	1.497.979.667.648,53	96,12	(60.402.073.221,47)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31.997.172.335,00	21.647.659.077,53	67,65	(10.349.513.257,47)
4.1.01	Pajak Daerah	9.346.366.073,00	8.382.090.750,00	89,68	(964.275.323,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	3.531.390.987,00	3.467.445.956,00	98,19	(63.945.031,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.299.000.024,00	4.983.034.575,00	79,11	(1.315.965.449,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.820.415.251,00	4.815.087.796,53	37,56	(8.055.327.454,47)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.458.340.443.342,00	1.415.627.144.296,00	97,07	(42.713.299.046,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.449.090.074.110,00	1.396.347.102.829,00	96,36	(52.742.971.281,00)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.120.021.329.156,00	1.063.832.958.345,00	94,98	(56.188.370.811,00)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00		0,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	210.440.439.954,00	210.393.369.484,00	99,98	(47.070.470,00)
4.2.01.05	Dana Desa	118.628.305.000,00	122.120.775.000,00	102,94	3.492.470.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	9.250.369.232,00	19.280.041.467,00	208,42	10.029.672.235,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	9.250.369.232,00	19.280.041.467,00	208,42	10.029.672.235,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	68.044.125.193,00	60.704.864.275,00	89,21	(7.339.260.918,00)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	68.044.125.193,00	60.704.864.275,00	89,21	(7.339.260.918,00)
5	BELANJA DAERAH	1.597.995.247.846,00	1.465.839.416.065,08	91,73	(132.155.831.780,92)
5.1	BELANJA OPERASI	1.062.579.810.580,07	959.063.745.900,00	90,26	(103.516.064.680,07)
5.1.01	Belanja Pegawai	482.121.773.992,32	454.131.925.493,00	94,19	(27.989.848.499,32)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.108.731.465,75	430.928.277.560,00	87,93	(59.180.453.905,75)
5.1.05	Belanja Hibah	80.099.961.122,00	64.448.198.847,00	80,46	(15.651.762.275,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.249.344.000,00	9.555.344.000,00	93,23	(694.000.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	320.000.577.189,93	288.591.835.508,08	90,18	(31.408.741.681,85)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.324.192.000,00	1.975.092.600,00	84,98	(349.099.400,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.084.368.968,00	62.837.142.988,00	90,96	(6.247.225.980,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.002.484.044,39	97.743.178.820,08	88,05	(13.259.305.724,31)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	134.758.703.576,54	123.318.492.161,00	91,51	(11.440.211.415,54)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	191.250.000,00	191.150.000,00	99,95	(100.000,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.639.578.601,00	2.526.779.439,00	95,73	(112.799.162,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.510.101.045,00	12.465.499.000,00	99,64	(44.602.045,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.510.101.045,00	12.465.499.000,00	99,64	(44.602.045,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	202.904.759.031,00	205.718.335.657,00	101,39	2.813.576.626,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	202.904.759.031,00	205.718.335.657,00	101,39	2.813.576.626,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	41.938.506.976,00	41.938.506.975,73	100,00	(0,27)
6.1.01	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	41.938.506.976,00	41.938.506.975,73	100,00	(0,27)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.325.000.000,00	2.325.000.000,00	100,00	0,00
6.2.02	PENYERTAAN MODAL DAERAH	2.325.000.000,00	2.325.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	39.613.506.976,00	39.613.506.975,73	100,00	(0,27)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	71.753.758.559,18	0	71.753.758.559,18

Sumber Data BPKAD Kabupaten Fakfak Tahun 2025



h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan Dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Fakfak Tahun 2024 yang terdiri dari Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.8
Realisasi Belanja Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	1.597.995.247.846,00	1.465.839.416.065,08	(132.155.831.780,92)	91,73
5.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	871.305.487.585,52	777.353.237.325,08	(93.952.250.260,44)	89,22
5.1.01	PENDIDIKAN	366.247.446.616,00	311.648.204.576,00	(54.599.242.040,00)	85,09
5.1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	212.088.097.788,00	199.741.130.507,00	(12.346.967.281,00)	94,18
5.1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	146.455.549.377,00	105.136.284.024,00	(41.319.265.353,00)	71,79
5.1.01.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.289.533.912,00	1.750.860.752,00	(538.673.160,00)	76,47
5.1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	678.102.515,00	677.950.493,00	(152.022,00)	99,98
5.1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.685.489.712,00	3.596.306.600,00	(89.183.112,00)	97,58
5.1.01.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	835.344.000,00	530.344.000,00	(305.000.000,00)	63,49
5.1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	215.329.312,00	215.328.200,00	(1.112,00)	100
5.1.02	KESEHATAN	304.200.007.182,35	277.471.846.462,00	(26.728.160.720,35)	91,21
5.1.02.00	Non Program	0,00	7.559.231.900,00	7.559.231.900,00	0
5.1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	102.040.287.764,00	92.949.604.465,00	(9.090.683.299,00)	91,09
5.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	199.019.582.047,35	174.241.777.690,00	(24.777.804.357,35)	87,55
5.1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.846.428.131,00	2.577.152.407,00	(269.275.724,00)	90,54
5.1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	49.360.000,00	49.360.000,00	0,00	100
5.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	244.349.240,00	94.720.000,00	(149.629.240,00)	38,76
5.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	173.379.494.733,17	161.886.419.402,08	(11.493.075.331,09)	93,37
5.1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.016.778.279,25	33.671.127.795,00	(345.650.484,25)	98,98
5.1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.998.483.938,00	2.986.959.800,00	(11.524.138,00)	99,62
5.1.03.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.942.131.496,00	4.934.459.000,00	(7.672.496,00)	99,84
5.1.03.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.428.435.666,57	2.422.908.000,00	(5.527.666,57)	99,77
5.1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.319.927.925,00	1.319.240.000,00	(687.925,00)	99,95
5.1.03.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.824.781.423,19	4.816.701.500,00	(8.079.923,19)	99,83
5.1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.749.714.675,00	2.743.885.600,00	(5.829.075,00)	99,79
5.1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	6.147.181.130,88	5.989.501.690,00	(157.679.440,88)	97,43
5.1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5.275.096.431,77	5.270.465.467,08	(4.630.964,69)	99,91
5.1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	107.768.975.247,51	96.823.212.030,00	(10.945.763.217,51)	89,84
5.1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	907.988.520,00	907.958.520,00	(30.000,00)	100,00
5.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9.243.581.048,00	8.853.899.719,00	(389.681.329,00)	95,78



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.297.088.595,00	7.958.423.941,00	(338.664.654,00)	95,92
5.1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	946.492.453,00	895.475.778,00	(51.016.675,00)	94,61
5.1.06	SOSIAL	18.234.958.006,00	17.492.867.166,00	(742.090.840,00)	95,93
5.1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.717.936.602,00	10.483.453.781,00	(234.482.821,00)	97,81
5.1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.944.046.032,00	2.912.705.214,00	(31.340.818,00)	98,94
5.1.06.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.128.069.834,00	2.009.297.634,00	(118.772.200,00)	94,42
5.1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.496.580.504,00	1.140.436.174,00	(356.144.330,00)	76,20
5.1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	756.343.690,00	755.506.627,00	(837.063,00)	99,89
5.1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	191.981.344,00	191.467.736,00	(513.608,00)	99,73
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	87.275.142.287,16	78.569.506.005,00	(8.705.636.282,16)	90,03
5.2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.593.637.657,00	15.421.540.086,00	(172.097.571,00)	98,90
5.2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.502.322.925,00	5.391.506.679,00	(110.816.246,00)	97,99
5.2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	356.512.627,00	354.762.627,00	(1.750.000,00)	99,51
5.2.08.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	246.600.000,00	240.429.925,00	(6.170.075,00)	97,50
5.2.08.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.362.343.102,00	5.357.622.207,00	(4.720.895,00)	99,91
5.2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	560.698.213,00	556.513.678,00	(4.184.535,00)	99,25
5.2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	575.564.159,00	573.484.159,00	(2.080.000,00)	99,64
5.2.08.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.689.597.260,00	2.655.178.085,00	(34.419.175,00)	98,72
5.2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	49.999.942,00	42.843.297,00	(7.156.645,00)	85,69
5.2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	249.999.429,00	249.199.429,00	(800.000,00)	99,68
5.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	7.863.482.728,00	7.619.944.698,00	(243.538.030,00)	96,90
5.2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.727.218.336,00	5.507.304.804,00	(219.913.532,00)	96,16
5.2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	645.168.680,00	638.883.180,00	(6.285.500,00)	99,03
5.2.11.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	240.348.150,00	234.618.150,00	(5.730.000,00)	97,62
5.2.11.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	911.139.815,00	910.471.101,00	(668.714,00)	99,93
5.2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	190.114.890,00	181.974.606,00	(8.140.284,00)	95,72
5.2.11.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	49.968.000,00	49.968.000,00	0,00	100,00
5.2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	99.524.857,00	96.724.857,00	(2.800.000,00)	97,19
5.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.278.991.996,00	6.038.902.764,00	(240.089.232,00)	96,18
5.2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.654.587.575,00	4.454.466.359,00	(200.121.216,00)	95,70
5.2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	780.454.544,00	770.962.254,00	(9.492.290,00)	98,78
5.2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	441.671.912,00	431.897.901,00	(9.774.011,00)	97,79
5.2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	402.277.965,00	381.576.250,00	(20.701.715,00)	94,85
5.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.547.416.639,00	9.328.626.145,00	(6.218.790.494,00)	60,00
5.2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.221.749.508,00	5.978.461.918,00	(243.287.590,00)	96,09
5.2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	753.173.744,00	453.177.468,00	(299.996.276,00)	60,17
5.2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	999.903.034,00	969.544.506,00	(30.358.528,00)	96,96
5.2.13.08	PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PERKAMPUNGAN	7.572.590.353,00	1.927.442.253,00	(5.645.148.100,00)	25,45



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.2.15	PERHUBUNGAN	14.064.933.363,00	13.788.380.656,00	(276.552.707,00)	98,03
5.2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.388.323.363,00	7.269.007.599,00	(119.315.764,00)	98,39
5.2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.525.580.000,00	4.401.204.867,00	(124.375.133,00)	97,25
5.2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.151.030.000,00	2.118.168.190,00	(32.861.810,00)	98,47
5.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	9.805.836.675,00	9.631.318.407,00	(174.518.268,00)	98,22
5.2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.954.381.410,00	3.819.114.680,00	(135.266.730,00)	96,58
5.2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.000.000.000,00	1.993.746.500,00	(6.253.500,00)	99,69
5.2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.851.455.265,00	3.818.457.227,00	(32.998.038,00)	99,14
5.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.636.115.624,16	6.115.931.458,00	(520.184.166,16)	92,16
5.2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.473.458.645,16	4.132.855.059,00	(340.603.586,16)	92,39
5.2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	100.906.432,00	100.906.432,00	0,00	100,00
5.2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	193.842.546,00	193.842.546,00	0,00	100,00
5.2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	299.544.724,00	150.073.724,00	(149.471.000,00)	50,10
5.2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	305.301.969,00	305.301.969,00	0,00	100,00
5.2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.263.061.308,00	1.232.951.728,00	(30.109.580,00)	97,62
5.2.18	PENANAMAN MODAL	5.819.229.537,00	5.181.739.575,00	(637.489.962,00)	89,05
5.2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.301.309.418,00	4.861.634.978,00	(439.674.440,00)	91,71
5.2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	13.520.000,00	13.520.000,00	0,00	100,00
5.2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	100,00
5.2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	445.600.119,00	247.784.597,00	(197.815.522,00)	55,61
5.2.24	KEARSIPAN	5.665.498.068,00	5.443.122.216,00	(222.375.852,00)	96,07
5.2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.242.509.983,00	4.031.455.187,00	(211.054.796,00)	95,03
5.2.24.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.422.988.085,00	1.411.667.029,00	(11.321.056,00)	99,20
5.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	79.935.717.022,00	76.277.062.344,00	(3.658.654.678,00)	95,42
5.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	17.988.381.935,00	17.501.516.576,00	(486.865.359,00)	97,29
5.3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.143.509.221,00	6.681.819.843,00	(461.689.378,00)	93,54
5.3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	9.803.642.573,00	9.780.460.600,00	(23.181.973,00)	99,76
5.3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	691.342.009,00	691.325.695,00	(16.314,00)	100,00
5.3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	349.888.132,00	347.910.438,00	(1.977.694,00)	99,43
5.3.26	PARIWISATA	12.798.888.933,00	12.025.675.001,00	(773.213.932,00)	93,96
5.3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.154.756.689,00	5.058.286.642,00	(96.470.047,00)	98,13
5.3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.916.606.148,00	3.251.567.253,00	(665.038.895,00)	83,02
5.3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.375.803.433,00	1.368.963.733,00	(6.839.700,00)	99,50
5.3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	779.577.915,00	777.781.075,00	(1.796.840,00)	99,77
5.3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.572.144.748,00	1.569.076.298,00	(3.068.450,00)	99,80
5.3.27	PERTANIAN	33.575.848.412,00	31.958.149.549,00	(1.617.698.863,00)	95,18
5.3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.545.218.570,00	21.752.798.147,00	(792.420.423,00)	96,49
5.3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.526.209.249,00	2.357.542.289,00	(168.666.960,00)	93,32
5.3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.059.362.445,00	1.908.253.353,00	(151.109.092,00)	92,66



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.3.27.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	5.090.132.984,00	4.691.470.581,00	(398.662.403,00)	92,17
5.3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	499.999.236,00	486.044.364,00	(13.954.872,00)	97,21
5.3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	137.816.774,00	137.780.326,00	(36.448,00)	99,97
5.3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	717.109.154,00	624.260.489,00	(92.848.665,00)	87,05
5.3.30	PERDAGANGAN	10.029.512.010,00	9.689.894.806,00	(339.617.204,00)	96,61
5.3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.814.755.590,00	5.676.465.760,00	(138.289.830,00)	97,62
5.3.30.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.382.553.293,00	1.303.569.016,00	(78.984.277,00)	94,29
5.3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.832.203.127,00	2.709.860.030,00	(122.343.097,00)	95,68
5.3.32	TRANSMIGRASI	5.543.085.732,00	5.101.826.412,00	(441.259.320,00)	92,04
5.3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.174.951.007,00	4.025.198.117,00	(149.752.890,00)	96,41
5.3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	51.400.000,00	51.400.000,00	0,00	100,00
5.3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	56.880.000,00	56.880.000,00	0,00	100,00
5.3.32.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	803.180.753,00	512.027.000,00	(291.153.753,00)	63,75
5.3.32.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	194.585.581,00	194.232.904,00	(352.677,00)	99,82
5.3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	124.550.000,00	124.550.000,00	0,00	100,00
5.3.32.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	137.538.391,00	137.538.391,00	0,00	100,00
5.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	137.492.946.014,32	118.431.697.870,00	(19.061.248.144,32)	86,14
5.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	81.763.313.475,00	74.251.258.945,00	(7.512.054.530,00)	90,81
5.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.985.295.338,00	42.971.205.110,00	(5.014.090.228,00)	89,55
5.4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	30.561.488.380,00	28.251.525.951,00	(2.309.962.429,00)	92,44
5.4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.216.529.757,00	3.028.527.884,00	(188.001.873,00)	94,16
5.4.02	SEKRETARIAT DPRD	55.729.632.539,32	44.180.438.925,00	(11.549.193.614,32)	79,28
5.4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.482.605.364,32	32.095.025.122,00	(4.387.580.242,32)	87,97
5.4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19.247.027.175,00	12.085.413.803,00	(7.161.613.372,00)	62,79
5.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	284.399.694.921,00	282.642.569.875,00	(1.757.125.046,00)	99,38
5.5.01	PERENCANAAN	17.550.780.603,00	15.665.306.405,00	(1.885.474.198,00)	89,26
5.5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.412.750.662,00	9.786.758.194,00	(625.992.468,00)	93,99
5.5.01.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	667.923.420,00	592.608.835,00	(75.314.585,00)	88,72
5.5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.104.971.801,00	3.487.514.817,00	(617.456.984,00)	84,96
5.5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.365.134.720,00	1.798.424.559,00	(566.710.161,00)	76,04
5.5.02	KEUANGAN	251.571.366.557,00	252.533.359.538,00	961.992.981,00	100,38
5.5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.381.793.396,00	21.664.998.400,00	(1.716.794.996,00)	92,66
5.5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	225.442.333.826,00	228.144.783.738,00	2.702.449.912,00	101,20
5.5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.794.802.100,00	1.794.284.750,00	(517.350,00)	99,97
5.5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	952.437.235,00	929.292.650,00	(23.144.585,00)	97,57
5.5.03	KEPEGAWAIAN	15.277.547.761,00	14.443.903.932,00	(833.643.829,00)	94,54
5.5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.433.097.915,00	7.978.871.047,00	(454.226.868,00)	94,61
5.5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.844.449.846,00	6.465.032.885,00	(379.416.961,00)	94,46
5.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	18.573.227.637,00	16.961.334.628,00	(1.611.893.009,00)	91,32



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
5.6.01	INSPEKTORAT	18.573.227.637,00	16.961.334.628,00	(1.611.893.009,00)	91,32
5.6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.721.115.719,00	8.926.657.128,00	(794.458.591,00)	91,83
5.6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.167.702.518,00	6.721.640.000,00	(446.062.518,00)	93,78
5.6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.684.409.400,00	1.313.037.500,00	(371.371.900,00)	77,95
5.7	UNSUR KEWILAYAHAN	66.681.849.077,00	63.782.319.950,00	(2.899.529.127,00)	95,65
5.7.01	KECAMATAN	66.681.849.077,00	63.782.319.950,00	(2.899.529.127,00)	95,65
5.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.953.167.271,00	55.278.296.180,00	(2.674.871.091,00)	95,38
5.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.397.670.272,00	2.393.241.068,00	(4.429.204,00)	99,82
5.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.017.944.610,00	3.808.051.559,00	(209.893.051,00)	94,78
5.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	85.248.000,00	85.248.000,00	0,00	100,00
5.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.697.626.103,00	1.697.209.732,00	(416.371,00)	99,98
5.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	530.192.821,00	520.273.411,00	(9.919.410,00)	98,13
5.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	52.331.183.302,00	51.821.688.068,00	(509.495.234,00)	99,03
5.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	52.331.183.302,00	51.821.688.068,00	(509.495.234,00)	99,03
5.8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.290.207.711,00	4.105.240.925,00	(184.966.786,00)	95,69
5.8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.221.326.689,00	2.172.304.569,00	(49.022.120,00)	97,79
5.8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	45.191.783.960,00	44.923.888.427,00	(267.895.533,00)	99,41
5.8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	137.273.817,00	134.445.745,00	(2.828.072,00)	97,94
5.8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	112.178.030,00	111.555.700,00	(622.330,00)	99,45
5.8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	378.413.095,00	374.252.702,00	(4.160.393,00)	98,90

Sumber Data BPKAD Kabupaten Fakfak Tahun 2024 per 20 Maret 2025

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2024, maka permasalahan strategis Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah merujuk pada berbagai kemajuan yang telah dicapai, maka masalah dan tantangan utama yang dihadapi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan ditingkat Kabupaten, Distrik dan Kampung

Kualitas sumber daya aparatur sangat berpengaruh terhadap kompetensi serta pelayanan publik selain itu kondisi yang dihadapi saat ini yaitu masih tingginya pelanggaran disiplin dan lemahnya sistem pengawasan baik internal, eksternal termasuk pengawasan masyarakat dan sistem pertanggungjawaban publik. Pada tingkat Distrik dan Kampung pendelegasian kewenangan yang diberikan tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas aparatur baik di tingkat pemerintahan Kampung maupun Distrik sehingga pengelolaan pembangunan di Kampung dan Distrik belum berjalan optimal. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi aparatur serta lemahnya sumber daya manusia menjadi tantangan yang harus diperbaiki kedepan. Pada sisi lain kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah masih ditemui adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh OPD baik di pusat maupun di daerah sehingga menimbulkan ketidak sinkronan

dalam pelaksanaan tugas. Kurangnya koordinasi antar OPD juga merupakan masalah yang sering dihadapi karena masih adanya ego sektoral yang cenderung tampak pada pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Lemahnya koordinasi antar OPD menyebabkan masalah pembangunan yang seharusnya dilakukan secara lintas sektoral diselesaikan secara parsial, sehingga terkesan program dan kegiatan tersebut tidak berjalan sinergis. Pada tingkat kelembagaan birokrasi masih ditemukan permasalahan terutama terkait dengan sumber daya aparatur yang masih rendah serta institusi birokrasi yang belum efektif baik struktur maupun kultur. Langkah kedepan yang perlu dilakukan adalah pertama adalah restrukturisasi kelembagaan Pemerintah Daerah agar lebih efisien dan efektif serta penciptaan sejumlah regulasi dan tata kelola yang lebih baik.

2. Kualitas pelayanan publik yang rendah

Kualitas pelayanan publik yang rendah selain disebabkan terbatasnya kualitas sumber daya manusia, juga belum adanya standar pelayanan publik sebagai instrumen dalam menentukan standar pelayanan yang diberikan oleh setiap OPD. Selain itu pula kultur birokrasi yang masih berorientasi pada dilayani bukan melayani sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan. Sementara itu pada sisi lain pemahaman terhadap tugas pokok serta fungsi setiap OPD masih rendah serta masih tingginya ego setiap OPD dalam memahami tugas pokok dan fungsi.

3. Rekrutmen serta Promosi Pegawai Negeri yang belum sepenuhnya mengacu ada aturan yang ada.

Permasalahan utama yang dihadapi yaitu pola rekrutmen pegawai serta promosi masih belum mempertimbangkan secara cermat analisis kebutuhan beban kerja, jenis pekerjaan, sifat pekerjaan serta masih ditemui adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai kompetensinya.

4. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu agenda utama yang harus segera dicarikan solusinya. Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah yang selalu saling terkait dan berkorelasi positif antara satu dengan yang lain dan apabila tidak tertangani secara efektif maka dapat berdampak pada masalah sosial lainnya. Masalah kemiskinan dan pengangguran ini juga disebabkan berbagai hal seperti kurang terkelolanya potensi sumber daya yang ada sehingga menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat rendah yang berdampak pada pendapatan serta daya beli. Selain itu terbatasnya lapangan kerja juga dipengaruhi oleh kurangnya kegiatan investasi di daerah. Oleh karena itu berbagai kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terus dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat melalui program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data BPS (tahun 2022) presentase angka kemiskinan di Kabupaten Fakfak sebesar 22,06% dan sebaran penduduk miskin di Kabupaten Fakfak sebagian besar berada di Kampung-kampung. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti terbatasnya akses masyarakat dalam memperoleh lapangan kerja, terbatasnya kemampuan berusaha yang disebabkan oleh terbatasnya ketrampilan serta akses modal dan juga masih rendahnya dukungan investasi di daerah yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Disisi lain beberapa faktor eksternal juga telah memberi sumbangsi terhadap meningkatnya angka kemiskinan seperti kenaikan harga BBM yang berdampak pada inflasi sehingga menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Pemerintah baik pusat maupun daerah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui beberapa kebijakan, strategi serta program melalui kebijakan pengalihan subsidi BBM kepada sektor yang lebih produktif terutama dibidang pendidikan, kesehatan melalui program KIS, KIP dan KSK namun belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan serta strategi yang lebih tepat serta komprehensif melalui program-program yang lebih bersifat jangka panjang, menengah maupun tahunan. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang difokuskan pada perluasan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta program-program pemberdayaan ekonomi.

Upaya pemberdayaan masyarakat miskin menjadi penting karena akan mendudukan mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan posisi awal masyarakat miskin lebih berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Selain itu diperlukan upaya pemberdayaan agar masyarakat miskin dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga mengubah pandangan terhadap masyarakat miskin dari beban (liabilities) menjadi potensi (assets). Berbagai proses pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan tersebut diatas, perlu didukung oleh perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial serta kebijakan ekonomi yang pro-poor termasuk tata kelola pemerintahan yang baik.

5. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi, Potensi ekonomi Kabupaten Fakfak cukup besar terutama dibidang pertanian

Perkebunan, perikanan serta pertambangan namun pengelolaannya masih sangat terbatas. Keterbatasan pengelolaan potensi ekonomi selain disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung usaha seperti modal, peralatan serta manajemen usaha, juga pada sisi lain masih rendahnya etos kerja yang berpengaruh terhadap tingkat produktifitas. Hal ini menyebabkan skala usaha masih kecil dan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Sementara itu pola usaha ekonomi masyarakat belum didukung oleh kemampuan mengadopsi teknologi tepat guna sehingga masih menggunakan cara-cara tradisional. Kondisi ini menyebabkan tingkat produksi relatif kecil sehingga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan maupun kesejahteraan yang masih rendah. Selain itu dari sisi kualitas juga masih rendah karena belum didukung oleh sistem pengolahan pasca panen. Sementara itu pengelolaan potensi ekonomi di Kabupaten Fakfak belum sepenuhnya didukung oleh investasi dan hanya beberapa kawasan seperti kawasan Bomberay yang sudah dikelola oleh pihak swasta yaitu penanaman kelapa sawit, sedangkan pada kawasan lainnya belum ada kegiatan investasi.

6. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan

Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Fakfak masih menjadi permasalahan yang belum tuntas diselesaikan. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan tersebut. Dengan tingkat aksesibilitas serta kondisi geografis daerah yang ada menyebabkan anggaran pembangunan sarana dan prasarana pendidikan cukup mahal. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Fakfak tetap memprioritaskan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan.

7. Distribusi guru yang tidak merata

Jumlah ketersediaan guru di Kabupaten Fakfak pada semua jenjang pendidikan baik SD, SLTP maupun SLTA sesuai dengan rasio pada dasarnya telah mencukupi. Namun demikian kondisi yang sering dihadapi yaitu adanya kekurangan guru terutama di Kampung-Kampung. Kenyataan yang dihadapi pada sekolah-sekolah tertentu jumlah guru mencukupi bahkan melebihi, sedangkan pada sekolah lain terutama di Kampung-Kampung jumlah guru pada sekolah baik di tingkat SD, SLTP maupun SLTA sangat kurang serta tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan rasio guru terhadap murid tidak berimbang sehingga mempengaruhi efektifitas belajar mengajar di sekolah.

8. Rendahnya kualitas serta akses pendidikan

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan memegang peran yang sangat esensial. Untuk itu diperlukan kebijakan maupun strategi pengembangan pendidikan yang berkualitas serta berkarakter sebagai bagian dari Revolusi karakter Bangsa (Revolusi Mental) yang merupakan salah satu agenda prioritas dalam Nawa Cita Pemerintahan saat ini. Terdapat tiga variabel penting dalam pengelolaan pendidikan yang perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh yaitu (1). guru sebagai pengajar (2). Murid sebagai anak didik (3). Lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh. Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Fakfak selama ini telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) Kabupaten Fakfak yang terus mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 IPM Kabupaten Fakfak sebesar 69,52 point meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 68,52 point. Peningkatan ini lebih tinggi dari beberapa Kabupaten pemekaran dan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Beberapa variabel sebagai determinan penentu IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2022 sebesar 68,75 tahun lebih tinggi dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 68,50 tahun. Sedangkan Angka Melek Huruf (AMH) tahun 2022 yaitu sebesar 99,46% lebih tinggi dibanding AMH tahun 2021 yaitu sebesar 99,27%. Sementara itu komponen rata-rata lama sekolah sebagai determinan IPM tahun 2022 yaitu 9,08 tahun partisipasi baik kasar maupun murni masih lebih tinggi untuk sekolah dasar dibandingkan pada tingkat SMP ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk usia sekolah SMP di Kabupaten Fakfak yang tidak bersekolah. Sementara APK untuk tingkat SD sudah mencapai 111,57% artinya sudah lebih dari 95% penduduk usia SD yang sudah bersekolah. Namun jika dilihat dari APM angkanya masih 96,25% artinya masih banyak anak sekolah di SD yang usianya sudah bukan usia SD lagi.

9. Rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia pendidik. Walaupun kualitas tenaga pendidik bukan satu-satunya variabel penentu kualitas pendidikan seseorang karena ada beberapa variabel lainnya seperti murid, ketersediaan sarana dan prasarana serta orang tua serta lingkungan yang juga memberi adil dalam menentukan kualitas seseorang, tetapi kualitas tenaga pendidik merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas murid yang menjadi didikannya. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak (2020) jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi sarjana (SI) sebanyak 1.250 orang serta diploma 382 orang. Sementara itu jumlah guru yang telah memiliki sertifikasi yaitu sebanyak 526 orang sedangkan yang belum memiliki sertifikasi yaitu sebanyak 1.106 orang.

10. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan

Permasalahan pokok kesehatan di Kabupaten Fakfak yaitu (1). Belum optimalnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang mudah, murah serta terjangkau. Sebagai implikasi kurang optimalnya fungsi dan peran sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan yang murah serta terjangkau. Selain itu kapasitas sumber daya tenaga kesehatan juga masih sangat terbatas, Sementara itu indikator lainnya juga menunjukkan tingkat pelayanan masih rendah ditunjukkan oleh masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta masih tingginya prevalensi penyakit seperti Stunting, malaria, ISPA serta HIV-AIDS yang cukup tinggi.

11. Adat, Budaya dan Kehidupan Beragama

Sejarah mencatat bahwa Kabupaten Fakfak telah dikenal sejak zaman Majapahit, dan telah menjadi pusat serta simpul dari berbagai bangsa serta budaya. Sebagai kota bersejarah, Kabupaten Fakfak telah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah terutama Pala dan kayu masohi yang sudah diperdagangkan sejak tahun 1856. Dengan geografis wilayah yang berbatasan dengan beberapa Kabupaten di Papua Barat serta Maluku, maka daerah ini sejak lama telah dikenal serta telah terjadi hubungan sosial yang sangat kuat serta menjadi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Budaya satu tungku tiga batu satu hati satu saudara merupakan bukti bahwa masyarakat Fakfak merupakan masyarakat yang pluralis serta toleran terhadap sesama. Inilah yang menjadi dasar filosofi yang tetap terpelihara hingga sekarang. Kini perubahan arah kehidupan menuju kondisi yang bersifat materialistik, komersil serta duniawi telah menjadi gejala yang perlu disikapi serta diwaspadai. Beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman umat terhadap ajaran-ajaran agama yang dianut, kurang optimalnya pemanfaatan tempat-tempat ibadah serta kurang optimalnya kinerja lembaga keagamaan dalam melakukan pembinaan terhadap umat dalam rangka membangun kesalehan sosial. Sementara itu dari aspek kelembagaan adat dan budaya masyarakat, permasalahan yang ada yaitu adanya tuntutan terhadap hak-hak adat/ulayat yang tidak didasari atas bukti keabsahan yang memiliki legal formal.

12. Masalah Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur wilayah sangat memiliki peran penting serta menjadi urat nadi bagi perekonomian daerah. Dengan infrastruktur wilayah yang handal dapat mempercepat konektivitas serta memperlancar arus barang, jasa dan manusia. Namun demikian kondisi yang dihadapi adalah masih terbatasnya dukungan infrastruktur wilayah meliputi (1). Belum optimalnya ketersediaan jalan serta cakupan pelayanan infrastruktur jaringan jalan, terbatasnya fasilitas lalu lintas, belum optimalnya kondisi dan penataan sistem terminal sebagai tempat. Permasalahan pada aspek sumber daya air yaitu masih belum memadai dan cakupan air bersih baru mencapai 70 %. Sedangkan permasalahan lainnya yaitu sumber daya listrik masih sangat terbatas, dengan kapasitas 4-5 MW terpasang pelayanan jaringan listrik belum melayani semua wilayah. Kondisi ini menyebabkan sering terjadi pemadaman listrik dan hingga kini belum dilakukan pengembangan energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap listrik PLN. Sementara itu pada aspek infrastruktur perhubungan laut, walaupun kapasitas pelabuhan laut Fakfak telah dikembangkan baik dermaga maupun areal lapangan kontainer, namun masih perlu dikembangkan kedepan mengingat pertumbuhan barang, jasa dan manusia semakin meningkat setiap tahun. Dibidang infrastruktur perhubungan udara, permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya bandara torea Fakfak. Dengan panjang runway 1200 meter hanya bisa didarati pesawat jenis ATR 60. Untuk mengantisipasi perkembangan yang ada, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah melaksanakan pembangunan bandara baru di Siboru.

13. Pemukiman, Perumahan dan Penataan ruang

Pemukiman, perumahan dan Penataan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan tetapi saling berkaitan satu sama lain. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan perumahan serta pemukiman yaitu biaya pembangunan yang mahal terutama bagi keluarga yang berpenghasilan rendah. Disamping itu pula pembangunan perumahan serta pemukiman sering menemui permasalahan berupa tanah adat/ulayat. Sedangkan berkaitan dengan penataan ruang, permasalahan yang terjadi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan penataan ruang. Hal ini sering menimbulkan permasalahan penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR serta RTBL.

14. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Fakfak memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar terutama dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta pertambangan. Untuk itu agar pengelolaan sumber daya alam tersebut dapat berkelanjutan maka pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun demikian pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan dihadapkan pada permasalahan serta kendala yaitu keterbatasan dan depleksi sumber daya alam, belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup serta adanya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup melebihi upaya perbaikannya.

b. Visi Dan Misi

1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan kata lain Visi merupakan suatu cita-cita atau keinginan untuk mewujudkan harapan menjadi kenyataan melalui implementasi rencana strategis yang telah ditetapkan. Visi Kabupaten Fakfak tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam jangka menengah tahun 2021-2026 yaitu

“TERWUJUDNYA MASYARAKA FAKFAK YANG TERDEPAN,
SEJAHTERA, NYAMAN, UNGGUL, DAN MANDIRI
(FAKFAK TERSENYUM)”

Adapun pengertian dari Visi dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

- a) **Terdepan**, menjadikan Kabupaten Fakfak sebagai kabupaten terdepan di wilayah selatan Papua Barat dalam hal pembangunan karakter, pembangunan sektor sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi, pelayanan dasar, reformasi birokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan melalui filosofi **SATU TUNGKU TIGA BATU IDU IDU MANI NINA** dengan memperhatikan nilai-nilai luhur kearifan lokal.
- b) **Sejahtera**, Terwujudnya kesejahteraan masyarakat, hal ini merujuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat Fakfak. Sejahtera pula dapat diartikan sebagai kehidupan masyarakat Fakfak dengan tingkat ekonomi yang layak dan mapan dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dibidang Pendidikan, Kesehatan, sosial dan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan merata;
- c) **Nyaman**, memiliki arti 'Terwujudnya masyarakat Fakfak yang merasa aman dan damai, terlepas dari segala ancaman dan gangguan, bagi masyarakat dalam beraktifitas maupun dalam iklim investasi;
- d) **Unggul**, memiliki arti 'Terwujudnya Kabupaten Fakfak sebagai Kabupaten yang memiliki keutamaan, kecakapan, dan kekuatan dalam bidang-bidang tertentu dan kelak memiliki daya saing komparatif;
- e) **Mandiri**, Terwujudnya kemandirian dalam bentuk sikap dan perilaku serta mental yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat Fakfak, berusaha melakukan segala sesuatu dengan jujur, adil dan benar atas dorongan dirinya sendiri dan mampu mengatur diri sendiri, sesuai dengan hak dan kewajiban.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 6 (enam) misi jangka menengah yaitu :

- a) Menciptakan kualitas sumber daya manusia Fakfak yang Cerdas, Sehat, Religius dan Produktif Yang Memiliki Daya Saing Melalui Pendidikan Dan Derajat Kesehatan.
- b) Memperkuat kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor unggulan daerah yang berbasis Pariwisata, Pertanian, dalam arti luas dan kelautan.
- c) Meningkatkan kinerja pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel Berbasis Pelayanan Elektronik.
- d) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan interkoneksi wilayah yang terpadu dan terintegrasi.
- e) Melestarikan adat dan budaya sesuai dengan nilai-nilai kearifan local masyarakat Fakfak.
- f) Mewujudkan Pembangunan Fakfak Berkelanjutan, melalui kearifan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Yang Lestari Serta Berbasis Mitigasi Bencana.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, selain disusun program-program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang meliputi 6 (enam) Urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan non pelayanan dasar serta 8 (delapan) urusan pilihan, juga disusun program unggulan kepala daerah yang merupakan program unggulan (*Dedicated*) serta program strategis. Program tersebut diharapkan dapat lebih mempercepat akselerasi pembangunan seperti peningkatan konektivitas wilayah, percepatan kualitas pelayanan publik, reformasi dan tata kelola, juga sebagai trigger pertumbuhan ekonomi daerah. Program-program Pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 1.9
Program-Program Pembangunan Daerah Kabupaten Fakfak
Berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026

NO	PRIORITAS 2021-2026	SUPRA PRIORITAS 2021-2026	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penguatan Sumber Daya Manusia (Fakfak Cerdas, Sehat dan Religius)	Penyediaan beasiswa bagian anak dan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS SD	persen	98,81	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				APS SMP	persen	98,11		
				APS SMA	persen	89,81		
				APK PAUD	persen	76,95		
				APS Kesetaraan	persen	28,03		
		Penyediaan sarana dan prasarana bagi tenaga guru di daerah marginal;	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah	persen	6,39		
				Rasio guru terhadap murid TK/RA Sederajat	per satuan guru	8,58		
				Rasio guru terhadap murid SD/MI Sederajat	per satuan guru	9,91		
				Rasio guru terhadap murid SMP/MTs Sederajat	per satuan guru	9,92		
				Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA Sederajat	per satuan guru	15,90		
				Persentase Guru TK yang bersertifikat pendidik	persen	0,00		
				Persentase Guru SD yang bersertifikat pendidik	persen	33,33		
				Persentase Guru SMP yang bersertifikat pendidik	persen	47,93		
2	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan yang terpadu dan Terintegrasi kewilayahan dan sektoral	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD	persen	85,00	PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas	ada/tidak ada	ada		
				Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	75,00		
				Persentase hasil musyawarah rencana pembangunan dan konsultasi publik yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Persen	80,00		
				Cakupan elemen data pembangunan yang terpenuhi dalam SIPD	Persen	75,00		
		Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	tepat waktu	KEUANGAN	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	persen	5,00		
				Persentase SILPA terhadap APBD	persen	5,00		
				Persentase belanja pendidikan	persen	20,00		
				Persentase belanja kesehatan	persen	10,00		
				Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	persen	85,00		
				Cakupan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pada OBRK	Persen	-		
				Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti	Persen			
		Sistem pengendalian internal yang melekat serta efektif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT
		Kedisiplinan kepegawaian yang mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Tersesainya Administrasi Pelayanan Kepegawaian dan Pembinaan ASN	persen	85,00	KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Persentase PNS berkembang karier	persen	-		
				Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	persen	100,00		
				Persentase Keterisian Jabatan	persen	100,00		
				Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	persen	100,00		



NO	PRIORITAS 2021-2026	SUPRA PRIORITAS 2021-2026	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Beasiswa Bagi Pelajar Asal Fak fak	Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rekrutmen mahasiswa pembibitan. pola	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan jumlah penerima beasiswa pelajar asli Fak fak	persen	100,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESRA	Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra berdasarkan proposal yang diusulkan masyarakat	Persen	80,00	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
4	Pemberiaan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	Penyediaan Data Base sosial ekonomi masyarakat Kabupaten, Distrik, Kelurahan & Kampung berbasis Kampung (SAIK+).	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase PKK aktif	persen	100,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
				Presentase posyandu aktif (status purnama dan mandiri)	persen	18,71		
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terhubung akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	persen	-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
				Presentasi Jumlah Jaringan Internet dan Intranat terintegrasi	persen	-		
				Cakupan penyediaan data OAP berbasis SAIK	persen	100		
			PROGRAM KOORDINASI & SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator Program RPJMD bidang ekonomi yang tercapai	persen	80,00	PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH
				Persentase indikator Program RPJMD bidang sosial budaya yang tercapai	persen	80,00		
				Persentase indikator Program RPJMD bidang infrastruktur yang tercapai	persen	80,00		
				Cakupan penyediaan data OAP berbasis SAIK	persen	100		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS Tervalidasi	persen	100,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL
				Cakupan jumlah penerima bantuan sosial dan perlindungan afirmasi OAP	persen	60		
		Pemberian bantuan dan perlindungan sosial kepada masyarakat, terutama OAP	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	persen	92,00		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial dan/atau rehabilitasi sosial	persen	100,00		
				Cakupan masyarakat OAP yang mendapatkan bantuan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	persen	100,00		
		Peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga ber PHBS	persen	50,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
				Cakupan posyandu aktif di kampung kampung	persen	100,00		



NO	PRIORITAS 2021-2026	SUPRAPRIORITAS 2021-2026	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pembangunan Jaringan Air Bersih	Program penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman/ layak	persen	7,20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PEMUKIMAN
				Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	persen	-		
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	persen	50,00		
				Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	persen	53,00		
				Persentase pelaksanaan normalisasi sungai	persen	50,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana perkebunan	persen			
6	Peningkatan Interkonektifitas Antar Wilayah	Pembangunan jalan strategis antar wilayah.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan sanitasi layak	persen	75,60	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
				Tingkat Kemantapan Jalan Kab/ Kota	persen	79,11		

Sumber Data RPJMD Kabupaten Fakfak 2021-2026

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan RKPD Tahun 2024

Dasar penyusunan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah dimulai dari tahapan serta mekanisme perencanaan pembangunan ditingkat Kampung, Distrik, Kabupaten, Provinsi serta Nasional dengan tujuan guna menciptakan keselarasan serta sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Penjabaran program dan kegiatan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 1.10
Kegiatan-kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Fakfak Tahun 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6
DINAS PENDIDIKAN					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			153.305.340.000,00	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB.FAKFAK
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			153.305.340.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase terlaksananya Program pengelolaan Pendidikan	60%	144.975.340.000,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah dasar	Persentase Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	60%	47.307.600.000,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60%	46.984.500.000,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini Daerah	60%	5.899.380.000,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Persentase Peningkatan Kualitas Pendidikan NonFormal Daerah	60%	1.948.860.000,00	
1.01.02.4.05	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Peningkatan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	60%	26.800.000.000,00	
1.01.02.4.06	Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Peningkatan Kualitas Pendidikan Non formal daerah	60%	14.635.000.000,00	
1.01.02.4.07	Penyediaan layanan khusus bagi OAP	Persentase Penyediaan Pendidikan layanan khusus bagi OAP	60%	1.400.000.000,00	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Peningkatan Kualitas Pengembangan Kurikulum	60%	1.905.000.000,00	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Peningkatan Kualitas Pengembangan Kurikulum	60%	730.000.000,00	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan nonformal	Persentase Peningkatan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF yang ditetapkan	60%	475.000.000,00	
1.01.03.4.03	Penetapan kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	60%	700.000.000,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	5.800.000.000,00	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Daerah	60%	3.800.000.000,00	
1.01.04.4.02	Pemerataan kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	60%	2.000.000.000,00	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Peningkatan Kualitas Pengendalian Perizinan Pendidikan	100%	625.000.000,00	
1.01.05.2.01	Penerbitan izin pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	Persentase Peningkatan penerbitan izin pendidikan dasar	60%	150.000.000,00	
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	60%	275.000.000,00	
1.01.05.4.03	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	60%	200.000.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.079.000.000,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			14.079.000.000,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100%	3.250.000.000,00	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	60%	350.000.000,00	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	60%	2.900.000.000,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100%	10.129.000.000,00	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kejuaraan Olahraga Daerah	60%	5.050.000.000,00	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	60%	1.700.000.000,00	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	60%	1.379.000.000,00	



2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	60%	2.000.000.000,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100%	700.000.000,00	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan	60%	700.000.000,00	
X.X.XX	NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			220.957.416.727,00	
				220.957.416.727,00	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	220.957.416.727,00	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60%	600.000.000,00	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60%	199.307.416.727,00	
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60%	400.000.000,00	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60%	2.250.000.000,00	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	60%	2.900.000.000,00	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	60%	1.000.000.000,00	
X.XX.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	13.550.000.000,00	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	950.000.000,00	
DINAS KESEHATAN				162.925.023.231,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			162.925.023.231,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			162.925.023.231,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			162.925.023.231,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			162.925.023.231,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60%	74.274.299.909,00	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60%	870.428.160,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60%	60.093.529.420,00	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60%	889.551.740,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	60%	1.525.693.969,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60%	1.941.981.105,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	6.139.899.542,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	2.813.215.973,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	60%	87.396.001.415,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar atau yang dipersyaratkan untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas	60%	70.490.054.886,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60%	16.731.088.229,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	60%	24.000.000,00	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 izin	150.858.300,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	60%	265.721.907,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan, Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	60%	265.721.907,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PRESENTASE SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	60%	989.000.000,00	
1.02.04.2.01	Pemberian izin apotik, took Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60%	989.000.000,00	
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				86.087.685.000,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			86.087.685.000,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			86.087.685.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	48.787.685.000,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60%	31.141.000.000,00	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60%	500.000.000,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Persentase Terlaksananya Administrasi Umum	60%	6.155.901.775,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60%	660.000.000,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersediannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	9.970.783.225,00	



1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	360.000.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100%	37.300.000.000,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	60%	11.100.000.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60%	25.000.000.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	60%	1.200.000.000,00	
	PUSKESMAS FAKFAK KOTA			2.840.792.330,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.840.792.330,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.840.792.330,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	60%	2.840.792.330,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupten/Kota	60%	2.838.492.330,00	
1.02.02.4.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupten/Kota	60%	2.300.000,00	
	PUSKESMAS WERBA			2.174.315.937,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.174.315.937,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.174.315.937,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.174.315.937,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupten/Kota	60%	1.946.779.937,00	
1.02.02.4.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	60%	219.376.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			8.160.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8.160.000,00	
	PUSKESMAS SEKBAN			873.759.000,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			873.759.000,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			873.759.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Meningkatnya Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</i>	60%	873.759.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupten/Kota	60%	851.259.000,00	
1.02.02.4.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupten/Kota	60%	22.500.000,00	
	PUSKESMAS WERI			1.384.997.045,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.384.997.045,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.384.997.045,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.384.997.045,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupten/Kota	60%	1.179.377.047,00	
1.02.02.4.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupten/Kota	60%	205.619.998,00	



	PUSKESMAS KARAS			1.204.537.664,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.204.537.664,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.204.537.664,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	60%	1.204.537.664,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupten/Kota	60%	1.142.112.664,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			62.425.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			62.425.000,00	
	PUSKESMAS KOKAS			300.601.441,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			300.601.441,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			300.601.441,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100%	300.601.441,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupten/Kota	60%	300.601.441,00	
	PUSKESMAS KRAMONGMONGGA			1.321.068.665,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.321.068.665,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.321.068.665,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	60%	1.321.068.665,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupten/Kota	60%	1.321.068.665,00	
1.02.02.4.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupten/Kota	60%	211.555.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100%	2.554.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60%	2.554.000,00	
	PUSKESMAS DEGEN			918.205.074,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			918.205.074,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			918.205.074,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	60%	918.205.074,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupten/Kota	60%	709.985.074,00	
1.02.02.4.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota			206.920.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			1.300.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.300.000,00	
	PUSKESMAS BOMBERAY			1.259.336.632,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.259.336.632,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.259.336.632,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100%	1.190.393.832,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupten/Kota	60%	1.029.024.072,00	



1.02.02.4.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60%	161.369.760,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PRESTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100%	68.942.800,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60%	68.942.800,00	
	PUSKESMAS FAKFAK TENGAH			2.300.489.156,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.300.489.156,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.300.489.156,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Persentase Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	60%	2.290.719.156,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60%	2.099.274.156,00	
1.02.02.4.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60%	191.445.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PRESTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100%	9.770.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60%	9.770.000,00	
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				353.134.456.920,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			353.134.456.920,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			326.744.983.236,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5 Tahun 100%	47.448.393.655,00	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60%	1.012.706.601,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kelancaran Pelaksanaan Keuangan Perangkat Daerah	3 Tahun	11.200.000.000,00	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60%	318.270.000,00	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	60%	9.647.164.037,00	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60%	5.380.433.595,00	
1.03.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	8.578.503.627,00	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	11.311.315.795,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PERSENTASE PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	60%	54.037.464.219,00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Fakfak	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Fakfak	60%	24.176.185.670,00	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60%	29.861.278.549,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	100%	23.018.247.951,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Daerah	60%	23.018.247.951,00	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PERSENTASE PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	60%	1.650.000.000,00	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	60%	1.650.000.000,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PERSENTASE PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	100%	3.569.725.000,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	60%	3.569.725.000,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	60%	9.273.181.750,00	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	60%	9.273.181.750,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		34.311.627.800,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	60%	34.311.627.800,00	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	60%	500.000.000,00	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	60%	500.000.000,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE PENYELENGGARAAN JALAN	60%	152.321.342.861,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	60%	152.321.342.861,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100%	300.000.000,00	



1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	60%	300.000.000,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	60%	315.000.000,00	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	60%	200.000.000,00	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	60%	55.000.000,00	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	60%	60.000.000,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			26.389.473.684,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN PERUMAHAN	60%	4.300.000.000,00	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	60%	300.000.000,00	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	60%	4.000.000.000,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE KAWASAN PERMUKIMAN	60%	5.089.473.684,00	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	60%	89.473.684,00	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	60%	5.000.000.000,00	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	60%	5.000.000.000,00	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	60%	5.000.000.000,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	60%	12.000.000.000,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	60%	12.000.000.000,00	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				13.164.628.020,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.164.628.020,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			13.164.628.020,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE TERSELENGGARANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100%	8.889.628.020,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	110.000.000,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.843.628.020,00	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60%	10.000.000,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	360.000.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	960.000.000,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	2.800.000.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	556.000.000,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	250.000.000,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE TERSELENGGARANYA PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100%	4.275.000.000,00	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Kegiatan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	60%	1.200.000.000,00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	60%	2.275.000.000,00	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	300.000.000,00	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Terlaksananya Kegiatan Penanganan Sistem Penanggulangan Bencana	100%	500.000.000,00	
SATUAN POLISI PAMONG PARAJA				15.016.238.374,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.016.238.374,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			15.016.238.374,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	10.765.863.034,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60%	4.500.000.000,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60%	350.000.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	60%	861.696.684,00	



1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40%	1.373.916.350,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	3.392.250.000,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	60%	288.000.000,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya kegiatan peningkaqtan ketentraman dan ketertiban	100%	3.141.375.340,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupten /Kota	60%	2.538.744.000,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60%	484.271.340,00	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan PPNS Kabupaten Kota	60%	118.360.000,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Terlaksananya Pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%	1.109.000.000,00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman , Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60%	760.000.000,00	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase Pelaksanaan Pemberdayaan Mashyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	60%	349.000.000,00	
DINAS SOSIAL				21.744.687.297,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			21.744.687.297,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			21.744.687.297,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	9.553.768.208,00	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60%	4.300.377.432,00	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60%	1.355.495.545,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	60%	1.871.409.588,00	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60%	510.485.643,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	1.016.000.000,00	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	60%	500.000.000,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase Cakupan Penanganan Masalah Sosial	100%	3.631.100.000,00	
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase KAT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60%	394.860.000,00	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peserta koordinasi dan sinkroniasi	60%	197.430.000,00	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	60%	3.038.810.000,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100%	3.252.500.000,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	60%	1.554.000.000,00	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	60%	1.698.500.000,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100%	1.821.319.089,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60%	1.821.319.089,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100%	2.760.000.000,00	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	60%	2.760.000.000,00	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100%	726.000.000,00	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Peresentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasionaz Kabupaten/ Kota	60%	726.000.000,00	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				22.705.800.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22.705.800.000,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			13.761.632.000,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggara Program Penunjang Urusan Pemerintahan	60%	9.794.143.037,00	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	60%	4.189.484.246,00	
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terselenggara Program Penunjang Urusan Pemerintahan	60%	36.075.000,00	
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	60%	852.126.260,00	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60%	3.069.518.308,00	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	60%	242.701.664,00	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	60%	768.622.704,00	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	60%	635.614.855,00	



2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Terlaksananya kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	60%	1.148.788.963,00	
2.08.02.2.01	Pelembagaan engarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Lembaga Pengarusutamaan Gender	60%	956.688.963,00	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	60%	192.100.000,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Terlaksananya perlindungan perempuan	60%	953.700.000,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	60%	450.000.000,00	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	60%	402.000.000,00	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	60%	101.700.000,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas keluarga	60%	665.000.000,00	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keluarga	60%	665.000.000,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terlaksananya kegiatan pemenuhan hak anak (PHA)	60%	800.000.000,00	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan Pelembagaan PHA	60%	200.000.000,00	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan penguatan dan pengembangan PHA	60%	600.000.000,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Terlaksananya kegiatan perlindungan anak	60%	400.000.000,00	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan perlindungan anak	60%	250.000.000,00	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya kegiatan perlindungan anak	60%	150.000.000,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN			8.944.168.000,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	persentase Terlaksananya kegiatan pengendalian penduduk Meningkatnya Presentase Terlaksananya kegiatan pembinaan keluarga berencana	60%	246.600.000,00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	60 %	246.600.000,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		100%	5.433.724.000,00	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	60%	1.625.200.000,00	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tersedianya Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	60%	447.000.000,00	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB	60%	411.774.000,00	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ber-KB	Presentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pe,ninaan Kesenjangan Ber-KB	60%	2.949.750.000,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	100%	3.263.844.000,00	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Kekeluargaan Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	60%	1.511.044.000,00	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Program Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	60%	1.752.800.000,00	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			33.548.500.000,00	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			11.600.000.000,00	



2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Terlaksananya Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	200.000.000,00	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60%	200.000.000,00	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Terlaksananya Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100%	11.025.000.000,00	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	60%	11.025.000.000,00	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pelaksanaan Program Penatagunaan Tanah	100%	375.000.000,00	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam atu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Tanha yang Hamparaanya dalam Satu Daerah Kabuapten/Kota	100%	375.000.000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan yang tercapai	100%	10.722.000.000,00	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daearah	Persentase Terlaksananya Kegiatan adm. Keuangan Perangkat Daerah	60%	6.000.000.000,00	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan adm. Kepegawaian Perangkat Daerah	60%	625.000.000,00	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan adm umum perangkat daerah	60%	826.500.000,00	
2.11.01.2.07	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	60%	2.297.500.000,00	
2.11.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	60%	738.000.000,00	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	60%	235.000.000,00	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	60%	100.000.000,00	
2.11.02.2.01	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPLH) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen RPLH Kabupaten/Kota yang disusun	60%	100.000.000,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terlaksananya program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	3.876.000.000,00	
2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan jegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	60%	626.000.000,00	
2.11.03.2.03	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten /Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	60%	3.250.000.000,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEGRAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase terlaksananya program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	100%	1.120.000.000,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pengelolaan hayati kabupaten/kota	60%	1.200.000.000,00	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Persentase cakupan limbah B3 yang dikelola	34%	550.000.000,00	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah izin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan dan diawasi	2 Dokumen	350.000.000,00	
2.11.05.2.02	Pengumpulan limbah B3 dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Izin pengumpulan limbah B3	8 Dokumen	200.000.000,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100%	700.000.000,00	
2.11.06.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	93%	700.000.000,00	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	100%	595.000.000,00	
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kegiatan pengakuan MHA, kearifan local, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengna PPLH	2 kegiatan	95.000.000,00	
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	2 kegiatan	500.000.000,00	



2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	475.500.000,00	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60%	475.000.000,00	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Terlaksananya Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat	100%	250.000.000,00	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberiaan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten Fakfak	2 Penghargaan	250.000.000,00	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terlaksananya Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	65.000.000,00	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	60%	65.000.000,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Sampah Kabupaten/Kota	100%	3.495.000.000,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	35%	3.425.000.000,00	
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Perusahaan Swasta yang dibina dan diawasi dalam pemanfaatan dan Pengelolaan sampah	6 badan usaha	70.000.000,00	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.065.564.925,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			12.065.564.925,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten	100 %	7.923.564.925,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60%	3.888.564.925,00	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kinerja Pegawai	100%	555.000.000,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum yang di sediakan	100%	935.000.000,00	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Aset yang Di miliki	100%	1.700.000.000,00	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jas Penunjangt Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	677.500.000,00	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Aset yang Terpelihara	100%	167.500.000,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100%	1.640.000.000,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	1.265.000.000,00	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	310.000.000,00	
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	65.000.000,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Presentase Cakupan Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	1.212.000.000,00	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan AktaPencatatan Sipil	100%	950.000.000,00	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	197.000.000,00	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	65.000.000,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100% 60%	1.190.000.000,00	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Data Base Kependudukan	100%	325.000.000,00	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Terlaksananya kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60%	15.000.000,00	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penyelenggaraan PIAK	100%	575.000.000,00	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaa dan Pengawas PIAK	100%	275.000.000,00	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100.000.000,00	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Cakupan Penyusunan Profil dan Data Perkembangan Kependudukan Kabupaten	100%	100.000.000,00	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.237.400.000,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			11.237.400.000,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	6.377.400.000,00	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	60%	30.000.000,00	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60%	4.320.000.000,00	



2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	60%	1.107.000.000,00	
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pengadaan Barang Milik Daerah	60%	340.000.000,00	
2.13.01.2.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Barang Milik Daerah	60%	540.400.000,00	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	60%	40.000.000,00	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PENATAAN DESA	100%	1.650.000.000,00	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase kegiatan pembangunan desa yang terselenggara dengan baik	60%	1.650.000.000,00	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		100%	300.000.000,00	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitas Kerja Sama antar Desa	60%	300.000.000,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	100%	1.860.000.000,00	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik	60%	1.760.000.000,00	
2.13.04.4.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Pemerintah Desa	60%	100.000.000,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PRESENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	60%	1.050.000.000,00	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	60%	1.050.000.000,00	
X	NON URUSAN			940.000.000,00	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			940.000.000,00	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	940.000.000,00	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	60%	10.000.000,00	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi keuangan perangkat daerah	60%	20.000.000,00	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi kepegawaian perangkat daerah	60%	320.000.000,00	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi umum perangkat daerah	60%	590.000.000,00	
DINAS PERHUBUNGAN					
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (JLLAJ)	Persentase meningkatnya pelayanan angkutan kepada pemakai jasa angkutan	40%	7.550.000.000,00	
2.15.02.2.02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya pelayanan angkutan kepada pemakai jasa angkutan	40%	4.000.000.000,00	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase jumlah trayek angkutan yang terlayani	40%	1.150.000.000,00	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	60%	60.000.000,00	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Presentase terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	60%	150.000.000,00	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	60%	2.140.000.000,00	
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah	60%	50.000.000,00	
2.15.3.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran	40%	2.500.000.000,00	
2.15.03.2.13	Pembangunan dan penerbitan izin Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1 unit	2.500.000.000,00	
2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Penerbangan	40%	20.000.000.000,00	
2.15.04.2.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Prosentase Jumlah Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	100%	20.000.000.000,00	
	NON URUSAN			8.741.916.886,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			8.741.916.886,00	



01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah - Dinas Perhubungan	40%	8.741.916.886,00	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	25.000.000,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60%	5.506.544.443,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60%	319.452.00,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	60%	815.000.000,00	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan	100%	669.744.997,00	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah - Dinas Perhubungan	100%	554.000.000,00	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan daerah	100%	852.175.446,00	
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK				16.170.000.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.170.000.000,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			14.970.000.000,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60%	12.770.000.000,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60%	5.000.000.000,00	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60%	450.000.000,00	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	60%	1.300.000.000,00	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60%	3.020.000.000,00	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	2.800.000.000,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	200.000.000,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE TERWUJUDNYA PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK TERWUJUDNYA PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK	100%	1.000.000.000,00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Kabupaten/Kota	60%	1.000.000.000,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	60%	1.200.000.000,00	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60%	200.000.000,00	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60%	800.000.000,00	
2.16.03.4.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60%	200.000.000,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			600.000.000,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	60%	600.000.000,00	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	60%	600.000.000,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			600.000.000,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	60%	600.000.000,00	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60%	400.000.000,00	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	60%	200.000.000,00	
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				9.175.415.258,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.175.415.258,00	
2.17	URUSAN PERMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			9.175.415.258,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	6.129.195.143,00	



2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60%	3.268.525.871,00	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60%	699.438.909,00	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	60%	1.327.648.855,00	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60%	125.701.508,00	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	483.000.000,00	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	224.880.000,00	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PERSENTASE PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	100%	150.000.000,00	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan	60%	150.000.000,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	100%	200.000.000,00	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	60%	200.000.000,00	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100%	100.000.000,00	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	60%	100.000.000,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100%	343.899.040,00	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan	60%	343.899.040,00	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100%	783.422.035,00	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya	60%	150.000.000,00	
2.17.06.4.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	60%	633.422.035,00	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	100%	468.899.040,00	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	60%	468.899.040,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	100%	1.000.000.000,00	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	60%	1.000.000.000,00	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				14.212.650.699,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.862.650.699,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			13.862.650.699,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. PERSENTASE TERSELENGGARANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2. PRESENTASE TERSELENGGARANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA YANG TERCAPAI 3. PRESENTASE TERSELENGGARANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA YANG TERCAPAI	60% 100% 60%	10.183.650.699,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan 2. Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0% 0%	30.000.000,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60% 60%	4.018.650.699,00	



2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas TERPADU SATU PINTU Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	60% 60% 60%	1.100.000.000,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Penyediaan Baranf Cetakan dan Penggandaan 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Bahan Material	60% 60% 60% 60% 60%	1.505.000.000,00	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 4. Pengadaan Mebel 5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0% 60% 60% 0% 60% 60% 60%	1.950.000.000,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60% 60% 60%	1.100.000.000,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60% 60% 60% 60%	480.000.000,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	TERLAKSANANYA PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100%	1.379.000.000,00	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20% 20%	329.000.000,00	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	40% 60%	600.000.000,00	
2.18.02.4.03	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	Persentase terciptanya Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	60%	250.000.000,00	
2.18.02.4.04	Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Fasilitas Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	60%	0,00	
2.18.02.4.05	Kemitraan Usaha Nasional	Persentase terciptanya Kemitraan Usaha Nasional	60%	100.000.000,00	
2.18.02.4.06	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal	60%	100.000.000,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	TERLAKSANANYA PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100%	500.000.000,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	60% 60%	500.000.000,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1. PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 2. PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	100% 60%	1.000.000.000,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal 3. Penyediaan Layanan Meningkatkan Birokrasi dan tata Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	60% 60% 60% 60%	1.000.000.000,00	



2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	TERKENDALINYA PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	100%	650.000.000,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan PM 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan PM	60% 60% 60%	650.000.000,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1. PERSENTASE TERSEDIAANNYA PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 2. PERSENTASE TERSEDIAANNYA PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100% 60%	150.000.000,00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	60%	150.000.000,00	
X	NON URUSAN			350.000.000,00	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			350.000.000,00	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. PERSENTASE TERSELENGGARANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA YANG TERCAPAI 2. PRESENTASE TERSELENGGARANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA YANG TERCAPAI 3. PERSENTASE TERSELENGGARANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	60% 100% 60%	350.000.000,00	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	60% 60% 60% 60%	350.000.000,00	
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				7.410.000.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.410.000.000,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			4.355.000.000,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA PRESENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	60%	3.200.000.000,00	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Administrasi Keuangan	60%	3.200.000.000,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1. PRESENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2. TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	100% 60%	1.155.000.000,00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	100%	55.000.000,00	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	100%	1.100.000.000,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			3.055.000.000,00	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA PRESENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	60%	2.160.000.000,00	
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Administrasi Keuangan	60%	50.000.000,00	
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Terlaksananya Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat Daerah 2. Meningkatkan presentase pelayanan administrasi perkantoran	60% 60%	35.000.000,00	
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60%	654.000.000,00	
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah/Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60%	227.000.000,00	
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyedia jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	60%	418.000.000,00	
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	60%	776.000.000,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	100 %	895.000.000,00	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	60 %	295.000.000,00	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	60 %	350.000.000,00	
2.24.02.4.04	Pembinaan Kearsipan Terhadap Perangkat Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pembinaan Kearsipan Terhadap Perangkat Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Dan Lembaga Kearsipan	60 %	250.000.000,00	



DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN					39.326.146.071,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				39.326.146.071,00	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				39.326.146.071,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%		8.894.046.071,00	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Keterpenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60%		4.783.901.071,00	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat daerahh	60%		313.000.000,00	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum PD	100%		1.687.210.000,00	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Sarpras Kerja Dari BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		600.000.000,00	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang operasional kantor	100%		1.344.473.000,00	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD	100%		165.462.00,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	1,045 Ton		17.482.100.000,00	
3.25.03.2.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Data Dan Informasi Sumberdaya Ikan Yang Dapat Diusahakan Dalam Daerah Kabupaten	1 Dokumen		16.797.300.000,00	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Nelayan	20 Kel		387.300.000,00	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Yang Operasional Dan Terkelola	1 Unit		242.500.000,00	
3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Yang Terlayani	100%		55.000.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan 24.50 Ton	23.25 Ton		12.450.000.000,00	
3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rekomendasi Yang Diterbitkan Untuk Pengurusan Izin Usaha Perikanan Budidaya	60%		250.000.000,00	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Diberdayakan	20 kelompok		300.000.000,00	
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi TDPIK yang diterbitkan	15 Dokumen		110.000.000,00	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Difasilitasi Untuk Mengelola Dengan Baik dan Benar	20 Kelompok		11.790.000.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	255 ton		500.000.000,00	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	40 kelompok		500.000.000,00	
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					36.247.610.892,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.550.000.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				5.550.000.000,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Tingkat Pengembangan Kebudayaan di Kabupaten Fakfak	100 %		3.100.000.000,00	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Fakfak yang dikelola	5 kampung		800.000.000,00	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional Fakfak yang Dilestarikan	20 %		950.000.000,00	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat di Kabupaten Fakfak yang dibina	20 %		1.350.000.000,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Tingkat Pengembangan Kesenian Tradisional di Kabupaten Fakfak	100 %		450.000.000,00	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daeah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional Kabupaten Fakfak yang Dibina	20 orang		450.000.000,00	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prsentase Tingkat Pembinaan Sejarah di Kabupaten Fakfak	60 %		500.000.000,00	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah lokal daerah yang dilestarikan	20 %		500.000.000,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase Tingkat Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Fakfak	100 %		1.350.000.000,00	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Fakfak yang ditetapkan	10 obyek		750.000.000,00	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Fakfak yang dikelola	10 item		600.000.000,00	



2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase Tingkat pengelolaan permuseuman di Kabupaten Fakfak	100 %	150.000.000,00	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum Kabupaten Fakfak yang dikelola	1 unit	150.000.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			30.697.610.892,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			30.697.610.892,00	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pelayanan administrasi Perkantoran dan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur serta peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dinas	100 %	7.497.610.892,00	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	1 tahun	4.830.324.327,00	
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	40 orang	202.005.440,00	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun	1.565.426.422,00	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 tahun	718.549.440,00	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	60 %	181.305.263,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Tingkat Daya Tarik Destinasi Pariwisata di Kabupaten Fakfak	100 %	10.750.000.000,00	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	5 distrik	1.800.000.000,00	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola kabupaten/kota	5 distrik	6.300.000.000,00	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	1 tahun	2.150.000.000,00	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	1 tahun	500.000.000,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Tingkat pemasaran pariwisata di Kabupaten Fakfak	100 %	3.600.000.000,00	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Data Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	1 tahun	3.600.000.000,00	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase Tingkat Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Fakfak	100%	5.200.000.000,00	
3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif Ruang Kreatif Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksresi berpromosi dan berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Zona Kreatif Ruang Kreatif Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksresi berpromosi dan berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	1.000.000.000,00	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	1 tahun	4.200.000.000,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Tingkat Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Fakfak	100 %	3.650.000.000,00	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	1 tahun	2.150.000.000,00	
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	1 tahun	1.050.000.000,00	
3.26.05.4.02	Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase Tingkat Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di	100 %	450.000.000,00	
DINAS PERKEBUNAN				16.368.950.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			14.418.950.000,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			14.418.950.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.343.950.000,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun	4.250.000.000,00	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 %	298.750.000,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 %	488.200.000,00	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	420.000.000,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			637.000.000,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.250.000.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	100 %	1.225.000.000,00	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	60 %	225.000.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	100 %	5.250.000.000,00	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	persentase tersedianya prasarana pertanian	60 %	3.700.000.000,00	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	60 %	1.550.000.000,00	



3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100 %	200.000.000,00	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100 %	200.000.000,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PROGRAM PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		400.000.000,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	60 %	400.000.000,00	
X	NON URUSAN			1.950.000.000,00	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			1.950.000.000,00	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.950.000.000,00	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 %	450.000.000,00	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.500.000.000,00	
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				33.679.224.566,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.363.826.118,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		undefined	7.363.826.118,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	undefined	6.318.487.082,00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	60%	4.973.642.938,00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	persentase terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	60 %	478.230.445,00	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase terlaksananya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	60 %	866.613.699,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	100 %	789.155.242,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	60 %	337.155.242,00	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 %	452.000.000,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100 %	256.183.794,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			26.315.398.448,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			26.315.398.448,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			19.677.112.936,00	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60%	550.719.760,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60%	14.159.734.859,00	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60%	170.272.000,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	60%	2.028.969.071,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	1.974.332.246,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	793.085.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	100%	3.105.615.632,00	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit ternak serta pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta PAKAN	60%	1.875.639.615,00	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya	60%	1.229.976.017,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	100%	1.500.000.000,00	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase tersedianya prasarana pertanian	60%	1.500.000.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	undefined	499.999.256,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	persentase tersedianya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	60%	499.999.256,00	



3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	100%	1.532.670.624,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase terlaksananya Penyuluhan Pertanian (kelompok tani)	60%	1.532.670.624,00	
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				18.872.761.941,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			18.872.761.941,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			14.262.867.398,00	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			7.686.544.690,00	
3.30.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi	17 dok	80.420.000,00	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 %	4.402.967.515,00	
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 %	946.907.000,00	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi umum	60 %	854.458.056,00	
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	60 %	140.566.299,00	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	1.188.445.820,00	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	72.780.000,00	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN	100 %	135.303.210,00	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase tersedianya Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	360 dok	135.303.210,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Terlaksananya Kegiatan peningkatan sarana distribusi	100 %	5.601.871.461,00	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Kegiatan peningkatan sarana distribusi Tersedianya pelaku usaha dan produk lokal yang memenuhi standarisasi sarana distribusi dan standarisasi mutu produk	7/1000 Kegiatan/Unit 4/14.000 Distrik/Unit	5.385.791.461,00	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	persentase terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	60 %	216.080.000,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANGKEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terjaganya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 %	150.480.000,00	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tersedianya jaminan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	360 dok	75.240.000,00	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Brang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	360 dok	75.240.000,00	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		195.811.125,00	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	60 %	195.811.125,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	100 %	492.856.912,00	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	60 %	492.856.912,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			4.609.894.543,00	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	100 %	4.120.332.043,00	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	60 %	2.185.690.000,00	
3.31.02.4.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	60 %	1.934.642.043,00	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Terlaksananya kegiatan pengendalian ijin usaha industri	100 %	132.562.500,00	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengendalian ijin usaha industri	7 Distrik	132.562.500,00	
3.31.04	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase Terlaksananya kegiatan pengelolaan sistim informasi industri nasional	100 %	357.000.000,00	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengelolaan sistim informasi industri nasional	17/5 Distrik/Distrik	357.000.000,00	



DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA				11.528.076.164,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.941.623.268,00	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			9.941.623.268,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. PERSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH 2. PERSENTASE TINGKAT CAKUPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH	100% 100 %	7.490.134.068,00	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	60 %	5.366.722.756,00	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	60 %	84.000.000,00	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	60 %	864.629.486,00	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	60 %	160.000.000,00	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	60 %	573.904.324,00	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	60 %	440.877.502,00	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	100 %	359.000.000,00	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	60 %	359.000.000,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100 % 100 %	1.550.000.000,00	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase keberhasilan proses pelatihan keterampilan berdasarkan kluster kompetis	60 %	1.550.000.000,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PRESENTASE PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN	100 %	365.489.200,00	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pelayanan antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	60 %	185.000.000,00	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang tersedia	60 %	180.489.200,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1. PERSENTASE BESARAN KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB) 2. PERSENTASE BESARAN KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)	100 % 100 %	177.000.000,00	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	60 %	177.000.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.586.452.896,00	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			1.586.452.896,00	
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1. PRESENTASE KETERSEDIAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 2. PRESENTASE KETERSEDIAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100 % 100 %	342.980.000,00	
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase terlaksananya pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	40 %	342.980.000,00	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE TRANSMIGRAN YANG DITEMPATKAN	100 %	593.472.896,00	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60 %	593.472.896,00	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PRESENTASE KAWASAN PEMUKIMAN YANG DI KEMBANGKAN	100 %	650.000.000,00	
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase terlaksananya pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	60 %	650.000.000,00	
SEKRETARIAT DAERAH				60.196.218.083,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			60.196.218.083,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			60.196.218.083,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. PERSENTASE KINERJA PERANGKAT SEKRETARIAT DAERAH 2. PERSENTASE KINERJA PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA	100 % 100 %	60.196.218.083,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran, Perencanaan, Dan Evaluasi	60 %	544.500.000,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Keuangan PD	60 %	17.616.121.569,00	



4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	60 %	397.212.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Teknis Administratif Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	60 %	12.188.817.736,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Barang Milik Daerah	60 %	5.670.557.450,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	6.997.449.000,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 %	1.961.791.152,00	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	60 %	3.492.740.598,00	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	60 %	10.331.103.578,00	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi Dan Pelayanan Publik	60 %	995.925.000,00	
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			2.637.607.000,00	
4	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			2.637.607.000,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			2.637.607.000,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PEMENUHAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	100 %	2.637.607.000,00	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan, Pembinaan Dan Advokasi Barang Dan Jasa	60 %	2.637.607.000,00	
	BAGIAN HUKUM			2.837.447.941,00	
4	UNSUR PENDUKUNG UNSUR PEMERINTAHAN			2.837.447.941,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			2.837.447.941,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE KESESUAIAN PENERIMAAN LAYANAN KESRA, KEGIATAN KEAGAMAAN DAN BANTUAN SERTA PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	2.837.447.941,00	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase Produk Hukum yang Ditetapkan	60 %	2.837.447.941,00	
	BAGIAN PEMERINTAHAN			1.871.183.666,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			1.871.183.666,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			1.871.183.666,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE KESESUAIAN PENERIMAAN LAYANAN KESRA, KEGIATAN KEAGAMAAN DAN BANTUAN SERTA PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	1.871.183.666,00	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Tingkat Pemenuhan Data Indikator Dalam Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	60 %	1.405.489.112,00	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Tersediannya Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah	3 Dok	465.694.554,00	
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			38.300.000.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			38.300.000.000,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			38.300.000.000,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			38.300.000.000,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	60 %	8.300.000.000,00	
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM			10.491.115.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			10.491.115.000,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			10.491.115.000,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PEMENUHAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN PERSENTASE PEMENUHAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	100 % 100 %	10.491.115.000,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Bidang Ekonomi	60 %	9.611.115.000,00	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemenuhan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	60 %	880.000.000,00	
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			1.550.000.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			1.550.000.000,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			1.550.000.000,00	



4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PEMENUHAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	100 %	1.550.000.000,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentasi Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	60 %	1.550.000.000,00	
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			3.741.304.026,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			3.741.304.026,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			3.741.304.026,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. PERSENTASE KINERJA PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA 2. PERSENTASE KINERJA PERANGKAT SEKRETARIAT DAERAH 3. PERSENTASE KINERJA PERANGKAT DAERAH KAB/KOT 4. PERSENTASE KINERJA PERANGKAT SEKRETARIAT DAERAH	100 % 100 % 100 % 100 %	3.741.304.026,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan Yang Terfasilitasi Dan Terdokumentasi Dengan Baik	60 %	3.741.304.026,00	
SEKRETARIAT DPRD				90.186.377.541,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			90.186.377.541,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD			90.186.377.541,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		56.988.921.541,00	
4.02.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	200.000.000,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 2. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 3. Terciptanya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 12 Dok 22 Dok 2 Dok 12 Bulan 12 Bulan 13 Dok 12 Bulan	8.641.145.541,00	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya administrasi barang milik daerah	60 %	100.000.000,00	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 %	1.550.000.000,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 %	4.350.000.000,00	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	60 %	3.200.000.000,00	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Pemerintahan Daerah	60 %	1.600.000.000,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	1.950.000.000,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	60 %	26.775.000.000,00	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	60 %	8.622.776.000,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 %	33.197.456.000,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 3. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	1 Dokumen 8 Dokumen 2 Dokumen	975.596.000,00	



4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1. Pembahasan Perubahan, KUA dan Perubahan PPAS. 2. 5. Pembahasan Laporan Semester, 3. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD, 4. Pembahasan KUA dan PPAS, 5. Pembahasan APBD, 6. Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2.291.600.000,00	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. 2. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, 3. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum, 4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, 5. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, 6. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, 7. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam, 8. Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen 48 Rapat 48 Rapat 48 Rapat 48 Rapat 48 Rapat 48 Rapat	850.000.000,00	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1. Penyusunan Program Kerja DPRD, 2. Pendalaman Tugas DPRD, 3. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, 4. Publikasi dan Dokumentasi Dewan, 5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, 6. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, 7. Orientasi DPRD	8 Dokumen 2 Kali 2 Kali 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Kali	10.755.260.000,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah, 2. Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD, 3. Pelaksanaan Reses	17 Distrik 3 kali 20 Dokumen 17 Distrik 2 Kali	14.819.520.000,00	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1. Penyusunan Kode Etik DPRD 2. Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Dokumen Rapat 12 Kali	270.568.000,00	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah 2. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Rapat 12 kali 12 Bulan	Rapat 12 x 12 Bulan	50.000.000,00	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	1. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, 2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, 3. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, 4. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen 24 kali Rapat 36 kali Rapat 12 Perjadin AKD	3.184.912.000,00	
BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				32.532.634.611,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			32.195.515.161,00	
5.01	PERENCANAAN			26.094.211.098,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminstrasi Perkantoran dan Sumber Daya Aparatur 2. Presentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminstrasi Perkantoran dan Sumber Daya Aparatur	60 % 95 %	10.850.329.520,00	
5.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD	5 Dok	12.375.000,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan 2. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	1 Tahun 12 Bulan	5.000.000.000,00	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Terlaksananya Pelayanan Administarsi Perkantoran 2. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	4 Keg 4 Keg	1.118.600.000,00	



5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administarsi Perkantoran	4 Keg	2.003.424.081,00	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Keg 3 Keg	1.077.901.521,00	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Keg 2 Keg	940.000.000,00	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Keg	698.028.918,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	85 %	6.505.286.128,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	terlaksananya kegiatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Daerah	4 Keg	3.185.291.515,00	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah Kegiatan terkait Data dan Informasi Bidang Perencanaan Pembangunan daerah	3 Keg	976.329.000,00	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Keg	2.343.665.613,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	1. Presentase Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Presentase Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	85 % 85 %	8.738.595.450,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Tahun	3.910.512.500,00	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	8 Keg	3.393.082.950,00	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan	8 Keg	1.435.000.000,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			6.101.304.063,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan daerah	80 %	6.101.304.063,00	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	4 dok	1.082.850.000,00	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 dok	1.655.000.000,00	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	4 Keg	1.232.850.000,00	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3 Keg	2.130.604.063,00	
X	NON URUSAN			337.119.450,00	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			337.119.450,00	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminstrasi Perkantoran dan Sumber Daya Aparatur 2. Presentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminstrasi Perkantoran dan Sumber Daya Aparatur	60 % 95 %	337.119.450,00	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Terlaksananya Pelayanan Administarsi Perkantoran 2. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	4 Keg 4 Keg	337.119.450,00	
BPKAD				410.491.801.625,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			410.491.801.625,00	
5.02	KEUANGAN			410.491.801.625,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	20.678.250.00,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi , Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	60%	112.000.000,00	



5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60%	12.585.000.000,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60%	1.550.000.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	60%	3.622.250.000,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60%	875.000.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	1.659.000.000,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	275.000.000,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100%	385.637.589.125,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	60%	8.815.839.125,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	60%	1.921.750.000,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	60%	4.900.000.000,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	60%	370.000.000.000,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100%	4.175.962.500,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	60%	4.175.962.500,00	
	NON URUSAN			250.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			250.000.000,00	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	250.000.000,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60%	250.000.000,00	
BADAN PENDAPATAN DAERAH				18.403.361.232,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			18.403.361.232,00	
5.02	KEUANGAN			18.403.361.232,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	11.753.361.232,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 %	112.000.000,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 %	4.759.293.232,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 %	1.172.500.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 %	2.343.568.000,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 %	1.366.000.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	1.475.000.000,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	525.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	100 %	6.650.000.000,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	60 %	6.650.000.000,00	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				44.112.404.635,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			44.112.404.635,00	
5.03	KEPEGAWAIAN			44.112.404.635,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	22.462.404.635,00	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 %	2.450.000.000,00	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 %	9.379.904.635,00	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 %	685.000.000,00	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 %	1.547.500.000,00	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 %	2.552.700.000,00	



5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	5.504.300.000,00	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	343.000.000,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	TERLAKSANANYA KEGIATAN KEPEGAWAIAN DAERAH	100 %	21.650.000.000,00	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase selektifitas sistem rekrutimen	80 %	2.885.000.000,00	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	60 %	1.995.000.000,00	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	60 %	16.222.000.000,00	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60 %	548.000.000,00	
INSPEKTORAT				17.418.772.102,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			17.418.772.102,00	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			17.418.772.102,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	9.295.316.688,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	60%	6.383.579.500,00	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	60%	1.008.471.520,00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	60%	1.290.411.898,00	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	60%	318.294.970,00	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	60%	294.558.800,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100%	7.523.455.414,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<i>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	60%	6.442.791.414,00	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	<i>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	60%	1.080.664.000,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100%	600.000.000,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	<i>Persentase Pendampingan dan Asistensi</i>	60%	600.000.000,00	
DISTRIK ARGUNI				3.547.983.510,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.547.983.510,00	
7.01	KECAMATAN			3.547.983.510,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Dokumen Perencanaan, laporan Kinerja dan laporan Keuangan yang tepat	100 %	2.784.383.510,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksanannya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi</i>	100 %	7.01.01.2.01	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	60 %	1.416.183.510,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Presentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	60 %	75.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	60 %	298.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	60 %	448.200.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	60 %	504.000.000,00	
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	<i>Persentase Penataan Organisasi</i>	60 %	35.000.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	363.600.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	60 %	55.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	60 %	8.600.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	60 %	300.000.000,00	



7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	150.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60 %	150.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	180.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60 %	180.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	70.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60 %	70.000.000,00	
DISTRIK PARIWARI				9.244.485.449,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			9.138.595.449,00	
7.01	KECAMATAN			9.138.595.449,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase urusan pemerintahan yang efektif dan efisien	100 %	7.778.278.599,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	60 %	4.874.095.041,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Adanya Barang Cetak dan Pengggandaan 2. Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Presentase Adanya Barang Pakai Habis 4. Penyediaan instalasi listrik pada bangunan kantor 5. Persentase pemenuhan kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 % 60 % 60 % 60 % 60 %	715.515.926,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Gedung yang disewa oleh distrik untuk kelurahan	60 %	1.115.397.192,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pelayanan Surat Menyurat 2. Presentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Presentase 3. Pelayanan Umum Kantor Kelurahan dan Distrik	60 % 60 % 60 %	868.990.440,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan	60 %	154.280.000,00	
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	60 %	50.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Jumlah masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan	100 %	907.861.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Jumlah anggota PKK Distrik dan Kelurahan 2. Jumlah masyarakat yang mengikuti forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kampung	60 % 60 %	200.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Jumlah masyarakat yang diberdayakan di kampung 2. Jumlah masyarakat yang mengikuti forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60 % 60 %	707.861.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Jumlah kampung yang mendapat fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala kampung	100 %	200.052.850,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daearah	Jumlah Kegiatan Sesuai Penugasan Kepela Daerah yang Dilaksanakan	60 %	200.052.850,00	
7.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Jumlah kampung yang mendapat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Kampung Presentase Jumlah kampung yang mendapat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Kampung	60 % 60 % 60 %	252.403.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kampung yang mendapat fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala kampung Jumlah kampung yang mendapat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Kampung Terwujudnya kerukunan antar umat beragama			



X	NON URUSAN				
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase urusan pemerintahan yang efektif dan efisien Presentase urusan pemerintahan yang efektif dan efisien	100 % 100 %	105.890.000,00	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 2. Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan	4 keg 4 keg	337.119.450,00	
DISTRIK FAKFAK				13.430.480.515,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			13.430.480.515,00	
7.01	KECAMATAN			13.430.480.515,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	193.600.000,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan	60%	193.600.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya urusan keuangan daerah	60%	6.750.076.290,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40%	755.375.000,00	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60%		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60%		
		Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2. Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8. Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 1 Tahun	974.825.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60 % 60 %	678.749.999,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Pelayanan Jasa Umum Kantor 2. Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 % 60 % 60 % 60 %	1.098.325.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60 % 60 % 40 %	838.251.328,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	100%	359.330.001,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait" 2. Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 % 60 %	209.330.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	60%	8.600.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60%	150.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat kampung	100%	427.298.500,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawaran	60 %	427.298.500,00	



		Perencanaan Pembangunan di Desa 2. Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60 %		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	90.750.000,00	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia"	60%	90.750.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Terselenggaranya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	377.461.897,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Jumlah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional 2. Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD NKRI 1945	60% 60%	377.461.897,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	592.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2. Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	60% 20%	592.000.000,00	
	NON URUSAN			294.437.500,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			294.437.500,00	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase Terselenggaranya urusan penunjang pemerintahan	100%	294.437.500,00	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan 4. Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40% 60% 60% 1 Tahun	82.687.500,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2. Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 3. Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Terlaksananya Penyediaan Bahan/ Material Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	60% 60% 60% 60% 60% 60% 1 Tahun	211.750.000,00	
DISTRIK WARTUTIN				3.341.028.150,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.341.028.150,00	
7.01	KECAMATAN			2.841.028.150,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya Dokumen Perencanaan, laporan Kinerja dan laporan Keuangan yang tepat	100 %	2.536.522.928,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya Dokumen Perencanaan, laporan Kinerja dan laporan Keuangan yang tepat		1.910.481.198,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 %	30.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 %	258.002.730,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	338.039.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat	100 %	230.999.522,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat	60 %	230.999.522,00	



7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100 %	73.505.700,00	
X	NON URUSAN			500.000.000,00	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			500.000.000,00	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Prosentase tersedianya Dokumen Perencanaan, laporan Kinerja dan laporan Keuangan yang tepat 2. Prosentase tersedianya Dokumen Perencanaan, laporan Kinerja dan laporan Keuangan yang tepat	100 % 100 %	500.000.000,00	
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administras iBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60 %	500.000.000,00	
DISTRIK MBAHAMDANDARA				4.224.350.303,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			4.224.350.303,00	
7.01	KECAMATAN			4.224.350.303,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase urusan pemerintahan yang efektif dan efisien+	100 %	7.778.278.599,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	60 %	4.874.095.041,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Adanya Barang Cetak dan Pengggandaan 2. Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 3. Presentase Adanya Barang Pakai Habis 4. Penyediaan instalasi listrik pada bangunan kantor 5. Persentase pemenuhan kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 % 60 % 60 % 60 % 60 %	715.515.926,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Gedung yang disewa oleh distrik untuk kelurahan	60 %	1.115.397.192,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pelayanan Surat Menyurat 2. Presentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Presentase Pelayanan Umum Kantor Kelurahan dan Distrik	60 % 60 % 60 %	868.990.440,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan	60 %	154.280.000,00	
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	60 %	50.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Jumlah masyarakat desa dan kelurahan yang diberdayakan	100 %	907.861.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Jumlah anggota PKK Distrik dan Kelurahan 2. Jumlah masyarakat yang mengikuti forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kampung	60 % 60 %	200.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1. Jumlah masyarakat yang diberdayakan di kampung 2. Jumlah masyarakat yang mengikuti forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60 % 60 %	707.861.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Jumlah kampung yang mendapat fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala kampung	100 %	200.052.850,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daeah	Jumlah Kegiatan Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan	60%	200.052.850,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Presentase Jumlah kampung yang mendapat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Kampung 2. Presentase Jumlah kampung yang mendapat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Kampung	100 % 100 %	252.403.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Jumlah kampung yang mendapat fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala kampung 2. Jumlah kampung yang mendapat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Kampung 3. Terwujudnya kerukunan antar umat beragama	60 % 60 % 60 %	252.403.000,00	
X	NON URUSAN			105.890.000,00	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			105.890.000,00	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Presentase urusan pemerintahan yang efektif dan efisien Presentase	100 %	105.890.000,00	



	DAERAH KABUPATEN/KOTA	urusan pemerintahan yang efektif dan efisien	100 %		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparat distrik dan Kelurahan yang mengikuti pelatihan / diklat peningkatan kapasitas	60 %	105.890.000,00	
DISTRIK KARAS				4.791.617.128,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			4.791.617.128,00	
7.01	KECAMATAN			4.791.617.128,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100 %	4.791.617.128,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		60 %	3.079.673.404,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 %	150.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Presentase telaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 2. Presentase terbayarnya penyediaan jasa urusan pemerintahan daerah 3. Presentase terlaksananya penunjang kegiatan administrasi umum perangkat daerah	60 % 60 % 60 %	670.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	216.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	185.000.000,00	
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	60 %	115.943.724,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	200.000.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase K Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan oordinasi	60 %	200.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERLAKSANANYA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60 %	100.000.000,00	
X	NON URUSAN			75.000.000,00	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			75.000.000,00	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	75.000.000,00	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 %	75.000.000,00	
DISTRIK FAKFAK BARAT				480.967.479,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			480.967.478,00	
7.01	KECAMATAN			480.967.478,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Prosentase Dokumen Perencanaan, laporan Kinerja dan laporan Keuangan yang tepat 2. Prosentase Dokumen Perencanaan, laporan Kinerja dan laporan Keuangan yang tepat	100 % 100 %	1.854.905.150,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 2. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 % 1 Tahun	20.000.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Yang tercukup (PDH, Batik, Olah Raga)	60 %	111.387.787,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan kantor yang terpenuhi	60 %	480.967.462,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Pelayanan yang terpenuhi 2. Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 % 1 Tahun	448.271.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1. Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	60 %	325.000.000,00	



	Pemerintahan Daerah	2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Penataan Organisasi	1 Tahun	45.000.000,00	
DISTRIK KOKAS				6.303.079.233,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			6.303.079.233,00	
7.01	KECAMATAN			6.303.079.233,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	5.479.079.233,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3. Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 % 60 % 100 %	3.802.079.233,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	60 % 60 % 60 %	207.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu 2. Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Dan Kualitas Bangunan Kantor 4. Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah tangga 5. Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	60 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	300.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya 2. Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3. Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan 4. Terlaksananya Pengadaan Meubeler	100 % 100 % 100 % 100 %	188.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 % 100 %	982.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60 %	700.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2. Terlaksananya Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	60 % 60 %	100.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	60 %	600.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. PRESENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 2. PERSENTASE PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 % 100 %	124.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 2. Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 % 100 %	124.000.000,00	



DISTRIK TOMAGE				5.285.697.500,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			5.285.697.500,00	
7.01	KECAMATAN			5.285.697.500,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	4.169.697.500,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah	Persentase Pencemaran Pengangguran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 %	45.500.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 %	1.676.397.500,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	165.500.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 %	844.200.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 %	932.500.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	505.600.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	230.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60 %	230.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 2. PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 % 100 %	170.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Tahun	170.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	716.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60 %	716.000.000,00	
DISTRIK FAKFAK TIMUR TENGAH				4.625.048.217,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			4.625.048.217,00	
7.01	KECAMATAN			4.625.048.217,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60 %	3.681.442.828,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 %	4.809.441,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 %	2.352.860.491,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 %	125.635.310,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 %	473.948.178,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 %	239.189.408,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	468.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	17.000.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60 %	175.000.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60 %	75.000.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60 %	100.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60 %	268.605.389,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60 %	208.605.389,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	60 %	60.000.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	60 %	65.000.000,00	



	KETERTIBAN UMUM	UMUM			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60 %	50.000.000,00	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60 %	15.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60 %	270.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60 %	270.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60 %	155.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60 %	155.000.000,00	
X	NON URUSAN			10.000.000,00	
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			10.000.000,00	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60 %	10.000.000,00	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 %	10.000.000,00	
DISTRIK FURWAGI				3.893.020.361,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			3.893.020.361,00	
7.01	KECAMATAN			3.893.020.361,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Presentase Dokumen Perencanaan, laporan Kinerja dan laporan Keuangan yang tepat	100 %	3.493.020.361,00	
		2. Presentase Dokumen Perencanaan, laporan Kinerja dan laporan Keuangan yang tepat	100 %		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Terlaksananya Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	60 %	1.985.871.361,00	
		2. Jumlah laporan Keuangan yang disusun	60 %		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Jumlah Pakaian Dinas Yang tersedia (PDH, Batik, Olah Raga)	60 %	245.200.000,00	
		2. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal dan pelatihan	60 %		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah Barang Cetak dan Pengggandaan yang terpenuhi	60 %	407.000.000,00	
		2. Jumlah Komponen Listrik yang terpenuhi	60 %		
		3. Jumlah Peralatan kantor yang terpenuhi	60 %		
		4. Jumlah Surat Menyurat yang terpenuhi	60 %		
		5. Jumlah Alat Tulis kantor dan BBM yang terpenuhi	60 %		
		6. Gedung yang disewa oleh distrik untuk kantor dan rumah tinggal untuk pegawai	60 %		
		7. Jumlah kegiatan yang dikoordinasi	60 %		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang terpenuhi	40%	374.399.000,00	
		Jumlah Meubel terpenuhi	60%		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan yang terpenuhi	60%	410.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	60%	20.550.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Prosentase Kegiatan Pelayanan Publik	100%	200.000.000,00	
		2. Prosentase Kegiatan Pelayanan Publik	100%		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase terlaksananya Kegiatan penyelenggaraan pemerintah	60%	150.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			50.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	100%	100.000.000,00	



7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan Tercapainya Stabilitas Keamanan	60%	100.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase kegiatan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100%	100.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Presentase Jumlah Desa yang difasilitasi 2. Presentase terlaksananya kegiatan Fasilitasi pemelihan kepala desa	60% 60%	100.000.000,00	
DISTRIK BOMBERAY				4.780.000.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			4.780.000.000,00	
7.01	KECAMATAN			4.780.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60 %	4.030.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 %	1.928.402.199,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 %	415.597.801,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 %	400.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %	600.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	236.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	450.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60 %	500.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60 %	500.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	150.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60 %	100.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60 %	100.000.000,00	
DISTRIK FAKFAK TIMUR				4.355.704.300,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			4.355.704.300,00	
7.01	KECAMATAN			4.355.704.300,00	
7.01.01	PROGRAM PENINJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60 %	4.355.704.300,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 %	2.173.745.169,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 %	522.627.957,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 %	1.102.332.485,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	216.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	41.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN AMSYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60 %	129.881.369,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60 %	129.881.369,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	99.999.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60 %	99.999.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60 %	70.118.320,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60 %	70.118.320,00	



DISTRIK KRAMONGMONGGA					3.595.275.910,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.595.275.910,00	
7.01	KECAMATAN				3.595.275.910,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%		3.255.275.910,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Asn	100%		2.585.246.775,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2. Persentase ANS yang mengikuti Bimtek	60 % 0 Orang		0,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	60%		231.729.135,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	60%		100.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		224.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%		34.300.000,00	
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	60%		80.000.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%		100.000.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60%		100.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60%		120.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60%		120.000.000,00	
7.01.05	ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah umum 2. Prosentase Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah umum 3. Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah umum 4. Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintah umum	100 % 100 % 100 % 100 %		100.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Nasional dalam Rangka terlaksananya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Terwujudnya Kerukunan Antar Suku dan Intra suku, Umat Bearagama, Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 % 60 %		100.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%		20.000.000,00	
DISTRIK KAYAUNI					4.281.635.080,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				4.110.586.856,00	
7.01	KECAMATAN				4.110.586.856,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		3.539.656.931,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksana Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	60%		210.710.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji & Tunjangan	60%		1.878.146.931,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	60%		232.500.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	60%		55.800.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun		344.500.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		738.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%		80.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan masyarakat kampung	60%		305.929.925,00	



7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60%	305.929.925,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase terlaksananya kegiatan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah umum di tingkat distrik	100%	115.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60%	115.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintah kampung	100%	150.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Tahun	150.000.000,00	
	NON URUSAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	171.048.224,00	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	60%	171.048.224,00	
DISTRIK FAKFAK TENGAH				9.068.106.815,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			8.073.106.815,00	
7.01	KECAMATAN			8.073.106.815,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90%	6.419.016.815,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	3.950.016.815,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Admiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	94.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	80%	718.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah	90%	406.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyedia jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	1.173.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang milik Daerah	90%	78.000.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	60%	60.000.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Presentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 2. Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90% 60%	60.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	60%	799.090.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60%	290.440.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	60%	508.650.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Terlaksananya kegiatan program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	90%	80.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertibsn Umum	90%	80.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan urusan Pemerintan Umum	90%	140.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerha	90%	140.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	90%	575.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase fasilitasi,rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90%	575.000.000,00	
	NON URUSAN			995.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			995.000.000,00	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		90%	995.000.000,00	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	20.000.000,00	



01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	80%	75.000.000,00	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah	90%	900.000.000,00	
DISTRIK TELUK PATIPI				4.300.923.729,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			4.300.923.729,00	
7.01	KECAMATAN			4.300.923.729,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	60 %	3.905.924.029,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 %	2.986.250.002,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Aparatur Distrik	60%	93.689.794,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	60%	266.600.895,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60%	370.000.000,00	
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	60%	101.359.338,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60%	110.999.700,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60%	110.999.700,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60%	100.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa 2. Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	60% 60%	184.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi Dan Koordinasi	60%	184.000.000,00	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				94.944.030.107,00	
8	UNSUR PEMERINTAH UMUM			94.944.030.107,00	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			94.944.030.107,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60 %	5.750.440.179,00	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 %	35.834.400,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 %	3.458.097.590,00	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 %	44.700.000,00	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	60 %	855.233.025,00	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 %	809.210.649,00	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 %	352.936.000,00	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	60 %	194.428.515,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE MASYARAKAT YANG PAHAM TERHADAP IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN	100 %	4.450.589.869,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantaopan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	60 %	4.450.589.869,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	unvined	83.355.897.184,00	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	60 %	83.355.897.184,00	



	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	60 %	164.126.969,00	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	60 %	164.126.969,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	100 %	305.971.428,00	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	305.971.428,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE PENANGANAN MASALAH KONFLIK SOSIAL YANG DIFASILITASI DI KABUPATEN FAKFAK	60 %	917.004.478,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	60 %	917.004.478,00	

Sumber Data RKPD Kabupaten Fakfak tahun 2024

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota.

b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Fakfak Tahun 2024 merujuk pada :

1. Perda Kabupaten Fakfak Nomor 15 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026.
2. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 51 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2024.
3. KUA PPAS Tahun 2024
4. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak nomor 7 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak nomor 2 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Fakfak nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Fakfak nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Bupati Fakfak Nomor 900.1.2-1 tahun 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Bupati Fakfak Nomor 900.1.1-334 tahun 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Bupati Fakfak nomor : 500-346 Tahun 2024 tentang Tim Penerapan SPM Kabupaten Fakfak tahun 2024.

c. Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang Dituangkan Dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah

Berdasarkan kebijakan umum Daerah Kabupaten Fakfak dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 terlihat pada arah kebijakan Daerah Kabupaten Fakfak sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel 1.11
Kebijakan Umum Daerah Dalam Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Yang Dituangkan Dalam RPJMD Kabupaten Fakfak 2021-2026

SASARAN		STRATEGI		PERNYATAAN ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	8	9
S1	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal	S1.1	Perluasan penyelenggaraan dan Kualitas Pembelajaran Anak Usia Dini	Pengembangan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, teknologi dan perangkat pendukung penyelenggaraan pendidikan PAUD		√	√	√	√
				Peningkatan kuantitas dan kapasitas guru TK dan tutor PAUD		√	√	√	√
		S1.2	Peningkatan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun	Pengembangan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan perangkat pendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun		√	√	√	√
				Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga pendidik SD dan SMP	√	√	√	√	√
				Peningkatan Manajemen Pendidikan Dasar	√	√	√	√	√
				Penyediaan Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Miskin			√	√	√
				Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah unggulan di tingkat SD dan SMP				√	√
				Pembinaan peningkatan Mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan spritual dan budi pekerti yang baik	√	√	√	√	√
		S1.3	Peningkatan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan Menengah	Pengembangan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan perangkat pendukung penyelenggaraan pendidikan menengah			√	√	√
				Peningkatan kuantitas dan kompetensi guru pendidikan menengah dan kejuruan			√	√	√
				Peningkatan Manajemen Pendidikan menengah			√	√	
				Penyediaan Bantuan Pendidikan Bagi Siswa Miskin		√	√	√	√
				Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa		√	√	√	√
				Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah unggulan pendidikan menengah dan Kejuruan		√	√	√	√
				Pengembangan Sekolah Kejuruan Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah					
		S1.4	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Semua Jenjang Pendidikan	Peningkatan Sertifikasi Tenaga Pengajar di semua jenjang pendidikan		√	√	√	√
				Pemberian Insentif Tenaga Pengajar	√	√	√	√	√
		S1.5	Peningkatan substansi dan metode pembelajaran pada semua jenjang pendidikan	Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan			√	√	√
				Peningkatan cakupan Akreditasi Sekolah	√	√	√	√	√
		S1.6	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan non formal	Peningkatan Kerjasama Bagi Peningkatan Kualitas Pemberlajaran Siswa	√	√	√	√	√
				Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal			√	√	√
S2	Meningkatnya budaya literasi dalam masyarakat	S2.1	Meningkatkan budaya baca dan literasi dalam masyarakat	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan			√	√	√
				Pengembangan perpustakaan daerah				√	
				Pembinaan budaya baca				√	√
				Penyediaan materi baca dan literasi				√	√
				Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah			√	√	√



SASARAN		STRATEGI		PERNYATAAN ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	8	9
S3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	S3.1	Peningkatan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola fasilitas kesehatan daerah	Peningkatan akses dan Kualitas Pelayanan RSUD dan Puskesmas					
				Peningkatan sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas	√	√	√	√	√
				Pembangunan sarana, Prasarana dan fasilitas Kesehatan	√	√	√	√	√
				Pengembangan SDM kesehatan	√	√	√	√	√
				Pembangunan Rumah Sakit Umum baru dan Peningkatan status dari tipe C ke tipe B sebagai Rumah Sakit Umum rujukan regional;	√	√	√	√	√
				Pembentukan BLU (Badan Layanan Umum) pada Rumah Sakit Umum;					
		S3.2	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Pemberian imunisasi bayi dan balita			√	√	
				Peningkatan Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu		√	√	√	√
				Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi Ibu Hamil	√	√	√	√	√
				Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI	√	√	√	√	√
				Pelacakan dan Penanganan Bayi dan Balita Beresiko	√	√	√	√	√
				Pemberian Makanan tambahan dan gizi bagi balita	√	√	√	√	√
		S3.4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat	Pengadaan Alat Permainan Edukasi/APE	√	√	√	√	√
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	√	√	√	√	√
				Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin		√	√	√	√
		S3.5	Pengembangan Upaya untuk mengatasi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, serta peningkatan kondisi Kesehatan lingkungan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi		√	√	√	√
				Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	√	√	√	√	
				Peningkatan Sosialisasi Pencegahan Penyakit Menular		√	√	√	√
				Peningkatan Kesehatan Lingkungan		√	√	√	√
		S3.6	Peningkatan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan Puskesmas	Peningkatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat		√			
				Pengembangan sarana prasarana dan Kualitas Pelayanan Puskesmas dan PUSTU	√	√	√	√	√
		S3.7	Peningkatan ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan	Perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan	√	√			
				Melaksanakan pengawasan, dan ketersediaan farmasi (stok obat) serta penyediaan makanan tambahan (PMT) bergizi khususnya bagi anak usia sekolah;		√	√	√	√
				Peningkatan ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan"		√	√	√	√
				Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan					
S4	Percepatan penanganan dan pencegahan stunting	S4.1	Pengembangan sinergisitas multisektor dalam penanganan dan pencegahan stunting	Pengembangan kesehatan Ibu, Anak dan Balita		√	√	√	
				Peningkatan gizi dan pangan masyarakat b		√	√	√	√
				Peningkatan sanitasi masyarakat		√	√	√	√
				Sanitasi sekolah		√	√	√	√
				Peningkatan Bantuan sosial Pangan dan Gizi masyarakat		√	√	√	√
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan stunting	√	√	√	√	√
				Peningkatan olahan produksi perikanan untuk peningkatan gizi masyarakat	√	√	√	√	√
				Peningkatan kordinasi perempuan dan PKK dalam penanganan Stunting	√	√	√	√	√
S5	Meningkatnya partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan daerah	S5.1	Fasilitas peningkatan prestasi olah raga dan seni generasi muda	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Seni budaya Daerah	√	√	√	√	√
				Peningkatan Pembinaan Prestasi Pemuda dan Olahraga		√	√	√	√
		S5.2	Pengembangan partisipasi dan peran aktif pemuda	Memfasilitasi keikutsertaan pemuda dalam event event lokal, regional dan nasional	√	√	√	√	√
				Penyuluhan dan sosialisasi tentang partisipasi pemuda dalam	√	√	√	√	



SASARAN		STRATEGI		PERNYATAAN ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	8	9
			dalam pembangunan daerah	pembangunan					
		S5.3	Peningkatan Kualitas Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga	Peyediaan Data Potensi Kepemudaan			√	√	√
				Fasilitasi Pembentukan Organisasi Kepemudaan			√	√	√
S6	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	S6.1	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah	Peningkatan pembinaan kelembagaan jender dan perlindungan anak			√	√	√
				Fasilitasi keikutsertaan kaum perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah	√	√	√	√	√
				Peningkatan Sosialisasi peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan daerah			√	√	√
				Pemberdayaan ekonomi kaum perempuan			√	√	√
				Fasilitasi kepemimpinan perempuan				√	√
S7	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	S7.1	Pengembangan Upaya bagi sektor-sektor ekonomi produktif dengan pendekatan kolaboratif	Gerakan Membangun Perekonomian Masyarakat	√	√	√	√	√
				Peningkatan Penyaluran Dan Penempatan Tenaga Kerja			√	√	√
				Pembinaan tenaga kerja			√	√	√
				Fasilitasi hubungan industrial			√	√	√
S8	Meningkatnya minat dan laju realisasi investasi di bidang strategis daerah	S8.1	Penguatan Implementasi sistem informasi penanaman modal	Gerakan Pembangunan Masyarakat Fakfak Sejahtera	√	√	√	√	√
				Penigkatan promosi investasi		√	√	√	√
				Pengembangan pelayanan perijinan yang mudah dan tidak berbelit belit		√	√	√	√
S9	Meningkatnya pengembangan sektor-sektor strategis daerah di bidang Pariwisata, Pertanian dan Kelautan	S9.1	Meningkatkan aktualisasi potensi pariwisata Kabupaten Fakfak	Pengembangan Pariwisata Terintegrasi Dan Terpadu (Fakfak Berwisata)	√	√	√	√	√
				Peningkatan promosi pariwisata		√	√	√	√
				Peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan pariwisata		√	√	√	√
				Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata	√	√	√	√	√
		S9.2	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani	√	√	√	√	√
				Pengembangan aliansi strategis (jaringan) kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperkuat posisi petani dan nelayan dengan model kerjasama yang menguntungkan;	√	√	√	√	√
				Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi sektor pertanian, pemanfaatan air tadah hujan dengan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan;	√	√	√	√	√
				Pemberdayaan potensi agribisnis melalui optimalisasi perencanaan dan pendayagunaan potensi pertanian dalam arti luas, yaitu meliputi Perikanan Kelautan, pertanian, perkebunan, dan peternakan melalui industrialisasi kreatif lokal kampung;	√	√	√	√	√
				Pengembangan perwilayaan komoditi pertanian maupun perkebunan	√	√	√	√	√
				Pemberian bantuan saprodi pertanian	√	√	√	√	√
				Fasilitasi implementasi teknologi pertanian			√	√	√
		S9.3	Peningkatan produktivitas Peternakan	Peningkatan Kapasitas SDM Peternakan			√	√	√
				Fasilitasi implementasi teknologi Peternakan			√		
				Penanggulangan penyakit hewan			√	√	
				Peningkatan penyuluhan pertanian dan peternakan				√	√
		S9.4	Peningkatan ketahanan pangan berbasis panganekaragaman komoditas pangan lokal	Pengembangan komoditas pangan lokal				√	√
				Pengembangan Lumbung Pangan Kampung				√	
				Peningkatan monitoring wilayah rawan pangan	√	√	√	√	
				Penyuluhan ketahanan pangan			√	√	√
S10	Meningkatnya ketersediaan dan distribusi barang dan jasa daerah	S10.1	peningkatan nilai dan jumlah perdagangan produk lokal masyarakat	Peningkatan promosi perdagangan			√	√	√
				Pembinaan kelompok usaha kecil bidang perdagangan			√	√	√
				Peningkatan pemasaran hasil komoditas unggulan			√	√	√



SASARAN		STRATEGI		PERNYATAAN ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	8	9
				Peningkatan perlindungan konsumen			√		
				Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	√	√	√	√	
S11	Meningkatnya pemberdayaan koperasi dan UMKM	S11.1	Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM	Pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi			√	√	√
				Fasilitasi kelembagaan koperasi			√	√	√
				Peningkatan kapasitas produksi dan Pemasaran hasil produksi unggulan daerah	√	√	√	√	√
				Peningkatan Tertib administrasi pelaporan keuangan Daerah		√	√	√	√
S12	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	S12.1	Peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah, sistem akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dengan arah kebijakan	Peningkatan manajemen aset daerah		√	√	√	√
				Peningkatan disiplin dan kualitas penyusunan APBD dan Perubahan APBD	√	√	√	√	√
				Peningkatan Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah	√	√	√	√	√
				Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah	√	√	√	√	√
S13	Meningkatnya kualitas Perencanaan pembangunan yang terintegrasi baik dari aspek sektor maupun spasial	S13.1	Peningkatan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, baik dalam tataran spasial, sektoral dan antar organisasi perangkat daerah	Peningkatan sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	√	√	√	√	√
				Peningkatan Perencanaan Pembangunan di bidang pembangunan ekonomi daerah	√	√	√	√	√
				Peningkatan Perencanaan Pembangunan di bidang pembangunan sosial budaya	√	√	√	√	√
				Peningkatan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan DPRD	√	√	√	√	√
S14	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Perangkat Daerah	S14.1	Peningkatan kualitas legistasi, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah	Pengembangan komunikasi intensif dan setara dengan DPRD	√	√	√	√	√
				Peningkatan Kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan	√	√	√	√	√
				Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√
				Implementasi SPIP			√	√	
S15	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	S15.1	Pengembangan upaya penguatan sistem akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	pengawasan internal secara reguler dan khusus				√	√
				Tindak lanjut hasil pemeriksaan				√	√
				Gelar pengawasan				√	√
				Peningkatan kapasitas SDM aparatur pengawasan				√	√
S16	Meningkatnya kompetensi aparatur	S16.1	Peningkatan manajemen dan kapasitas ASN	Peningkatan kapasitas SDM aparatur secara struktural dan fungsional	√	√	√	√	√
				Analisis Jabatan					
				Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran Disiplin PNS		√	√	√	
				Seleksi Penerimaan Calon PNS			√	√	√
S17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung	S17.1	Penguatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kampung	Monitoring Kepegawaian			√	√	√
				Pemberian bantuan stimulan pembangunan kampung			√	√	√
				Peningkatan Pemberdayaan Pemerintahan Kampung dalam bidang pemerintahan kampung, meliputi perencanaan penganggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban			√	√	√
				Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan kampung		√	√	√	√
S18	Meningkatnya sinergitas peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	S18.1	Peningkatan taraf sosial dan ekonomi masyarakat kampung	Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial	√	√	√	√	√
S19	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	S19.1	Peningkatan cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Yang Prima	Pemantapan kelembagaan ekonomi masyarakat kampung		√	√	√	√
				Pembangunan Sistem Pendaftaran Penduduk		√	√	√	√
				Pelayanan Kependudukan Jemput bola		√	√	√	√
				Pendataan dan penyusunan data base kependudukan		√	√	√	√
S20	Meningkatnya sistem informasi pemerintahan dan pembangunan berbasis kampung	S20.1	Peningkatan ketersediaan data statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	Pengelolaan aplikasi sistem administrasi kependudukan		√	√	√	√
				Peningkatan Pengembangan data statistik pembangunan daerah			√	√	√
				Peningkatan Publikasi data statistik pembangunan daerah			√	√	√
				Penyediaan data terpilah OAP			√	√	√
				Peningkatan SAIK dan database berbasis kampung			√	√	√



SASARAN		STRATEGI		PERNYATAAN ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	8	9
S21	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	S21.1	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan ideologi negara	Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan			√	√	√
				Peningkatan kerjasama dan kemitraaan untuk menciptakan harmonisasi kehidupan masyarakat	√	√	√	√	√
				Peningkatan kondunsivitas keamanan dan ketertiban Lingkungan	√	√	√	√	√
		S21.2	Peningkatan pemberdayaan potensi kenyamanan dan ketertiban umum	Peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia Satpol PP	√	√	√	√	√
				Peningkatan operasional pengamanan lingkungan	√	√	√	√	√
				Pemberdayaan potensi keamanan lingkungan masyarakat	√	√	√	√	√
S22	Terciptanya konektivitas antar dan inter wilayah	S22.1	Percepatan ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan antar kawasan	√	√	√	√	√
				Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melaui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	√	√	√	√	√
				Pengembangan infrastruktur dasar pedesaan	√	√	√	√	√
				Peningkatan Interkonektifitas Antar Wilayah pengembangan Reklamasi	√	√	√	√	√
		S22.2	Pengembangan sarana infrastruktur pengairan yang memadai	Pembangunan Jaringan Air Bersih (Fakfak Banjir)		√	√	√	√
				Peningkatan Normalisasi Saluran Sungai		√	√	√	√
				Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran/ drainase dan Gorong-gorong	√	√	√	√	√
				Pembangunan jaringan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	√	√	√	√	√
S23	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni yang Berkelanjutan	S23.1	Peningkatan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Peningkatan Pengembangan sarana dan prasarana pemukiman	√	√	√	√	√
				Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas pemukiman	√	√	√	√	√
				Peningkatan bantuan pembangunan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat	√	√	√	√	√
		S23.2	Peningkatan ketersediaan sumber daya listrik untuk mendukung aktivitas masyarakat	Pengembangan Kemitraan dengan perusahaan-perusahaan dalam penyediaan energi dan kelistrikan	√	√	√	√	√
				Pengembangan energi listrik tenaga surya di Kampung	√	√	√	√	√
				Penyediaan Utilitas (Fakfak Terang)	√	√	√	√	√
S24	Meningkatnya Ketersediaan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah	S24.1	Percepatan ketersediaan dan cakupan pelayanan informasi dan telekomunikasi	Pembangunan Tower seluler daan prasaran telekomunikasi lainnya sampai ke kampung-kampung	√	√	√	√	√
				Peningatan kapasitas SDM informasi dan telekomunikasi	√	√	√	√	√
				Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengembangan komunikasi dan informatika	√	√	√	√	√
S25	Meningkatnya kesediaan infrastruktur perhubungan dan transportasi antar moda	S25.1	Percepatan ketersediaan infrastruktur perhubungan antar moda guna memperlancar arus orang dan barang dari dan ke Kabupaten Fakfak	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	√	√	√	√	√
				Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan Darat	√	√	√	√	√
				Pembangunan dan Pemeliharaan Bandara	√	√	√	√	√
				Penyediaan fasilitas jalan lainnya	√	√	√	√	√
				Peningkatan perhubungan laut	√	√	√	√	√
				Lanjutan pembangunan pelabuhan laut dan perluasan bandar udara	√	√	√	√	√



SASARAN		STRATEGI		PERNYATAAN ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
S26	Meningkatnya peran kelembagaan adat dan budaya	S26.1	Peningkatan Fasilitas aktivitas keagamaan dan kebudayaan di tengah masyarakat	Nilai Adat Dan Budaya (Fakfak Berbudaya)	√	√	√	√	√
				Pembinaan adat dan budaya masyarakat					
				Peningkatan event kebudayaan untuk mendukung pelestarian nilai adat dan budaya	√	√	√	√	√
				Pembinaan dan Pengembangan mental spiritual bidang keagamaan bagi generasi muda, PNS dan Masyarakat Umum	√	√	√	√	√
				Peringatan hari-hari besar keagamaan; Peningkatan kapasitas LPTQ, pesparawi dan pesparani dan lainnya;	√	√	√	√	√
				Penguatan nilai-nilai keagamaan yang berbasis sekolah pada semua tingkatan baik Negeri maupun Swasta melalui Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tambahan pelajaran agama / muatan lokal	√	√	√	√	√
S27	Meningkatnya upaya perlindungan sosial dan afirmasi OAP	S27.1	Peningkatan Afirmasi dan Perlindungan OAP	Pemberiaan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kemasyaratan			√	√	√
				Afirmasi dan perlindungan sosial bagi OAP			√	√	√
				Sosialisasi perlindungan dan afirmasi OAP			√	√	√
S28	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai adat dan budaya lokal	S28.1	Fasilitasi aktualisasi potensi sumber daya adat dan budaya Fakfak	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah		√	√	√	√
				Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya		√	√	√	√
				Pemberdayaan masyarakat adat		√	√	√	√
				Pembentukan desa adat		√	√	√	√
				Penguatan nilai-nilai adat budaya yang berbasis sekolah pada semua tingkatan baik Negeri maupun Swasta melalui Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tambahan pelajaran adat budaya/ muatan lokal		√	√	√	√
S29	Tercapainya pemanfaatan kawasan hutan lindung minimal sebesar 60 persen pada tahun 2025	S29.1	Meningkatkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Struktur Tata Ruang yang terjaga	Pelaksanaan peraturan daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan;	√	√	√	√	
				Pemanfaatan kawasan hutan lindung minimal 60 persen pada tahun 2025;	√	√	√	√	
				Pemanfaatan hutan Fakfak dari aspek produksi yang tidak mengganggu konservasi;	√	√	√	√	
S30	Terwujudnya struktur ruang serta pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan RTRW Provinsi maupun daerah	S30.1	Pemantapan pengembangan wilayah berbasis tata ruang berkelanjutan	Penguatan pemanfaatan struktur ruang	√	√	√	√	√
				Fakfak dan pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka pengembangan kawasan andalan	√	√	√	√	√
				Penguatan pembangunan yang menjaga keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial;	√	√	√	√	√
				Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang mengedepankan kepentingan masyarakat lokal;	√	√	√	√	√
				Penguatan gerakan sosial lintas pemangku kepentingan dalam LH yang lestari (aliansi strategis dari masyarakat, dunia usaha, pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga penelitian);		√	√	√	√
S31	Terlaksananya pengelolaan lingkungan dengan pendekatan DAL (Daerah Aliran Longsor) dalam rangka mengurangi tingkat kekritisn DAL	S31.1	Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan pendekatan DAL (Daerah Aliran Longsor) dalam rangka mengurangi tingkat kekritisn DAL	Pengelolaan lingkungan dengan pendekatan DAL (Daerah Aliran Longsor) dalam rangka mengurangi tingkat kekritisn DAL;		√	√	√	√
				Sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat di seekitaran wilayah aliran sungai	√	√	√	√	√
				Peningkatan kerjasama multisektor penanganan wilayah DAL	√	√	√	√	√
S32	Meningkatnya pelaksanaan kualitas manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana alam	S32.1	Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam dan non alam	Penguatan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana alam, bencana non-alam, pandemi, dan epidemi penyakit;	√			√	√
				Penguatan kapasitas masyarakat menuju desa mandiri tangguh bencana;	√	√	√	√	√
				Pengurangan potensi risiko bencana secara komprehensif			√	√	√

Sumber Data RPJMD Kabupaten Fakfak 2021-2026

d. Gambaran Orientasi dan Komitmen Yang Ditetapkan Pemerintahan Daerah Selama Satu Tahun Dalam Rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Yang Dituangkan Dalam Kebijakan Umum Anggaran.

Berdasarkan kebijakan Umum Anggaran yang tertuang dalam KUA PPAS Kabupaten Fakfak tahun 2024, maka dapat terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Fakfak berorientasi dalam penerapan SPM dan berkomitmen dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Fakfak. Hal ini tertuang pada Kebijakan Umum Anggaran yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 1.12
Kebijakan Umum Anggaran terkait dengan Penerapan SPM Pada KUA PPAS
Kabupaten Fakfak Tahun 2024

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN			LOKASI KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)		
						OUTPUT KEGIATAN	TARGET				SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
URUSAN PENDIDIKAN												
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						137.267.994.523,00	146.455.549.377,00
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						49.967017.246,00	58.120.097.083,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						45.515.516.649,00	28.156.959.734,00
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						9.627.522.926,00	12.177.280.568,00
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan						2.071.425.422,00	2.071.425.422,00
URUSAN KESEHATAN												
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	60%	60%			84.889.599.165,00	93.868.480.633,35
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	60%	60%			73.725.224.161,00	79.396.683.411,35
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	677 orang	677 orang	10 Puskesmas		144.476.000,00	144.476.000,00
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	532 orang	532 orang	8 Puskesmas		108.465.000,00	108.465.000,00
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			Kab. Fakfak, Pariwari, Semua Kelurahan/Desa		16.620000,00	16.620000,00
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50 orang	50 orang	Kab. Fakfak, semua Kecamatan, Semua Kel/desa		448.955.645,00	448.955.645,00
c	02	02	2.02	0005	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.919 orang	10.919 orang	10 Puskesmas		703.802.420,00	703.802.420,00
1	02	02	2.02	0006	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	1	Kab.Fakfak, Pariwari, Semua Kel/Desa		125.838.000,00	125.838.000,00
1	02	02	2.02		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	0	Kab.Fakfak, Pariwari, Semua Kel/Desa		249.600.720,00	249.600.720,00



KODE					PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN			LOKASI KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP)		
						OUTPUT KEGIATAN	TARGET					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
URUSAN PEKERJAAN UMUM												
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	60%	60%		1.319.927.925,00	1.319.927.925,00	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Fakfak	Persentase Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	60%	60%		1.319.927.925,00	1.319.927.925,00	
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT												
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	60%	60%		4.258.304.470,00	4.258.304.470,00	
URUSAN SOSIAL												
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Program Rehabilitasi Sosial	100%	100%		1.132.518.164,00	4.258.304.470,00	

Sumber Data KUA-PPAS Kabupaten Fakfak Tahun 2024

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA MAKRO	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	70,85	71,52	0,67
2	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	17,84	17,67	0,95
3	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Persen	21,38	20,86	2,43
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Ribu Jiwa	6,52	4,78	26,69
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	1,86*	3,15**	1,29
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	65,47*	69,98**	6,98
7	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)		0,359		NA

Sumber Data BPS Kabupaten Fakfak Tahun 2024

Catatan:

- * Data PDRB dan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 merupakan angka sementara;
- ** Data PDRB dan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 merupakan angka sangat sementara;
- *** Rasio gini tahun 2024 masih dalam proses penghitungan.

Dari tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Fakfak tahun 2024 diatas dapat diuraikan gambaran keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum di Kabupaten Fakfak sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nilai yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui tiga dimensi dasar yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan dan kehidupan layak. IPM Kabupaten Fakfak pada tahun 2023 adalah sebesar 70,85. Sedangkan untuk tahun 2024, IPM Kabupaten Fakfak sebesar 71,52. Hal ini menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Fakfak mengalami kenaikan sebesar 0,67 persen.

2. Jumlah Penduduk Miskin (Angka Kemiskinan)

Berdasarkan data BPS Kabupaten Fakfak, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Fakfak pada tahun 2024 adalah sebesar 17,67 ribu jiwa. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2023 yang sebelumnya sebesar 17,84 ribu jiwa. Penurunan sebesar 0,95 persen atau 170 jiwa menunjukkan bahwa pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Fakfak sudah membaik dari tahun sebelumnya.

3. Persentase Penduduk Miskin (P0)

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Fakfak pada tahun 2023 sebesar 21,38 persen sedangkan pada tahun 2024 sebesar 20,86 persen atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,43 persen. Hal ini selaras dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang menunjukkan pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Fakfak tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mengetahui kondisi pengangguran di Kabupaten Fakfak dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka. Angka tingkat pengangguran terbuka di dapat dari persentase penduduk yang menganggur dibagi jumlah penduduk angkatan kerja (15-64 tahun). Pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Fakfak adalah sebesar 4,78 ribu jiwa. Sedangkan ditahun 2023 sebesar 6,52 ribu jiwa. Angka ini mengalami penurunan sebesar 26,69 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa proporsi antara penduduk yang menganggur dengan penduduk usia angkatan kerja semakin baik di tahun 2024.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu wilayah secara berkesinambungan selama jangka waktu tertentu. Untuk Kabupaten Fakfak pada tahun 2023 memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 1,86 persen. Sementara untuk tahun 2024 Kabupaten Fakfak memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 3,15 persen. Artinya Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Fakfak mengalami kenaikan sebesar 1,29 persen.

6. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tertentu dan telah dibagi dengan jumlah penduduk pada wilayah tersebut. PDRB per kapita Kabupaten Fakfak pada tahun 2023 adalah sebesar 65,47 juta rupiah. Sementara pada tahun 2024 PDRB per kapita Kabupaten Fakfak berada di angka 69,98 juta rupiah. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan pendapatan per penduduk pada tahun 2024 sebesar 6,98 persen.

7. Gini ratio

Gini ratio adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pengeluaran yang ada disebuah wilayah. Nilai gini ratio berkisar antara nilai 0 (nol) dan 1 (satu). Semakin dekat nilai gini ratio dengan angka nol menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata pada wilayah tersebut. Pada tahun 2024, nilai gini ratio di Kabupaten Fakfak belum tersedia datanya (*Not Available*), sedangkan pada tahun 2023 sebesar 0,359

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK) Outcome merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci Hasil maka Pemerintahan Daerah dapat mengukur capaian kinerja. Capaian kinerja pemerintah daerah urusan pemerintahan berdasarkan indikator kinerja kunci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Berdasarkan
Indikator Kunci Hasil (Outcome) Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	50,637105	Didikpora	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	81,7648923	Didikpora	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	66,0241751	Didikpora	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang & nbsp; berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	17,3594132	Didikpora	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2.	KESEHATAN	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,3031772	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	81,1918063	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	81,0961969	Dinas Kesehatan	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	80,7280514	Dinas Kesehatan	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	60,9360411	Dinas Kesehatan	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85,2354195	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	19,9993227	Dinas Kesehatan	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	49,9636892	Dinas Kesehatan	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85,6580427	Dinas Kesehatan	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40,0621118	Dinas Kesehatan	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	70,5882353	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	50,9584665	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	75,5407654	Dinas Kesehatan	
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	48,6758755	Dinas PUPRP2KP	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	4,204204	Dinas PUPRP2KP	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	13,6363636	Dinas PUPRP2KP	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	67,4912892	Dinas PUPRP2KP	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	77,6443849	Dinas PUPRP2KP	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	39,0612625	Dinas PUPRP2KP	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	39,0612625	Dinas PUPRP2KP	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	Dinas PUPRP2KP	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	89,9328859	Dinas PUPRP2KP	
4.	PERUMAHAN RAKYAT	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	Dinas PUPRP2KP	
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas PUPRP2KP	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0,3312136	Dinas PUPRP2KP	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,2913923	Dinas PUPRP2KP	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0	Dinas PUPRP2KP	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase gangguan transtibum yang dapat diselesaikan	100	Satpol PP	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	0	Satpol PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	14,4958131	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	0	Satpol PP/BPBD	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	0	Satpol PP/BPBD	
6.	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100	Dinas Sosial	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	0	Dinas Sosial	
7.	TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	50	Disnakertrans	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	35,3389831	Disnakertrans	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	157,516949	BPS/Disnakertrans	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100	Disnakertrans	
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	4,2975207	Disnakertrans	
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,1674961	DP3AP2KB	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100	DP3AP2KB	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	50,7132935	DP3AP2KB	
9.	PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	100	Dinas Pertanian	
10.	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	DLHP/Kantor Pertanahan	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100	DLHP	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	0	DLHP	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	0	DLHP	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	DLHP	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	DLHP	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	85,87	DLHP	
11.	LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	27,2702951	DLHP	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	53,8461538	DLHP	
		Perekaman KTP Elektronik	94,1655206	Dukcapil	
12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	51,7743755	Dukcapil	
		Kepemilikan akta kelahiran	89,775076	Dukcapil	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	8,6956522	Dukcapil	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0	DPMK	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0	DPMK	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	0	DP3AP2KB	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	81,9303338	DP3AP2KB	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	3,8316401	DP3AP2KB	
15	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas kabupaten/kota	29,1	DinasPerhubungan	
		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,36	Dinas Perhubungan	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	60,8695652	Dinas Kominfo	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	22,2222222	Dinas Kominfo	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	81,4020748	Dinas Kominfo	
17	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	28,125	Koperasi & UKM	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	15,3092468	Koperasi & UKM	
18	PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	180,517819	DPMTSP	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,012592	DISPORA	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1,4011882	DISPORA	
		Peningkatan Prestasi Olahraga	0	DISPORA	
20	STATISTIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	0	Dinas Kominfo	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	0	Dinas Kominfo	
21	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	Dinas Kominfo	
22	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	18,75	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
23	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	86,66	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
24	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dankesejahteraan rakyat	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
25	KELAUTAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	85,9226422	Dinas Perikanan dan Kelautan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
26 .	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan manca negara per kebangsaan	67,2727273	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	43,75	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	
		Tingkat Hunian Akomodasi	18,7169402	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,3022543	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	15,1358445	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	
27 .	PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	57,6123596	Dinas Pertanian	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-28	Dinas Pertanian	
28 .	KEHUTANAN	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga Pemulihan ekosistem pada Tahura Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	100	-	Urusan Kehutanan bukan menjadi kewenangan kabupaten.
29	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0	DPMTSP	
29 .	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	24,1625207	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	100	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	4,0677966	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
30 .	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	0	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi	0	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya didaerah Kabupaten/Kota	0	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	Dinas Perdagangan & Perindustrian	
		Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya Jumlah satuan pemukiman yang dibina	100	-	Urusan Transmigrasi bukan menjadi kewenangan Kab
32 .	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	11,7877545	BPKAD	
		Rasio PAD	1,4595662	BPKAD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	INSPEKTORAT	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	INSPEKTORAT	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	36,1545818	BPKAD	
		Opini Laporan Keuangan	0	BPKAD	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
33	PENGADAAN	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya	0	BARJAS/SETDA	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	4,2128603	BARJAS/SETDA	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	96,5528389	BARJAS/SETDA	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	0	BARJAS/SETDA	
34	KEPEGAWAIAN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	53,2261716	BKPSDM	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2,5681549	BKPSDM	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15,3846154	BKPSDM	
35	MANAJEMEN KEUANGAN	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	9,6129	BPKAD	
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	32,2475	BPKAD	
		Manajemen Aset	80	BPKAD	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,6446208	BPKAD	
36	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	0	BPKAD/KOMINFO	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	0	BPKAD/KOMINFO	

Sumber Data OPD Kabupaten Fakfak Tahun 2023

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Capaian kinerja pemerintah daerah untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan berdasarkan indikator kinerja kunci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kunci Hasil (Outcome) Tahun 2024

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	11,7877545	BPKAD	File data dukung tidak ada
		Rasio PAD	1,4451237	BPKAD	
		Maturnitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	36,0105622	BPKAD	
		Opini Laporan Keuangan	0	Inspektorat	Masih dlm audit hasilnya belum dikeluarkan oleh BPK RI
2.	PENGADAAN	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bag. Pengadaan Barang & Jasa Setda	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	4,2128603	Bag. Pengadaan Barang & Jasa Setda	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	37,6808246	Bag. Pengadaan Barang & Jasa Setda	
		Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1). Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	0	Bag. Pengadaan Barang & Jasa Setda	

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
3.	KEPEGAWAIAN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	53,2261716	BKPSDM	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2,5681549	BKPSDM	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15,3846154	BKPSDM	
4.	MANAJEMEN KEUANGAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	8,2701	BPKAD	File data dkung tidak ada
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	32,3451	BPKAD	
		Assets Management	80	BPKAD	
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	2,6328487	BPKAD	
5.	MANAJEMEN KEUANGAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	0	Dinas Kominfo	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	0	Dinas Kominfo	

Sumber Data OPD Kabupaten Fakfak Tahun 2024

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah menginformasikan capaian keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak pada Tahun 2024 dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Bupati Fakfak pada Tahun 2024 yang termuat pada Pernyataan Perjanjian Kinerja Kabupaten Fakfak Tahun 2024 yang ditanda tangani Bupati Fakfak pada tanggal 8 februari 2024. Informasi capaian akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2024 memuat :

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Fakfak Tahun 2024 mengacu pada RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021–2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, dan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024, serta Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dan APBD-P Tahun 2024 . Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kabupaten Fakfak Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	69,64
2.	Membangun dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Fakfak.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,24 %
		Jumlah Penduduk Miskin / Tingkat Kemiskinan	Jiwa	15.860 Jiwa
3.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN serta menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).	Indeks Reformasi Birokrasi	IRB	B
4.	Meningkatkan aksesibilitas daerah dan kapasitas pelayanan infrastruktur terpadu.	Indeks Kemahalan Konstruksi	IKK	120,00
5.	Meningkatkan keberdayaan, kapasitas, dan melestarikan budaya dalam masyarakat adat.	Tersedianya peraturan daerah sebagai regulasi dalam dinamika kehidupan masyarakat hukum adat	Ada/Tidak Ada	Ada
6.	Menjamin kepastian terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	87,00

Sumber Data Bagian Ortal Setda Kabupaten Fakfak Tahun 2024

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2024 dilaporkan untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai dengan hasil pengukuran Kinerja selama satu tahun. Untuk setiap Pernyataan Kinerja sasaran dimaksud dilakukan analisis Capaian Kinerjanya dengan membandingkan antara realisasi Capaian Kinerja dan target Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024. Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja
Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.	Indeks Pembangunan Manusia	69,64	71,52	Tercapai
2.	Membangun dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Fakfak.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,24 %	3,15**	Tercapai
		Jumlah Penduduk Miskin / Tingkat Kemiskinan	15.860	17.670	Tidak Tercapai
3.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN serta menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).	Indeks Reformasi Birokrasi	B	CC	Tidak Tercapai
4.	Meningkatkan aksesibilitas daerah dan kapasitas pelayanan infrastruktur terpadu.	Indeks Kemahalan Konstruksi	120,00	121,38	Tidak Tercapai
5.	Meningkatkan keberdayaan, kapasitas, dan melestarikan budaya dalam masyarakat adat.	Tersedianya peraturan daerah sebagai regulasi dalam dinamika kehidupan masyarakat hukum adat	Ada	Ada	Tercapai
6.	Menjamin kepastian terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	87,00	85,87	Tidak Tercapai

Sumber Data BPS, DLHP, Bagian Hukum dan Bagian Ortal Setda Kabupaten Fakfak Tahun 2025

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten Fakfak Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		BERTAMBAH/ KURANG
			2023	2024	
1	2	3	5	6	7
1.	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.	Indeks Pembangunan Manusia	70,85	71,52	0,87
2.	Membangun dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Fakfak.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	1.86*	3,15**	1,29
		Jumlah Penduduk Miskin/Tingkat Kemiskinan	17.840	17.670	170
3.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN serta menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).	Indeks Reformasi Birokrasi	B	CC	Berkurang
4.	Meningkatkan aksesibilitas daerah dan kapasitas pelayanan infrastruktur terpadu.	Indeks Kemahalan Konstruksi	118,12	121,38	3,28
5.	Meningkatkan keberdayaan, kapasitas, dan melestarikan budaya dalam masyarakat adat.	Tersedianya peraturan daerah sebagai regulasi dalam dinamika kehidupan masyarakat hukum adat	Ada	Ada	--
6.	Menjamin kepastian terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,00	85,87	25,87

Sumber Data BPS, DLHP, Bagian Hukum dan Bagian Ortal Setda Kabupaten Fakfak

Catatan:

* Data PDRB dan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 merupakan angka sementara;

** Data PDRB dan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 merupakan angka sangat sementara;

- d. **Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah**
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2024 dibandingkan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7
**Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam
RPJMD Kabupaten Fakfak Tahun 2021-2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam RPJMD									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui bidang pendidikan, kesehatan, & keagamaan.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,2	69,2	69,44	70,85	69,64	71,52	70,04		70,26	
2	Membangun dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Fakfak.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,12	1,85	3,53	1,86*	4,25	3,15*	5,35		6,415	
		Jumlah Penduduk Miskin/Tingkat Kemiskinan	Jiwa	16.673	18.130	16.420	17.80	15.860	17.670	15.384		14.978	
3	Meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN serta menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	sedang	Cukup	Sedang	Baik	Sedang	Cukup	Sedang		Sedang	
4	Meningkatkan aksesibilitas daerah dan kapasitas pelayanan infrastruktur terpadu.	Indeks Kemahalan Konstruksi	Indeks	128,90	117,96	125,00	118,12	120,00	121,38	115,00		110,55	
5	Meningkatkan keberdayaan, kapasitas, dan melestarikan budaya dalam masyarakat adat.	Tersedianya peraturan daerah sebagai regulasi dalam dinamika kehidupan masyarakat hukum adat	Ada/Tidak Ada	ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	
6	Menjamin kepastian terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	85,00	86,65	86,00	60	87,00	85,87	88,00		89,00	

Sumber Data RPJMD, BPS, DLHP, Bagian Hukum dan Bagian Ortal Setda Kabupaten Fakfak

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Dari informasi dan data tersebut diatas, maka dapat dianalisis secara kualitatif efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja tahun 2024. Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia
Target IPM Kabupaten Fakfak dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 69,64, sedangkan realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 sebesar 71,52. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Fakfak tahun 2024 efisien dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat meningkatkan harapan hidup masyarakat, meningkatkan akses kependidikan dan kualitas pendidikan, meningkatkan akses ke kesehatan dan kualitas kesehatan karena telah mencapai target.
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin
 - a. Laju Pertumbuhan ekonomi
Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Fakfak dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 4,24% sedangkan realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 sebesar 3,15**%. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Fakfak tahun 2024 belum efisien dilihat dari realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 tidak mencapai target.
 - b. Jumlah Penduduk Miskin (Angka Kemiskinan)
 - c. Target jumlah penduduk miskin Kabupaten Fakfak dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah sebesar 15.860 jiwa, sedangkan realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 sebesar 17.670 jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa Kinerja Pemerintah Kabupaten Fakfak tahun 2024 cukup efisien karena telah mencapai target.
3. Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas atau efektifitas dan efisiensi reformasi birokrasi di Kabupaten Fakfak. Target Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Fakfak dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah B (baik) diangka 71-80, sedangkan realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 adalah CC (Cukup) diangka 61-70. Hal ini berarti bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Fakfak belum efisien dikarenakan dalam hal mendorong reformasi birokrasi tidak mencapai target.
4. Indeks Kemahalan Konstruksi
Indeks Kemahalan Konstruksi adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemahalan biaya konstruksi disuatu daerah. Semakin tinggi Indeks Kemahalan Konstruksi maka biaya konstruksi semakin meningkat. Hal ini semakin kurang baik. Target Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Fakfak dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah sebesar 120,00, sedangkan realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 sebesar 121,38. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Fakfak belum efisien dikarenakan dalam mendorong turunnya Indeks Kemahalan Konstruksi tidak mencapai target.
5. Tersedianya Peraturan Daerah sebagai regulasi dalam dinamika kehidupan masyarakat hukum adat
Target Perjanjian Kinerja Kabupaten Fakfak tahun 2024 adalah tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang P3MHA (Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat) telah ditetapkan pada tahun 2023 dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Wilayah Pemerintahan Adat Petuanan di Kabupaten Fakfak telah ditetapkan pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa Kinerja Pemerintah Kabupaten fakfak efisien dalam mendorong regulasi Perlindungan dan Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat, karena telah mencapai target.

6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup disuatu daerah. Target IKLH dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Fakfak tahun 2024 adalah sebesar 87,00, sedangkan realisasi Capaian Kinerja tahun 2024 sebesar 85,87. Hal ini menggambarkan bahwa Kinerja Pemerintah Kabupaten Fakfak belum efisien dikarenakan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup tidak mencapai target.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dari informasi dan data tersebut diatas, maka dapat dianalisis secara kualitatif bahwa berdasarkan perjanjian kinerja Kabupaten Fakfak Tahun 2024 terdapat program-program yang direncanakan dapat mendorong pencapaian target kinerja dalam rangka mencapai 6 (enam) indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kabupaten Fakfak tahun 2024 diatas. Rincian program yang mendukung pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja
Kabupaten Fakfak Tahun 2024

No	PROGRAM	ANGGARAN
		Perjanjian Kinerja
1	2	3
1	Pengelolaan Pendidikan	137.267.994.523
2	Pengembangan Kurikulum	400.000.000
3	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	2.289.597.912
4	Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	101.830.419
5	Pembinaan Perpustakaan	1.422.988.085
6	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan masyarakat	84.889.599.165
7	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya manusia Kesehatan	2.094.428.131
8	Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	49.360.000
9	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	122.187.470
10	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	356.512.627
11	Perlindungan Perempuan	560.698.213
12	Peningkatan Kualitas Keluarga	575.564.159
13	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	49.999.942
14	Perlindungan Khusus Anak	249.999.429
15	Pengendalian Penduduk	246.600.000
16	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.332.343.102
17	Pemberdayaan dan Keluarga Sejahtera (KS)	2.666.797.260
18	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	803.180.753
19	Penempatan Tenaga Kerja	194.585.581
20	Hubungan Industrial	137.538.391
21	Perencanaan kawasan Transmigrasi	51.400.000
22	Pembangunan kawasan Transmigrasi	56.880.000
23	Pengembangan kawasan Transmigrasi	124.550.000
24	Pengembangan Iklim penanaman Modal	13.520.000
25	Pelayanan penanaman modal	58.800.000
26	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	445.600.119
27	Peningkatan daya tarik destinasi Pariwisata	3.916.606.148
28	Pemasaran pariwisata	1.375.803.433
29	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	779.577.915
30	Pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	1.572.144.748
31	Pengelolaan perikanan tangkap	9.803.642.573
32	Pengelolaan perikanan budidaya	691.342.009
33	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	349.994.632
34	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	4.840.219.597
35	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1.184.526.145
36	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	499.999.236
37	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	2.832.203.127
38	Perencanaan dan pembangunan industri	1.382.553.293
39	Pelayanan izin usaha simpan pinjam	100.906.432



40	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	193.842.546
41	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	361.044.724
42	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	305.301.969
43	Pengembangan (UMKM)	1.263.061.308
44	Pengelolaan keuangan daerah	221.908.850.343
45	Pengelolaan barang milik daerah	1.513.302.100
46	Pengelolaan pendapatan daerah	817.358.235
47	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	4.466.828.801
48	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.424.692.000
49	Penelitian dan pengembangan daerah	404.223.000
50	Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	28.142.253.581
51	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	18.891.480.500
52	Perekonomian dan pembangunan	3.136.915.197
53	Penyelenggaraan pengawasan	7.167.702.518
54	Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	1.684.409.400
55	Kepegawaian daerah	4.476.356.860
56	Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	2.042.291.149
57	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	42.376.809.928
58	Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	137.273.817
59	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	112.178.030
60	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	378.413.095
61	Pendaftaran penduduk	629.097.079
62	Pencatatan Sipil	441.671.912
63	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	402.277.965
64	Program penataan desa	753.173.744
65	Administrasi pemerintahan desa	999.903.034
66	Pembangunan Kampung dan Perkampungan	4.069.726.045
67	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	946.492.453
68	Pengelolaan suberdaya air (SDA)	2.988.883.938
69	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1.319.927.925
70	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	2.749.714.675
71	Pengembangan pemukiman	4.964.460.953
72	Penataan bangunan gedung	5.553.022.818
73	Penyelenggaraan jalan	99.258.881.851
74	Penyelenggaraan Penataan Ruang	912.488.520
75	Pengembangan Perumahan	4.258.304.470
76	Kawasan Pemukiman	2.347.949.929
77	Peningkatan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum (PSU)	3.413.953.510
78	Pengelolaan Aplikasi informatika	3.751.482.160
79	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	4.508.210.000
80	Pengelolaan pelayaran	1.602.520.000
81	Pemberdayaan Sosial	2.733.162.987
82	Rehabilitasi Sosial	1.496.580.504
83	Perlindungan dan jaminan sosial	756.343.690
84	Pengelolaan taman makam pahlawan	191.981.344
85	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1.341.683.104
86	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1.859.366.541
87	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	137.816.774
88	Penyuluhan pertanian	88.193.705
89	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	240.348.150
90	Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	911.139.815
91	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	645.168.680
92	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	190.114.890
93	Pengelolaan persampahan	99.524.857
94	Penanggulangan bencana	2.015.569.834

Sumber Data Bagian Ortal Setda Kabupaten Fakfak Tahun 2024

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melakukan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasana, serta sumber daya manusia, dengan kewajiban pelaksana melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada pemberi tugas sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Alokasi dana tugas pembantuan bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di daerah dan menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan yang didanai dari APBN melalui program dan kegiatan yang didanai dari APBD. Dalam pengelolaan Tugas Pembantuan maka setiap OPD akan melaksanakan sesuai dengan bidang tugas masing-masing sesuai dasar hukum.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi Dan tugas Pembantuan;
- d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
- e. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan tahun anggaran 2024 Nomor SP DIPA-067.07.4.350430/ 2024, tanggal 27 November 2023
- f. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan tahun anggaran 2024 Nomor SP DIPA-018.08.4.339091/2024

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2024 Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak sebanyak 1 (satu) Kementerian yaitu Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia bidang urusan transmigrasi dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan yakni Program Daerah Tertinggal Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 753.331.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Program dan kegiatan tersebut dikelola dan dilaksanakan melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak.

Sedangkan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Papua Barat sebanyak 1 (satu) Perangkat Daerah Provinsi yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat bidang urusan pertanian, yakni program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan anggaran sebesar Rp.112.800.000 (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) serta program Irigasi dan Perpompaan dengan anggaran sebesar Rp.112.800.000 (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah). Program dan kegiatan tersebut dikelola dan dilaksanakan melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Adapun tugas pembantuan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak tahun 2024 yaitu tugas Pembantuan di Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja, serta Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan

Tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan berupa tugas Pembantuan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Dirjen Pembangunan dan Permukiman Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak yaitu Program Daerah Tertinggal Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-067.07.4.350430/2024.

3.1.1 Target Kinerja

Adapun target anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Dirjen Pembangunan dan Permukiman Transmigrasi, yaitu Program Daerah Tertinggal Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi adalah sebesar Rp. 753.331.000,-, dan Anggaran Revisi sebesar Rp. 543.331.000,-. Sedangkan target kinerja program dan kegiatan adalah terealisasinya Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

3.1.2 Realisasi

Realisasi Anggaran dari Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang diberikan Pusat yaitu Program Daerah Tertinggal, Pedesaan dan Transmigrasi adalah sebesar Rp. 541.146.612,- atau tercapai 99,6 %. Sedangkan realisasi program dan kegiatannya tercapai 100 %, yakni terealisasinya Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Capaian kinerja pelaksanaan Tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak tahun 2024 melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak dibidang urusan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Fakfak Tahun 2024

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
						Induk	Revisi					
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1	Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada Kementerian Desa, PDTT RI	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan tahun anggaran 2024 Nomor SP DIPA-067.07.4.350430/2024, tanggal 27 November 2023	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi - Pembangunan Drainase - Pengadaan Saprodik Pertanian	Tomage-SP2	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Fakfak	753.331.000	543.331.612	541.146.612	99,60	Terealisasinya Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	APBN-TP

Sumber Data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak Tahun 2025

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Fakfak

Tugas pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak berupa tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, yaitu Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-018.08.4.339091/2024.

3.2.1 Target Kinerja

Target anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yaitu program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp.112.800.000,- berupa kegiatan pengelolaan air irigasi untuk pertanian bagi Kelompok Tani Maleo Kampung Wargep Distrik Kramongmongga dan Kelompok Tani Ngganggawore Kampung Masina Distrik Kokas sebesar Rp.112.800.000,- dengan target kinerja program dan kegiatan yaitu terealisasinya Sarana Irigasi dan Perpompaan di area pertanian.

3.2.2 Realisasi

Realisasi Anggaran dari Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yaitu program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp. 93.960.000,- atau tercapai 83,2 % dengan target kinerja program dan kegiatan terealisasi 100%, di Kampung Wargep. Sedangkan di Kampung Masina terealisasi anggaran sebesar Rp. 112.700.000,- atau sebesar 99,9% dan realisasi capaian kegiatan sebesar 100%.

Capaian kinerja pelaksanaan Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak tahun 2024 dibidang urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (RP)	Realisasi Anggaran (RP)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan tahun anggaran 2024 Nomor SP DIPA-018.08.4.339091/2024	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas;		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Fakfak						APBN-PB
			Kegiatan pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian Tanaman Padi	Kelompok Tani Maleo Kampung Wargep Distrik Kramongmongga		112.800.000	93.960.000	83,2	Terealisasinya Sarana Irigasi dan Perpompaan di Area Pertanian (tanaman padi)	100	
				Kelompok Tani Nggangawore Kampung Masina Distrik Kokas		112.800.000	112.700.000	99,9		100	

Sumber Data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak Tahun 2025

3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas pembantuan baik tugas pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut :

1. Minimnya dukungan penganggaran untuk operasional pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan tersebut.
2. Minimnya dukungan pendanaan pendampingan bagi Kelompok Tani.
3. Minimnya dukungan pendanaan bagi keberlanjutan program dan kegiatan.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut dalam rangka optimalisasi capaian kinerja program dan kegiatan tugas pembantuan tersebut adalah :

1. Perlunya dukungan pendanaan berupa dana sharing dari Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk operasional, pendampingan dan keberlanjutan program dan kegiatan dari tugas pembantuan tersebut.
2. Perlunya dukungan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Fakfak serta pengawasan dari DPRK Fakfak.

BAB IV

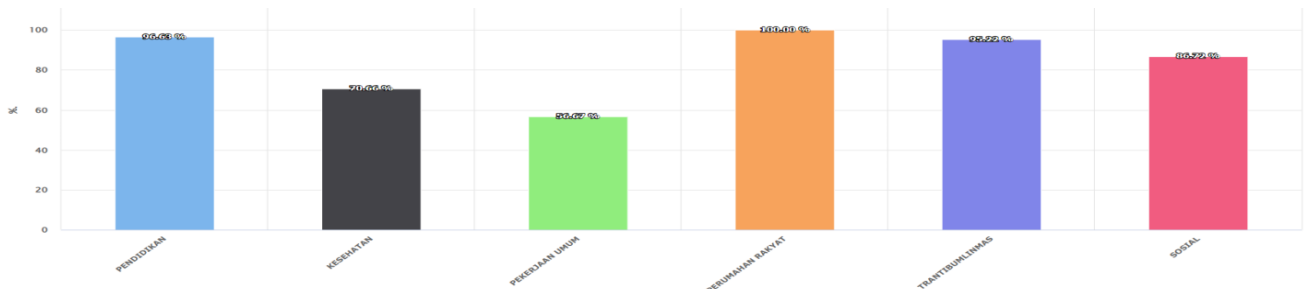
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi masyarakat. Penerapan SPM diprioritaskan bagi masyarakat yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasarnya. Pada tahun 2024 capaian penerapan SPM di Kabupaten Fakfak adalah sebesar 84,32 % (**TUNTAS PRATAMA**).

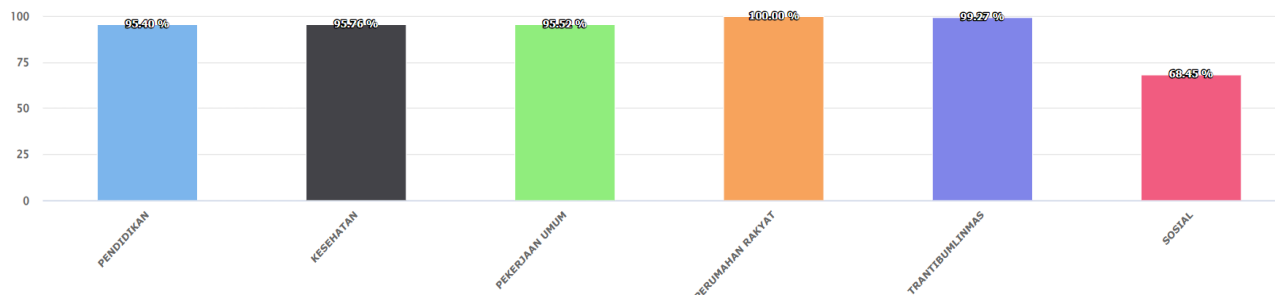
Persentase realisasi capaian penerapan SPM kabupaten Fakfak tahun 2024 dan persentase realisasi anggaran penerapan SPM kabupaten Fakfak tahun 2024 untuk setiap bidang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Grafik 4.1
Persentase Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Fakfak Tahun 2024



Sumber data E-SPM Kabupaten Fakfak Tahun 2024

Grafik 4.2
Persentase Realisasi Anggaran Untuk setiap Bidang pada Kabupaten Fakfak Tahun 2024



Sumber data E-SPM Kabupaten Fakfak Tahun 2024

Gambaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Fakfak tahun 2024 yang telah terinput dalam aplikasi E-SPM dapat diuraikan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut :

4.1 Urusan Pendidikan

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan di Kabupaten Fakfak pada tahun 2024 mencapai indeks capaian penerapan SPM sebesar 96,63% (**TUNTAS UTAMA**). Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan di Kabupaten Fakfak dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pelayanan dasar dalam urusan pendidikan di Kabupaten Fakfak secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan dengan jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan antara lain:

- Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam pendidikan lebih lanjut.
- Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama)
Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
- Pendidikan Menengah
Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan formal yang merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah dapat berupa sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK).
- Pendidikan Kesetaraan
Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan. Penerima pelayanan dasar SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan antara lain :

Tabel 4.1

Target Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Fakfak

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian (Tahun)
1	2	3	4	5
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2024
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-13 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	2024
3.	Pendidikan Menengah	Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah	100%	2024
4.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2024

Sumber data E-SPM Kabupaten Fakfak Tahun 2024

4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal urusan pendidikan di Kabupaten Fakfak tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 4.2

Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Kabupaten	Capain SPM
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	95,31%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	96,19%
3	Pendidikan Menengah	Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah	100%	95,81%
4	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	99,20%

Sumber Data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun 2025

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Alokasi anggaran dalam penerapan SPM adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pengelola Pendidikan Usia Dini (PAUD)	12,177,280,568	11,917,638,066	97.87 %
2	Pengelola Pendidikan Sekolah Dasar	58,120,097,265	54,947,497,182	94.54 %
3	Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah	28,156,959,734	27,048,999,071	96.07 %
3	Pengelola Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2,071,425,422	1,988,850,125	96.01 %
	Jumlah	100,525,762,989	95,902,984,444	95.40 %

Sumber Data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), personil di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Dukungan Personil Urusan Pendidikan Tahun 2024

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh pegawai			
		Fungsional	Struktural	Pelaksana	Total
1	2	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak	1.588	21	220	1.829

Sumber Data BKPSDM Kabupaten Fakfak Tahun 2025

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Kurangnya informasi yang diterima pihak sekolah mengenai SPM;
2. Peran pihak sekolah masih kurang dalam penerapan SPM;
3. Kurangnya efektivitas pelaksanaan program sekolah yang berkaitan dengan pemenuhan SPM.

Solusi :

1. Sosialisasi mengenai SPM bagi pihak sekolah;
2. Memberikan bimbingan untuk mengoptimalkan peran pihak sekolah dalam penerapan SPM;
3. Pihak sekolah harus menyusun, memonitoring dan mengevaluasi pemenuhan SPM dalam Rencana Kegiatan Sekolah yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dan Rencana Kerja Tahunan.

4.2 Urusan Kesehatan

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan di Kabupaten Fakfak pada tahun 2024 mencapai indeks capaian penerapan SPM sebesar 70,66% (**TUNTAS PRATAMA**). Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan di Kabupaten Fakfak dapat diuraikan sebagai berikut :

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV.

4.2.2 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal

Target dan Indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

Tabel. 4.5
Target Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian (Tahun)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2024
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2024
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2024
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2024
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yg mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2024
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2024
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian (Tahun)
1	2	3	4	5
8	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2024
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2024
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani Kesehatan	100%	2024
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2024
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	2024

Sumber Data e-SPM Kabupaten Fakfak Tahun 2025

4.2.3 Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Kabupaten Fakfak tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

NO	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM
1	2	3	4
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	82.24 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang menerima layanan kesehatan	81,10 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	86.89 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang menerima layanan kesehatan	86.78 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	73.17 %
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	53.40 %
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	79.72 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	37.41 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	38.42 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	74.74 %
11	Pelayanan Kesehatan dengan Tuberculosis (TBC)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis yang menerima layanan kesehatan	64.79 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	89.30 %

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Tahun 2024

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Alokasi anggaran dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, sebagai berikut :

Tabel 4.7

Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	16,620,000	16,609,000	99.93 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	448,955,645	429,544,569	95.68 %
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	-	-
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	-	-
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	-	-
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	125,838,000	115,101,500	91.47 %
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	-	-	-
11.	Pelayanan Kesehatan dengan Tuberculosis (TBC)	249,600,720	244,068,750	97.78 %
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terinfeksi HIV	-	-	-
	Jumlah	841,014,365	805,323,819	95.76 %

Sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Tahun 2024

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), personil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8

Dukungan Personil Urusan Kesehatan Tahun 2024

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh pegawai			
		Fungsional	Struktural	Pelaksana	Total
1	2	4	5	6	7
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak	585	28	143	756

Sumber Data BKPSDM Kabupaten Fakfak Tahun 2025

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan adalah sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan sebagai akibat belum optimalnya puskesmas berfungsi sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan;
2. Lemahnya upaya pembinaan dan apresiasi terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan;
3. Sumber daya kesehatan dalam pemerataan distribusi serta kualitas tenaga kesehatan
4. Belum terpenuhinya kecukupan pembiayaan kesehatan yang diikuti efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Solusi :

1. Mengembangkan Puskesmas di wilayahnya melalui pelaksanaan kebijakan dasar serta standar pelayanan puskesmas sesuai fungsi;
2. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur, ketenagaan obat, sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan anggaran;
3. Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan secara optimal;
4. Membangun jejaring kemitraan pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
5. Mengoptimalkan pendayagunaan sarana pelayanan dan tenaga kesehatan swasta dalam pembangunan kesehatan;
6. Melakukan kajian terhadap jenis dan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan;
7. Memantapkan standar tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
8. Mengupayakan peningkatan anggaran kesehatan daerah secara bertahap dengan fokus prioritas untuk pelayanan public.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Fakfak pada tahun 2024 mencapai indeks capaian penerapan SPM sebesar 56,67% **(BELUM TUNTAS)**. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Fakfak dapat diuraikan sebagai berikut :

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar urusan pekerjaan umum yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

4.3.2 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal

Target dan Indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Fakfak sebagai berikut:

Tabel. 4.9

Target SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian (Tahun)
1	2	3	4	5
1.	Pemenuhan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	2024
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	2024

Sumber Data Dinas PUPRP2KP Kabupaten Fakfak Tahun 2024

4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum di Kabupaten Fakfak tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.10

Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Kabupaten	Capaian SPM
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	13,33%

Sumber Data Dinas PUPRP2KP Kabupaten Fakfak Tahun 2024

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman sebagai berikut :

Tabel 4.11

Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1,319,927,925	1,289,320,000	97.68 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	-	-	-
3.	Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	6,147,181,131	5,843,411,690	95.06 %
	Jumlah	7,467,109,056	7,132,731,690	95.52 %

Sumber Data Dinas PUPRP2KP Kabupaten Fakfak Tahun 2024

4.3.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan pekerjaan umum, personil pendukung di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fakfak berjumlah 37 (Tiga puluh tujuh) pegawai dari jumlah pegawai pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.12

Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh pegawai			
		Fungsional	Struktural	Pelaksana	Total
1	2	4	5	6	7
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fakfak	0	27	79	106

Sumber Data BKPSDM Kabupaten Fakfak Tahun 2025

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2024 permasalahan yang dihadapi ialah kondisi lokasi pekerjaan yang membuat beberapa kegiatan terhambat penyelesaian dan kondisi sosial masyarakat yang kurang kooperatif terhadap program pembangunan pemerintah, dimana tidak semua masyarakat mempunyai tingkat kesadaran dan pengorbanan terhadap program yang tengah dilaksanakan pemerintah. Sehingga solusi untuk mengatasi permasalahan ini, diharapkan ada penanganan yang jelas dan tegas oleh instansi yang berkompeten sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana secara optimal.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Fakfak pada tahun 2024 mencapai indeks capaian penerapan SPM sebesar 100% (**TUNTAS PARIPURNA**). Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Fakfak dapat diuraikan sebagai berikut :

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yaitu :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten;
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemrintah.

4.4.2 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal

Target dan Indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Fakfak sebagai berikut :

Tabel 4.13
Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian (Tahun)
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni bagi korban bencana Kab/kota	100%	2024
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	2024

Sumber Data e-SPM Kabupaten Fakfak Tahun 2024

4.4.3 Realisasi

Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal urusan perumahan rakyat di Kabupaten Fakfak tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.14
Realiasi Capain SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Kabupaten	Capaian SPM
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni bagi korban bencana Kab/kota	100%	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%

Sumber Data e-SPM Kabupaten Fakfak Tahun 2024

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman selaku OPD teknis pelaksana dalam melaksanakan standar pelayanan minimal pada urusan perumahan rakyat masih mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan dalam bidang Urusan Perumahan Rakyat yakni:

- Rumah layak huni dan terjangkau;
- Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, saran dan utilitas (PSU).

Oleh karena itu target dan capaian realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.15
Target dan Capaian Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Kabupaten (%)	Capaian SPM (%)
1	2	3	4	5
1.	Rumah layak huni dan terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	100%
2.	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, saran dan utilitas (PSU).	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	100%	100%

Sumber data: Dinas PUPRP2KP Kabupaten Fakfak

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman sebagai berikut :

Tabel 4.16

Alokasi Anggaran SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	Program Kawasan Pemukiman	-	-	-
2	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	-	-	-
3	Penerima Bantuan Status Tanggap Darurat Kejadian Bencana Alam Angin Puting Beliung	350,649,000	350,649,000	100%
	Jumlah	350,649,000	350,649,000	100%

Sumber Data Dina PUPR Kabupaten Fakfak 2024

4.4.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan Perumahan Rakyat, personil pendukung di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fakfak berjumlah 28 Orang pegawai dari jumlah pegawai pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.17

Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh pegawai			
		Fungsional	Struktural	Pelaksana	Total
1	2	4	5	6	7
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Fakfak	0	27	79	106

Sumber Data BKPSDM Kabupaten Fakfak Tahun 2024

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2024 permasalahan yang dihadapi ialah kondisi lokasi pekerjaan yang membuat beberapa kegiatan terhambat penyelesaian dan kondisi sosial masyarakat yang kurang kooperatif terhadap program pembangunan pemerintah, dimana tidak semua masyarakat mempunyai tingkat kesadaran dan pengorbanan terhadap program yang tengah dilaksanakan pemerintah. Sehingga **solusi** untuk mengatasi permasalahan ini, diharapkan ada penanganan yang jelas dan tegas oleh instansi yang berkompeten sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana secara optimal.

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Fakfak pada tahun 2024 mencapai indeks capaian penerapan SPM sebesar 95,22% (**TUNTAS UTAMA**). Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Fakfak dapat diuraikan sebagai berikut :

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
4. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana;
5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran.

4.5.2 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal

Target dan Indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Fakfak sebagai berikut :

Tabel 4.18

Target Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian (Tahun)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	2024
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2024
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2024
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2024
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	2024

Sumber Data e-SPM Kabupaten Fakfak Tahun 2024

4.5.3 Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Fakfak tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.19

Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Kabupaten (%)	Capaian SPM (%)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	93,33 %
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	95.00 %
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100.00 %
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	92.00 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	96.67 %

Sumber Data e-SPM Kabupaten Fakfak Tahun 2024

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20

Alokasi Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	664,635,400	660,535,400	99.38 %
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	234,559,334	230,040,000	98.07 %
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	103,687,700	102,941,400	99.28 %
	Jumlah	946,492,453	942,392,453	99.57 %

Sumber Data : Satpol PP dan BPBD Kabupaten Fakfak

4.5.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, personil pendukung di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 39 pegawai dan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Fakfak berjumlah 32 pegawai dengan klasifikasi pendidikan, golongan dan pangkat dapat dilihat secara detail pada lampiran jumlah pegawai Kabupaten Fakfak.

Tabel 4.21

Dukungan Personil Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh pegawai			
		Fungsional	Struktural	Pelaksana	Total
1	2	4	5	6	7
1	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Fakfak	0	12	27	39
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Fakfak	0	14	18	32

Sumber Data BKPSDM Kabupaten Fakfak Tahun 2024

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat antara lain:

1. Kondisi geografis Kabupaten Fakfak yang terdiri dari wilayah daratan rendah, pegunungan dan lautan;
2. Belum dilantiknya Anggota PPNS sehingga dalam pelaksanaan tugas belum maksimal;
3. Masih kurangnya Hydran sumber air untuk pemadam kebakaran hanya berupa bak penampungan air yang ada pada pos pemadam kebakaran sehingga bila terjadi bencana kebakaran mobil pemadam harus bolak-balik dari tempat kejadian kebakaran ke pos pemadam kebakaran;
4. Terbatasnya Sarana dan prasarana pemadam kebakaran masih dan truk DALMAS;
5. Kurangnya tenaga teknis kebencanaan dibandingkan dengan beban kerja;
6. Kurangnya sarana dan prasarana;
7. Terbatasnya anggaran;
8. Belum adanya pemetaan daerah-daerah rawan bencana;
9. Kurangnya pengembangan kualitas SDM;
10. Lemahnya fungsi kordinasi antar instansi terkait.

Solusi:

1. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksana kegiatan;
2. Perlu adanya peningkatan SDM anggota Satpol PP;
3. Penempatan pejabat yang menduduki jabatan Eselon III dan IV sesuai PP Nomor 6 Tahun 2010 terutama memperhatikan kemampuan dari pejabat tersebut, dalam upaya ketersediaan anggaran untuk menunjang segala program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana secara optimal;
4. Penambahan pegawai sesuai kebutuhan dan peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan Diklat struktural dan diklat fungsional;
5. Penambahan sarana dan prasarana kebencanaan;
6. Perlu adanya tenaga yang memiliki keahlian dalam pendataan daerah-daerah rawan bencana.

4.6 Urusan Sosial

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Sosial di Kabupaten Fakfak pada tahun 2024 mencapai indeks capaian penerapan SPM sebesar 86,72% (**TUNTAS MADYA**). Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Sosial di Kabupaten Fakfak dapat diuraikan sebagai berikut :

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana.

4.6.2 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal

Target dan Indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di Kabupaten Fakfak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22
Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%

Sumber Data Dinas Sosial Kabupaten Fakfak Tahun 2024

4.6.3 Realisasi

Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal Urusan Sosial di Kabupaten Fakfak tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.23
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET KABUPATEN	CAPAIAN SPM
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	90.77 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	95.00 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	93.85 %
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	67.33 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	86.67 %

Sumber Data Dinas Sosial Kabupaten Fakfak Tahun 2024

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24
Alokasi Anggaran Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1,132,518,164	775,199,583	68.45 %
	Jumlah	1,132,518,164	775,199,583	68.45 %

Sumber Data Dinas Sosial Kabupaten Fakfak 2024

4.6.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial, personil pendukung di lingkungan Dinas Sosial berjumlah 40 orang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.25
Dukungan Personil Urusan Sosial Tahun 2024

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Seluruh pegawai			
		Fungsional	Struktural	Pelaksana	Total
1	2	4	5	6	7
1	Dinas Sosial Kabupaten Fakfak	0	21	19	40

Sumber Data BKPSDM Kabupaten Fakfak Tahun 2024

4.6.6 Permasalahan dan Solusi Permasalahan

Dalam penerapan SPM bidang urusan sosial pada Dinas Sosial terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang belum diperbaharui secara berkala setiap tahun anggaran berjalan;
2. Keterbatasan anggaran sehingga belum semua PMKS dapat dilayani secara baik;
3. Belum tersedia anggaran untuk pendataan PMKS secara berkala;
4. Keterbatasan tenaga ASN dalam pelayanan pendampingan dan konseling kepada PMKS yang membutuhkan.
5. Kurangnya peran aktif masyarakat dalam membantu penanganan SPM Bidang Sosial
6. Hal-hal teknis pelayanan terhadap SPM Urusan Sosial dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak optimal.

**Solusi**

Untuk menindaklanjuti pemasalahan yang terjadi maka solusi yang diberikan sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan anggaran yang cukup disesuaikan dengan pelayanan yang dilaksanakan sehingga setiap program dan kegiatan dalam pelayanan PMKS dapat dilaksanakan secara optimal;
2. Perlu adanya pelaksanaan pelatihan bagi tenaga ASN yang bertugas dalam pelaksanaan urusan sosial sehingga dapat melakukan pelayanan bagi PMKS yang membutuhkan.
3. Mengusulkan proposal ke Kementerian Sosial RI untuk memperoleh akses dalam pemberian bantuan pelayanan dasar urusan sosial.

4.7 Pogram Dan Kegiatan

Program dan kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Fakfak Tahun 2024 dapat dilihat pada pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.26
Program dan Kegiatan SPM Tahun 2024

No	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
KAB. FAK FAK						
URUSAN PENDIDIKAN				100,525,762,989	95,902,984,444	95.40 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			100,525,762,989	95,902,984,444	95.40 %
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar K20240327110629		58,120,097,265	54,947,497,182	94.54 %
	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	105,000,000	105,000,000	100.00 %
	2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	2,417,017,632	2,337,090,340	96.69 %
	5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	3,116,461,687	2,490,913,322	79.93 %
	6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah	Unit	3,545,545,804	3,543,070,640	99.93 %
	10	Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	1,259,720,700	1,259,547,175	99.99 %
	11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	600,648,750	598,267,910	99.60 %
	12	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	2,151,861,839	2,079,988,550	96.66 %
	13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	246,150,000	243,587,500	98.96 %
	16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	400,000,000	399,955,000	99.99 %
	17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	1,669,230,886	1,662,897,046	99.62 %
	19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1,170,870,049	1,147,547,695	98.01 %
	20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	691,872,396	687,070,541	99.31 %
	21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	14,230,530,000	12,872,681,883	90.46 %
	22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	596,795,827	596,671,106	99.98 %
	23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	1,052,877,960	1,051,746,000	99.89 %
	30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1,530,367,668	1,530,044,292	99.98 %
	31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	394,100,000	294,100,000	74.63 %
	36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	150,000,000	109,989,000	73.33 %
	37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
	38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	9,655,075,820	9,165,050,697	94.92 %
	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	534,215,193	236,167,930	44.21 %
	41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	9,905,757,040	9,849,018,205	99.43 %
	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	2,695,998,014	2,687,092,350	99.67 %
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama K20240327110647		28,156,959,734	27,048,999,071	96.07 %
	2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	2,021,605,104	2,020,893,700	99.96 %
	5	Pembangunan Laboratorium	Ruang	1,539,039,744	1,144,279,000	74.35 %
	8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru / Penjaga Sekolah	Unit	2,244,473,258	2,243,705,738	99.97 %
	11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1,111,554,860	1,107,662,916	99.65 %
	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	737,264,352	309,968,450	42.04 %
	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	180,027,096	171,590,000	95.31 %
	21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	92,407,500	88,730,625	96.02 %
	22	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	200,000,000	199,990,000	100.00 %
	23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	837,745,650	837,745,650	100.00 %
	27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	293,339,000	293,339,000	99.94 %
	28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	990,990,499	952,814,615	96.15 %
	30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	3,149,854,768	3,137,830,941	99.62 %
	31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	905,021,194	879,333,885	97.16 %
	32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	6,510,400,000	6,416,515,008	98.56 %
	33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	236,142,680	223,635,521	94.70 %
	41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1,363,278,000	1,363,221,770	100.00 %
	47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	3,941,752,805	3,896,398,252	98.85 %
	48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1,741,897,224	1,701,394,000	97.67 %
	50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	60,000,000	59,950,000	99.92 %



No	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SERAPAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412		12,177,280,568	11,917,638,066	97.87 %
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	425,362,155	424,256,940	99.74 %
	4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	424,402,115	364,589,600	85.91 %
	5	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	31,067,707	31,067,707	100.00 %
	8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	137,467,100	37,400,000	27.21 %
	9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	3,865,440,598	3,858,730,913	99.83 %
	11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	872,374,638	862,600,567	98.88 %
	13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	2,002,500,000	1,936,745,799	96.72 %
	14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	433,916,630	431,077,140	99.35 %
	18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	600,000,000	599,140,000	99.86 %
	20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1,056,529,573	1,048,512,188	99.24 %
	21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	631,928,500	627,862,832	99.36 %
	24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1,696,291,552	1,695,654,380	99.96 %
	36	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20240327112444		2,071,425,422	1,988,850,125	96.01 %
	7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	819,920,000	762,290,000	92.97 %
	32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	1,251,505,422	1,226,560,125	98.01 %
URUSAN KESEHATAN				841,014,365	805,323,819	95.76 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			841,014,365	805,323,819	95.76 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		841,014,365	805,323,819	95.76 %
	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	16,620,000	16,609,000	99.93 %
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	448,955,645	429,544,569	95.68 %
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	125,838,000	115,101,500	91.47 %
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	249,600,720	244,068,750	97.78 %
URUSAN PEKERJAAN UMUM				7,467,109,056	7,132,731,690	95.52 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			1,319,927,925	1,289,320,000	97.68 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		1,319,927,925	1,289,320,000	97.68 %
	1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/ detik	1,319,927,925	1,289,320,000	97.68 %
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA			6,147,181,131	5,843,411,690	95.06 %
	1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		6,147,181,131	5,843,411,690	95.06 %
	1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Liter/ detik	6,147,181,131	5,843,411,690	95.06 %
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT				350,649,000	350,649,000	100.00 %
1	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA			350,649,000	350,649,000	100.00 %
	1	Penerima Bantuan Status Tanggap Darurat Kejadian Bencana Alam Angin Puting Beliung		350,649,000	350,649,000	100.00 %
URUSAN TRANTIBUMLINMAS				1,284,739,487	1,275,373,853	99.27 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)			946,492,453	942,392,453	99.57 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		664,635,400	660,535,400	99.38 %
	1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	164,667,400	160,567,400	97.51 %
	2	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	499,968,000	499,968,000	100.00 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		281,857,053	281,857,053	100.00 %
	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	281,857,053	281,857,053	100.00 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)			338,247,034	332,981,400	98.44 %
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		234,559,334	230,040,000	98.07 %
	1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	234,559,334	230,040,000	98.07 %
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		103,687,700	102,941,400	99.28 %
	1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	103,687,700	102,941,400	99.28 %
URUSAN SOSIAL				1,132,518,164	775,199,583	68.45 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1,132,518,164	775,199,583	68.45 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1,132,518,164	775,199,583	68.45 %
	1	Penyediaan permakanaan	Orang	306,182,614	305,969,614	99.93 %
	2	Penyediaan alat bantu	Orang	400,782,950	386,288,869	96.38 %
	3	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	98,296,000	8,433,000	8.58 %
	4	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	69,952,600	64,848,100	92.70 %
	5	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	257,304,000	9,660,000	3.75 %

Sumber Data E-SPM Kab. Fakfak Tahun 2024

BAB V PENUTUP

Pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang berasaskan Transparansi dan Akuntabel saat ini, harapan dan optimisme akan terwujudnya pemerataan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sesuai amanat UUD 1945 perlu mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh elemen penyelenggara pemerintahan.

Pemerintah Daerah sebagai garda terdepan Pelayan masyarakat wajib mengambil peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan setiap pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita bersama menuju **Indonesia Maju**. Tentu saja dalam penerapannya perlu dieksplisitkan dan dijabarkan secara nyata dengan berpedoman pada tiga pilar utama yakni Partisipasi, Transparansi dan *Accountability* (pertanggungjawaban) yang dilaksanakan oleh tiga pelaku utama yakni Pemerintah, Legislatif dan Masyarakat (didalamnya termasuk dunia usaha).

Untuk meningkatkan transparansi dan *accountability* baik dibidang keuangan daerah maupun kinerja pemerintah daerah, maka kepala daerah diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
4. Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024.

Adapun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 ini yang secara rinci menggambarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak selama tahun 2024, yang memuat visi, misi, strategi dan arah kebijakan daerah sesuai RPJMD serta program prioritas daerah.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, dengan mengacu pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan penunjang lainnya yang diserahkan ke daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
3. Pencapaian kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak yang digambarkan dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang meliputi tataran pengambil kebijakan dan tataran pelaksana kegiatan serta permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.



Namun disadari dengan sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan ini masih membutuhkan perbaikan dan penyesuaian kembali dimasa mendatang selaras dengan pemahaman mengenai ketentuan yang mengatur terhadap penyusunan LPPD.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2024 ini disampaikan sebagai kewajiban Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada pemerintah secara berjenjang.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita sekalian.

